



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



BPBD PROVINSI
SUMATERA SELATAN



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU
GUBERNUR SUMSEL

H. CIK UJANG
WAKIL GUBERNUR SUMSEL

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Imendagri Nomor 02 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk Periode 2025-2029.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional, KLHS, RTRW, RPJMD dan isu Penanganan Bencana maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya RENSTRA Priode 2025-2029 yang menjadi landasan pembangunan dibidang kebencanaan dalam mewujudkan Sumatera Selatan Terus Maju untuk Semua.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat untuk kita semua.

Palembang, Mei 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

M. Iqbal Alisyahbana, S.STP.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diamanatkan untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Pemerintah Daerah pada awal tahun 2025 sudah melakukan sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Prioritas Daerah. Seluruh kepala daerah terpilih menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun yang berpedoman kepada RPJMD.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar-dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana;
- k. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- r. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pengarusutamaan gender di daerah
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- t. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Untuk Periode 2025-2029.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- 1) Menyediakan dokumen rencana pembangunan daerah yang menjadi arah dan pedoman bagi Pimpinan dan pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan sehubungan dengan tugas dan fungsinya dalam mengambil kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana daerah khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Menyediakan dokumen rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan dalam menyusun dokumen rencana kerja tahunan.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- 1) Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang waktu sejak dibentuknya yaitu tahun 2010 hingga saat disusunnya dan berakhirnya dokumen ini.
- 2) Melakukan berbagai analisis maupun proyeksi untuk periode lima tahun mendatang berdasarkan pertimbangan yang logis terhadap berbagai isu strategis, permasalahan yang telah terjadi di masa yang lalu dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang untuk dapat menentukan kebijakan yang akan diambil sehubungan dengan hal tersebut.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat:

a. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

b. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

c. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

d. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah:

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

- e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
- f. Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- g. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD

2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah:

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 1. Tujuan Renstra PD Prov/Kab/Kota Tahun 2025-2029
- 2. Sasaran Renstra PD Prov/Kab/Kota Tahun 2025-2029
- 3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029
- 4. Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1. Uraian Program

2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
- 6.** Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 24 tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019, yang mempunyai tugas:

- 1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
- 3) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan nasional dan internasional;
- 6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan

- 8) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

- 1) Koordinasi

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

- 2) Komando

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

- 3) Pelaksana

Pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimensi terbaru berkaitan dengan urusan bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal BPBD memiliki pelayanan yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah daerah Bidang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan dan pejabat lainnya yang mana Rincian Tugas Pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Unsur Pelaksana, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan konsep koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- b) Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c) Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- d) Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris, mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan,

pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD;
- b) Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- d) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- e) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi :

- (1) Subbagian Program
- (2) Subbagian Keuangan
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d) Pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e) Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana;
- f) Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- g) Pelaksanaan jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 - (1) Seksi Pencegahan
 - (2) Seksi Kesiapsiagaan

4) Bidang Penanganan Darurat, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penanganan darurat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- b) Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- c) Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- d) Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e) Memobilisasi satuan tugas reaksi cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana;
- f) Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi :
 - (1) Seksi Tanggap Darurat
 - (2) Seksi Penanganan

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c) Pemberian komando pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi :
 - (1) Seksi rehabilitasi
 - (2) Seksi Rekonstruksi

6) UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan pasca terjadinya bencana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPTB trauma center dan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada kebijakan program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Penyusunan dan pengusulan anggaran untuk

pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana UPTB Pelayanan Trauma center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- c) Pengusulan penempatan personil UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d) Pengesahan prosedur pelayanan UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- e) Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- f) Pelaksanaan bimbingan teknis Trauma Center Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu layanan trauma center dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- g) Pemberian laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala;
- h) Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif baik kepada pelanggan maupun kepada semua unsur UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengkoordinir, memeriksa dan menyampaikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Trauma center dan Pelayanan Kesehatan.

- Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

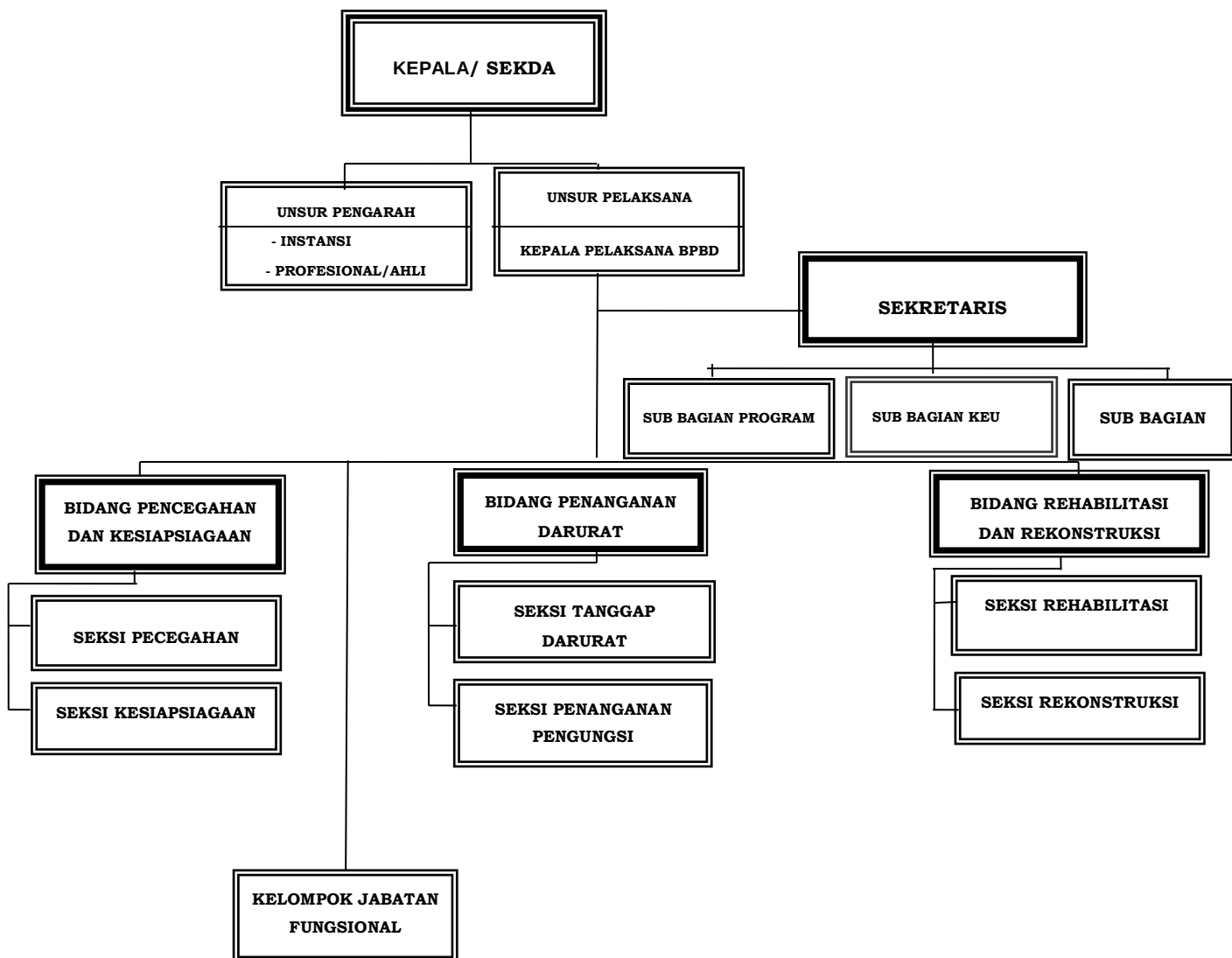
- a) Menyiapkan dokumen prosedur pelaksanaan trauma center yang berkaitan dengan persyaratan

manajemen UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;

- b) Pengkajian ulang instruksi kerja yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan manajemen pada UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
 - c) Pertanggungjawaban terhadap pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pada Trauma center dan Pelayanan Kesehatan serta dokumen terkait;
 - d) Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas personalia, keuangan, dokumentasi dan informasi;
 - e) Pertanggungjawaban terhadap surat-menyurat yang dilakukan oleh Kepala UPTB;
 - f) Pemberian delegasi kepada subordinatnya apabila berhalangan ;
 - g) Pelaporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan;
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
- 1) Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
 - 2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Pelaksana Badan atas usul Kepala UPTB dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Badan;
 - 3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPBD Prov. Sumatera Selatan



Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

b. Sumber Daya BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Sumber daya merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh organisasi, dalam mengelola sumber daya yang baik akan meningkatkan kesejahteraan, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya yang tidak baik akan berdampak

buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya adalah bagaimana mengelola sumber daya tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, memiliki sumberdaya manusia sebanyak 57 orang ASN, 91 TKS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS		
	Laki – Laki	22	38,60
	Perempuan	35	61,40
	TOTAL	57	100%
2	NON PNS		
	Laki – Laki	60	65,93
	Perempuan	31	34,07
	TOTAL	91	100%

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin untuk pegawai PNS yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 22 orang (38,60%) dan jenis kelamin perempuan berjumlah 35 orang (61,40%), sedangkan untuk pegawai NON PNS jenis kelamin laki-laki berjumlah 60 orang (65,93%) dan jenis kelamin perempuan 31 orang (34,07%).

Tabel 2.2
Data Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	II/d	1	1,75
2	III/a	2	3,51

3	III/b	3	5,26
4	III/c	13	22,81
5	III/d	21	36,84
6	IV/a	10	17,54
7	IV/b	4	7,02
8	IV/c	3	5,26
	TOTAL	57	100%

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan golongan II sampai golongan IV. Golongan II/d berjumlah 1 orang (1,75%), golongan III/a berjumlah 2 orang (3,51%), golongan III/b berjumlah 3 orang (5,26%), golongan III/c berjumlah 13 orang (22,81%), golongan III/d berjumlah 21 orang (36,84%), golongan IV/a berjumlah 10 orang (17,54%), golongan IV/b berjumlah 4 orang (7,02%) dan golongan IV/c berjumlah 3 orang (5,26%).

Tabel 2.3

Data Pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS		
	STM Listrik	1	1,75
	SMA	1	1,75
	D-III	7	12,28
	D-IV	1	1,75
	S-1	32	56,14
	S-2	15	26,32
	TOTAL	57	100%
2	NON PNS		
	SLTA	30	32,97
	D-I	1	1,10
	D-III	7	7,69
	S-1	53	58,24
	TOTAL	91	100%

Tabel di atas, menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan baik itu PNS dan Non PNS berdasarkan tingkat Pendidikan. Untuk pegawai PNS Tingkat Pendidikan STM Listrik sebanyak 1 orang (1,75%), Tingkat Pendidikan SMA sebanyak 1 orang (1,75%), D-III sebanyak 7 orang (12,28%), D-IV sebanyak 1 orang (1,75%), S-1 sebanyak 32 orang (56,14%), dan S-2 sebanyak 15 orang (26,32%). Untuk pegawai NON PNS Tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 30 orang (32,97%), D-I sebanyak 1 orang (1,10%), D-III sebanyak 7 orang (7,69%), dan S-1 sebanyak 53 orang (58,24%).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan selain memiliki SDM juga memiliki sumber daya berupa logistik dan peralatan bencana dilengkapi gudang logistik dan gudang peralatan serta untuk mendukung pelayanan kebencanaan sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan yang berada didekat Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menjadikan keuntungan tersendiri dalam pengorganisasian Penanggulangan Bencana.

Persediaan logistik yang tersimpan di gudang logistik BPBD Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Dukungan Logistik BPBD Provinsi Sumsel

No	Jenis/ Nama Barang	Stok			Total	Satuan	Ket
		2016	2017	2018			
1	Peralatan Dapur Keluarga	-	9	-	9	Paket	
2	Sandang	-	22	220	242	Paket	
3	Famili kits	-	0	99	99	Paket	

4	Selimut	-	0	-	0	Lembar	
6	Kompor Serba Guna Bio Massa	26	-	-	26	Paket	
7	Kelambu	0	-	-	0	Lembar	
8	Kantong Mayat	50	0	-	50	Lembar	
9	Paket Kesehatan Keluarga	-	20	-	20	Paket	
10	Kids Ware	-		30	30	Paket	
11	Paket Seragam Laki-Laki	35	-	-	35	Paket	
12	Paket Seragam Perempuan	35	-	-	35	Paket	
13	Karung Plastik	-	3150	-	3150	Lembar	
14	Tenda Gulung	0	16	-	16	Lembar	
16	Masker	-	0	22000	22000	Lembar	
17	Perlengkapan Sekolah	-	440	-	440	Paket	
18	Perlengkapan Makan	-	186	28	214	Paket	
19	Paket Rekreasi	-	198	15	213	Paket	
20	Lauk Pauk	-	-	165	165	Paket	
21	Makanan Tambahan Gizi	-	-	42	42	Paket	
22	Makanan Siap Saji	-	-	48	48	Paket	
23	Matras	-	-	770	770	Lembar	

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Selain SDM BPBD memiliki sumberdaya Peralatan dan logistik untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Dukungan Peralatan BPBD Prov. Sumsel

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Perahu Karet	20	Unit	2024	1 = Banyuasin, 1 = Musi Rawas, 1 = Muratara, 1 = OI, 1 = OKI, 1 = OKU, 1 = OKUT, 1 = OKUS, 1 = Lahat, 1 = Muara Enim, 1 = PALI, 1 = Empat Lawang, 1 = Prabumulih, 1 = DPK-PB Lubuk Linggau, 1 = Pagaralam,

2	Perahu Polythelin/Fiber	16	Unit	2024	1 = Banyuasin, 1 = Muba, 1 = Musi Rawas, 1 = Muratara, 1 = OI, 1 = OKI, 1 = OKU, 1 = OKUT, 1 = OKUS, 1 = MUARA ENIM, 1 = PALI, 1 = Empat Lawang, 1 = Prabumulih
3	Pelampung Uk. M	64	Unit	2024	4 = Banyuasin, 4 = Muba, 4 = Musi Rawas, 4 = Muratara, 4 = OI, 4 = OKI, 4 = OKU, 4 = OKUT, 4 = OKUS, 4 = MUARA ENIM, 4 = PALI, 4 = Empat Lawang, 4 = Prabumulih
4	Pelampung Uk. L	64	Unit	2024	4 = Banyuasin, 4 = Muba, 4 = Musi Rawas, 4 = Muratara, 4 = OI, 4 = OKI, 4 = OKU, 4 = OKUT, 4 = OKUS, 4 = MUARA ENIM, 4 = PALI, 4 = Empat Lawang, 4 = Prabumulih
5	Dayung Telescopic	32	Unit	2024	2 = Banyuasin, 2 = Muba, 2 = Musi Rawas, 2 = Muratara, 2 = OI, 2 = OKI, 2 = OKU, 2 = OKUT, 2 = OKUS, 2 = MUARA ENIM, 2 = PALI, 2 = Empat Lawang, 2 = Prabumulih
6	Perahu Karet Kecil	3	Unit	2023	1 = BPBD Kab. Muratara, 1 = BPBD Kab. OKU, 1 = BPBD Kab. OKUS
7	Tenda Pengungsi / Posko	4	Unit	2023	4 = Kantor BPBD Prov. Sumsel (u/ Posko Karhutla)
8	Fleksibel Tank	12	Unit	2023	2 = BPBD Kab. OKU Selatan
9	Perlengkapan dan Peralatan Posko	1	Paket	2023	Kantor BPBD Prov. Sumsel
10	Kabel Isi Kawat Panjang @100 meter	4	Roll	2023	
11	Kompas Merk Rinnai 2 Tungku	4	Buah	2023	
12	Panci Stainless	16	Buah	2023	
13	Lampu 20-25 Watt LED Merk Philips	32	Buah	2023	
14	Terminal Listrik Lubang 5	20	Buah	2023	
15	Colokan Listrik	20	Buah	2023	
16	Senter Kepala Merk Luby	60	Buah	2023	2 = BPBD Kota Prabumulih
17	Penutup Leher	180	Buah	2023	95 = Satgas Pemadam Karhutla
18	Kasur Lipat / Matras	150	Pcs	2023	3 = Humas Protokol, 70 = Satgas Posko Karhutla
19	Jet Shooter / Pompa Pungung	90	Unit	2023	5 = BPBD Kab. OKU Selatan
20	Handy Talky Merk Yaesu VX - 6R	60	Unit	2023	Petugas pada saat di perlukan

21	Drone	1	Unit	2023	Dokumentasi Kegiatan BPBD Prov. Sumsel
22	Mesin Chainsaw	8	Unit	2023	8 = Kantor BPBD Prov. Sumsel
23	Paramotor	2	Unit	2023	2 = Kantor BPBD Prov. Sumsel (digunakan saat ada kegiatan)
24	Velbed	50	Unit	2023	3 = Humas Protokol, 47 = Kantor BPBD
25	Velbed	77	Unit	2022	Pinjam Pakai berbagai kegiatan instansi" & posko karhutla tahun 2023
26	Tenda Pengungsi / Posko	2	Unit	2022	2 = Kantor BPBD Prov. Sumsel (u/ Posko Karhutla)
27	Terpal A3 6 X 8	310	Unit	2022	2 = Korban Kebakaran Gasing Banyuasin, 7 = Kebakaran desa maur lama, 2 = korban kebakaran taja mulia, 10 = korban angin puting beliung sematang borang, 15 = korban angin puting beliung muara sugihan, 8 = korban kebakaran rumah desa ibul, 3 = angin kencang di barak sukarami, 3 = masjid lorok amal, 13 = korban kebakaran 3 ulu, 21 = korban angin puting beliung tanjung agung timur, 8 = korban kebakaran 27 ilir, 3 = korban angin kencang talang jambe, 17 = korban kebakaran rumah, 3 = korban kebakaran jl. karya baru, 2 = korban kebakaran desa tanjung lubuk, 1 = kegiatan pegawai bpbd, 10 = korban bencana kebakaran desa pampangan oki, 12 = korban kebakaran desa tanjung raya, 20 = korban kebakaran rumah kec. pemulutan, 4 = yayasan braja ybgbi, 20 = korban angin puting beliung martapura, 11 = korban angin puting beliung desa mulia sari kecamatan tanjung lago, 10 = korban banjir desa maur baru, 15 = Posko Karhutla, 20 = BPBD muratara, 40 = BPBD Banyuasin, 30 = BPBD Kab. Lahat
28	Pompa Induk 23 HP	11	Set	2023	
29	Pompa Sedang 6 HP	22	Set	2023	1 = BPBD Kab. Mura
30	Pompa Jinjing 2 HP	44	Set	2023	1 = BPBD Kab. OKU Selatan, 8 = Posko Lapangan

31	Y Connector Breeching Dividing 1,5" x 1,5" x 1,5"	66	Unit	2023	2 = DPK-PB Kota Lubuk Linggau, 2 = Posko Karhutla
32	Y Connector Breeching Dividing 2,5" x 1,5" x 1,5"	22	Unit	2023	
33	Nozzle 1,5" Pistol Grip	88	Unit	2023	8 = Posko Karhutla
34	APD	220	Set	2023	84 = Satgas BPBD Prov. Sumsel posko 2023, 5 = Satgas BPBD Prov. Sumsel posko karhutla 2024
35	SELANG OSW SYNTEX 1,5" X 30 M	132	Roll	2023	6 = Posko Palembang, 7 = Posko Obor, 7 = Posko Desa Deling (Posko Karhutla 2023), 8 = Posko Oki, 8 = Posko Obor, 8 = Posko Palembang, 8 = Posko Kantor, 2 = pak pantok, 45 = Polda Sumsel, 33 = Posko Karhutla 2024
36	SELANG OSW SYNTEX 2,5" X 30 M	99	Roll	2023	2 = Posko Kantor, 2 = Posko Obor, 2 = Posko Palembang, 2 = Posko Oki, 32 = Polda sumsel, 8 = Posko Karhutla 2024
37	Pelampung 2020	30	Pcs	2022	5 = BPBD Kab. OKUT
38	Pelampung 2019	9	Pcs	2022	
39	Fire Hose 1,5 x 20 m	10	Roll	2022	
40	Pompa Karhutla 2HP	3	Set	2022	
41	Pompa Karhutla 6HP	1	Set	2022	
42	Nozzle Piercing 1.5 Inch	5	Unit	2022	

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan kinerjanya didukung oleh kendaraan operasional dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Dukungan Kendaraan Operasional BPBD
Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Kendaraan	No Polisi	No Mesin	No. Rangka	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	BG 1358 MZ	G15A 1D 205418	MHY GDN42AJ337886	Pembelian /BPKB
2	Pick Up	BG 8843 MZ	WLAT1198461	MNBBSBW40AW881833	Pembelian /BPKB

3	Sepeda Motor	BG 4919 PZ		MH8CF48MAAJ-1949	Pembelian /BPKB
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst)	BG 1975 MZ	DCR8852	MHKW3CA3JCK005754	Pembelian /BPKB
5	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst)	BG 8834 MZ	APHG1205911113	MMM148MGOCH610699	Pembelian /BPKB
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	BG 7061 NZ	J2700373	KNCSHX71LF7901017	Pembelian /BPKB
7	Pick Up	B 9285 TTA	4D56C-P50515	MHMLOPU39GK198605	Hibah/BPKB
8	Monilog (Mobil Logistik/ Personil)	B 1103 PQQ	E317218	MHCTBR54FCK317218	Hibah/BPKB
9	Sepeda Motor	BG 4776 AAZ	LX150CEPM2436	MH4LX150CFJP28394	Hibah/BPKB
10	Sepeda Motor	BG 4779 AAZ	LX150CEPM5949	MH4LX150CFJP28391	Hibah/BPKB
11	Sepeda Motor	BG 4657 AAZ	LX150CEP28676	MH4LCAKP19616	Hibah/BPKB
12	Sepeda Motor	BG 4678 AAZ	LX150CEP28871	MH4LX150AKP19612	Hibah/BPKB
13	Mobil Tinja	B 9720 PQU	B040073	MHCNK71LYCJ040073	Hibah/BPKB
14	Mobil Tangki Air	B 9200 PMA	B049773	MHCNKR71HDJ049773	Hibah/BPKB
15	Mobil Tangki Air	B 9085 TMA	B075795	MHCNNR71HGJ075795	Hibah/BPKB
16	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)	B 9074 PQU	B018996	MHCNK71LYAJ018996	Hibah/BPKB
17	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)	B 9054 PQU	4B34TF80898	MHMFE74P5AK035901	Hibah/BPKB
18	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)	BG 8965 MZ	4B56UCCC2367	MMBJMKB40AD049043	Hibah/BPKB
19	Sepeda Motor	BG 2989 AAZ	LX150CEWA3793	MH4LX150GJJT65623	Pembelian /BPKB
20	Sepeda Motor	BG 2985 AAZ	LX150CEWA3768	MH4LX150GJJT65816	Pembelian /BPKB
21	Sepeda Motor	BG 2990 AAZ	LX150CEWA2860	MH4LX150GJJP65426	Pembelian /BPKB
22	Sepeda Motor	BG 2984 AAZ	LX150CEWA3798	MH4LX150GJJP65729	Pembelian /BPKB
23	Sepeda Motor	BG 2991 AAZ	LX150CEWA3794	MH4LX150GJJP637	Pembelian /BPKB
24	Sepeda Motor	BG 2983 AAZ	LX150CEWA3570	MH4LX150GJJP65726	Pembelian /BPKB
25	Sepeda Motor	BG 2987 AAZ	LX150CEWA3775	MH4LX150GJJP65814	Pembelian /BPKB

26	Sepeda Motor	BG 2986 AAZ	LX150CEWA3773	MH4LX150GJJP65815	Pembelian /BPKB
27	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst)	BG 1086 IZ	2TR-A670013	MHFGX8GS5K0506270	Pembelian /BPKB
28	Mobil Komunikasi	B 9588 PQU	4M40UAD1766	MMBJNKB70CD061566	Hibah/BPKB
29	Sepeda Motor	BG 4759 AAZ	LX150CEPB8928	MH4LX150CDKP77990	Hibah/BPKB
30	Sepeda Motor	BG 4658 AAZ	LX150CEPB9167	MH4LX150CDDKP77977	Hibah/BPKB
31	Mobil Ambulance	BG 9019 NZ	M040424	MHCNK55EYBJ040424	Hibah/BPKB
32	Mobil Tangki Air	BG 8682 MZ	B106502	MHCNMR71HKJ106502	Pembelian /BPKB
33	Mobil Tangki Bahan Bakar	B 9226 TMA		MJEC1J643K5185219	Hibah/BPKB
34	Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)	BG 8093 RZ	SK4505	MPATFS86JJT005837	Hibah/BPKB
35	Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)	BG 8108 RZ	4D56UCDA3260	MMBJMKB40CD014504	Hibah/BPKB
36	Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)	B 9331 PQU	B027553	MHCNK71LYBJ027553	Hibah/BPKB
37	Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)	BG 8765 MZ	2GD-0914116	MR0KB8CD2L1125081	Pembelian /BPKB
38	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	BG 1363 IZ	1TRA938736	MHFJW8EMOM2396247	Pembelian /BPKB
39	Sepeda Motor	B 5010 TWG	MK 5111112000908	MK5111110NJ000726	Hibah/BPKB
40	Mobil Pajero Sport	BG 1931 IZ / 42	4N15UKG8738	MK2KRWFNUPJ000746	Pembelian /BPKB
41	Toyota Hilux Double Cabin	BG 8187 RZ	2GD D327021	MK0KB8CD0P1148624	Pembelian /BPKB
42	Mobil Panther	BG 1683 MZ	E308821	MHCTBR54FBK308824	Pinjam Pakai /BPKB
43	Mobil Ambulance	BG 9085 MZ	M040424	MHCNK71LYBJ027553	Pinjam Pakai /BPKB
44	Mobil Panther	BG 1905 MZ	E11727	MHCTBR54FBK311727	Pinjam Pakai /BPKB
45	Motor Suzuki Shoqun	BG 6820 NZ	F403ID803429	MH8FD125X7J-802953	Pinjam Pakai /BPKB

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

c. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal bagian keenam pasal 9

menjelaskan sub urusan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan bencana juga masuk dalam rumpun ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Maka menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, konsekuensinya urusan bencana mengandung layanan dasar, memerlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan menjadi prioritas dalam penganggaran dan pembangunan daerah.

Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) kemudian aturan teknisnya di keluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tentang Sub-Urusan Bencana, di dalam peraturan tersebut ada tiga standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh BPBD yaitu:

1. Pelayanan Informasi rawan bencana

Kegiatan Pelayanan Informasi rawan bencana adalah:

- (a) Penyusunan kajian risiko bencana;
- (b) Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana adalah:

- (a) Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- (b) Pembuatan rencana kontinjensi;
- (c) Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- (d) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- (e) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- (f) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah:

- (a) Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- (b) Respon cepat darurat bencana;
- (c) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- (d) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- (e) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah:

- (a) Inventarisasi kerugian dan kerusakan pasca bencana
- (b) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- (c) Rapat Koordinasi
- (d) Diklat Perhitungan Kerugian dan Kerusakan pasca bencana

5. Pelayanan Kesehatan dan pemulihan trauma pasca bencana untuk korban bencana

Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan pemulihan trauma pasca bencana untuk korban bencana adalah:

- (a) Pelayanan Kesehatan dan trauma
- (b) Peningkatan sumber daya pelayanan kesehatan

Kinerja pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan telah mengacu pada SPM diatas ini dapat dilihat dari program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SPM sub-urusan bencana di atas.

Tujuan nasional 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada strategi: (1) Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana, dengan arah kebijakan: (1) Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana secara komprehensif.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Dokumen RPJMD 2019-2023 dan RPD 2025-2026, menetapkan sasaran (indikator) pada tujuan 13 adalah: (1) Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB), (2) Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara Tahunan, (3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Program Tujuan 13. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 13 TPB, program yang terkait dengan penguatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mencakup Program Penanggulangan Bencana terdiri dari empat kegiatan yaitu (1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi; (2) Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Bencana; (3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Evakuasi Korban Bencana; (3) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Tabel 2.1 (T-C.23 PMDN 86/2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indikator Kinerja Kunci																		
	1. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Penanganan pra bencana	-	-	17 Kab/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	-	17 Kab/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase penanganan Pasca bencana	-	-	17 Kab/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indikator Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD	-	-																
	INDEKS RESIKO BENCANA	-	-	Menurunkannya Indeks Risiko Bencana	137.11	137.31	132.99	131.24	131.05	137.11	137.31	132.99	131.24	131.05	100%	100%	100%	100%	100%

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan analisis tugas dan fungsi, keadaan sumberdaya dan kinerja BPBD Provinsi Sumatera Selatan serta permasalahan yang ada maka kami akan menentukan strategi kedepan dengan cara analisis lingkungan internal organisasi dalam hal ini yaitu BPBD Provinsi Sumatera Selatan yaitu kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal organisasi berupa peluang dan ancaman

1. Analisis SWOT

a. Analisis Lingkungan Internal BPBD Provinsi Sumatera Selatan

1) Kekuatan (*Strength*)

- a) Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan pelaksanaan UU 24 Tahun 2007 memberikan dimensi baru dalam penanggulangan bencana
- b) BPBD memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana
- c) Sistem koordinasi antar lembaga yang cukup baik
- d) SEKDA selaku Kepala BPBD Prov. Sumsel memudahkan dalam komando
- e) Dukungan Sarana prasarana di bidang Kebencanaan yang memadai
- f) BPBD memiliki PUSDALOPS dan UPTB Trauma center dan pelayanan kesehatan

2) Kelemahan (*weakneses*)

- a) Penanganan bencana masih terfokus pada tanggap darurat

- b) Tingginya resiko bencana sebagian Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
- c) Dukungan sumber daya manusia kebencanaan masih rendah
- d) Alokasi anggaran dibidang bencana belum memadai
- e) Belum adanya Peta Rawan Bencana secara menyeluruh
- f) Belum adanya sop yang baku dalam pelayanan di bidang kebencanaan

b. Analisis Lingkungan Eksternal BPBD Provinsi Sumatera Selatan

3) Peluang (*Oppotunities*)

- a) Adanya PERMENDAGRI No 101 bencana menjadi urusan wajib dan ada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana
- b) Ada komitmen global, nasional dan lokal tentang pengurangan resiko bencana
- c) Adanya dukungan anggaran melalui CSR Perusahaan untuk penanggulangan bencan
- d) Adanya dukungan TNI, POLRI dan LSM yang ikut serta dalam penanggulangan bencan
- e) Adanya komitmen Pemerintah Pusat dalam Meningkatkan sistem peringatan dini bencana
- f) Adanya kearifan lokal dalam penanggulangan bencana

4) Ancaman (*Threats*)

- a) Alih fungsi lahan yang radikal di kawasan lindung
- b) Tata ruang pemukiman yang tidak terintegrasikan dengan potensi bencana secara geografis

- c) Rendahnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
- d) Resiko bencana menyebabkan, kerusakan lingkungan, kerugian, luka-luka, penyakit, kematian dan rusaknya hubungan luar negeri.
- e) Letak Geografis yang cukup sulit dalam melakukan upaya tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca-bencana
- f) Ada Kabupaten / Kota yang belum membentuk BPBD dan nomenklatur belum sesuai UU peraturan berlaku

2. Formulasi Starategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil analisis faktor *Strengths, Weakneses, Opportunities, and Threats* (SWOT) dengan menggunakan Tabel IFAS (*Internal Factor Analisi Summary*) dan EFAS (*External Factor Analisis Summary*) yang dikembangkan oleh *Wheelen and Hunger* sebagaimana disajikan pada Tabel IFAS sebagai berikut:

Tabel 2.8
IFAS
(Internal Factor Analisis Summary)

No	Strength (Kekuatan)	Bobot	Rating	Score	Ket
1	Perda NO 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan pelaksanaan UU 24 Tahun 2007 memberikan dimensi baru dalam penanggulangan bencana	0,11	4	0,44	
2	BPBD memiliki fungsi	0,09	4	0,36	

	koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana				
3	Sistem koordinasi antar lembaga yang cukup baik	0,09	4	0,36	
4	SEKDA selaku Kepala BPBD Prov. Sumsel memudahkan dalam komando	0,07	3	0,21	
5	Dukungan Sarpras di bidang Kebencanaan yang memadai	0,07	2	0,14	
6	BPBD memiliki PUSDALOPS dan UPTB Trauma center dan pelayanan Kesehatan	0,07	2	0,14	
	Jumlah	0,5		1,65	
	<i>Weaknesess (Kelemahan)</i>				
1	Penanganan bencana masih terfokus pada tanggap darurat	0,1	1	0,1	
2	Tingginya resiko bencana sebagian Kab/kota di Prov. SUMSEL	0,1	1	0,1	
3	Dukungan sumber daya manusia kebencanaan masih rendah	0,08	2	0,16	
4	Alokasi anggaran dibidang bencana belum memadai	0,08	2	0,16	
5	Belum adanya Peta Rawan Bencana secara menyeluruh	0,07	3	0,21	
6	Belum adanya sop yang baku dalam pelayanan di bidang kebencanaan	0,07	3	0,21	
	Jumlah	1		0,94	
	Total			0,71	

Tabel 2.9
EFAS
(External Factor Analisis Summary)

No	Opportunities (Peluang)	Bobot	Rating	Score	Keterangan
1	Adanya PERMENDAGRI No 101 bencana menjadi	0,11	4	0,44	

	urusan wajib dan ada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana				
2	Ada komitmen global, nasional dan lokal tentang pengurangan resiko bencana	0,1	3	0,3	
3	Adanya dukungan anggaran melalui CSR Perusahaan untuk penanggulangan bencana	0,1	3	0,3	
4	Adanya dukungan TNI, POLRI dan LSM yang ikut serta dalam penanggulangan bencana	0,06	1	0,06	
5	Adanya komitmen Pemerintah Pusat dalam Meningkatkan sistem peringatan dini bencana	0,07	1	0,07	
6	Adanya kearifan lokal dalam penanggulangan bencana	0,06	1	0,06	
	Jumlah	0,5		1,23	
	<i>Threats (Ancaman)</i>				
1	Alih fungsi lahan yang radikal di kawasan lindung	0,1	3	0,3	
2	Tata ruang pemukiman yang tidak terintegrasi dengan potensi bencana secara geografis	0,1	1	0,1	
3	Rendahnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	0,08	4	0,32	
4	Resiko bencana menyebabkan, kerusakan lingkungan, kerugian, luka-luka, penyakit, kematian dan rusaknya hubungan luar negeri.	0,1	1	0,1	

5	Letak Geografis yang cukup sulit dalam melakukan upaya tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca-bencana	0,06	4	0,24	
6	Ada Kabupaten / Kota yang belum membentuk BPBD dan nomenklatur belum sesuai UU peraturan berlaku	0,06	4	0,24	
	Jumlah	1		1,3	
	Total			-0,07	

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

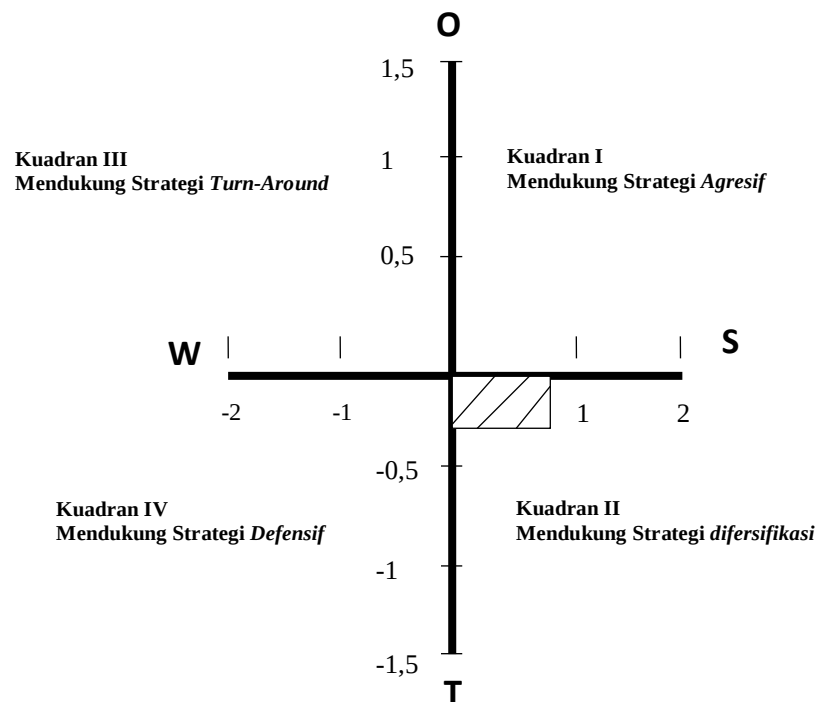
3. Matrik Kuadran SWOT

Selanjutnya mencari posisi organisasi (BPBD PROV. SUMSEL) yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT dimana Sumbu horisontal (x) menunjukkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan sumbu vertikal (y) menunjukkan peluang dan ancaman. Dibawah ini hasil perhitungannya sebagai berikut:

Selisih total S-W= X dan selisih total O-T = Y

$1,95 - 0,94 = 0,71$ dan $1,23 - 1,3 = -0,07$

Gambar 2.3
Matrik Kuadran SWOT



Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil perhitungan didapat posisi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan berada pada kuadran II (positif, negative). Mobilisasi Strategi adalah rekomendasi dari formulasi kuadran SWOT, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya yang sudah digunakan. Oleh karenanya, BPBD Prov. Sumsel disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

4. Matriks SWOT

Tabel 2.10
MATRIKS SWOT

Lingkungan Internal	<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weaknesess</i> (Kelemahan)
	Perda No 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan pelaksanaan UU 24 Tahun 2007 memberikan dimensi baru dalam penanggulangan bencana	Penanganan bencana masih terfokus pada tanggap darurat
	BPBD memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana	Tingginya resiko bencana sebagian Kab/kota di Prov. SUMSEL
	Sistem koordinasi antar lembaga yang cukup baik	Dukungan sumber daya manusia kebencanaan masih rendah
	SEKDA selaku Kepala BPBD Prov. Sumsel memudahkan dalam komando	Alokasi anggaran dibidang bencana belum memadai
	Dukungan Sarpras di bidang Kebencanaan yang memadai	Belum adanya Peta Rawan Bencana secara menyeluruh
	BPBD memiliki PUSDALOPS serta UPTB Trauma center dan pelayanan kesehatan	Belum adanya sop yang baku dalam pelayanan di bidang kebencanaan di BPBD Prov. Sumsel
Lingkungan Eksternal	<i>Opportunities</i> (Peluang)	Strategi S+O
	Adanya PERMENDAGRI No 101 bencana menjadi urusan wajib dan ada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana	Merumuskan setandar pelayanan minimal sub-urusanbencana dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Prov. Sumsel
	Ada komitmen global, nasional dan lokal tentang pengurangan resiko bencana	Melakukan sinkronasi tentang kebijakan pengurangan resiko bencana di BPBD Prov. Sumsel kedalam program rencana pembangunan.
	Adanya dukungan anggaran melalui CSR Perusahaan untuk penanggulangan bencana	Memanfaatkan dukungan anggaran dengan meningkatkan upaya penanggulangan bencana melalui pemberdayaan dan program pembinaan usaha-usaha ekonomi alternatif yang ramah lingkungan yang melibatkan semua lembaga
		Startegi W+O
		Menyusun strategi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang mengakomodir 3 standar pelayanan minimal sub-urusan bencana
		Pengarus utamaan pengurangan resiko bencana kedalam rencana pembangunan RPJMD Provinsi Kabupaten/kota di Prov. Sumsel
		Melakukan DIKLAT dengan memanfaatkan pendanaan dari CSR perusahaan bencana

Adanya dukungan TNI, POLRI dan LSM yang ikut serta dalam penanggulangan bencana	Menjadikan TNI-POLRI sebagai mitra dalam penanggulangan bencana terutama yang bersifat komando	Melakukan peatihan bersama dengan dengan TNI-POLRI terkait SDM penanggulangan bencana
Adanya komitmen Pemerintah Pusat dalam Meningkatkan sistem peringatan dini bencana	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dalam peringatan dini dengan didukung SARPRAS yang ada di daerah	Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyusunan peta rawan bencana guna mendukung sistem peringatan dini bencana
Adanya kearifan lokal dalam penanggulangan bencan	Menjalin dan membina kerja sama antar masyarakat dalam penaggulangan bencana dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya menghadapi bencana melalui seni dan budaya masyarakat lokal	Menyusun SOP kebencanaan dengan melibatkan atau memasukkan unsur kearifan lokal dalam penanganan bencana
<i>Threats (Ancaman)</i>	<i>Strategi S+T</i>	<i>Strategi W+T</i>
Alih fungsi lahan yang radikal di kawasan lindung	Sinkronisasi tatakelola kawasan lindung dengan UU dan peraturan kebencanaan sehingga alifungsi lahan tidak menyebabkan bencana	Meningkatkan upaya pencegahan dengan program berbasis sosial ekonomi di daerah kawasan lindung yang telah rusak untuk melakukan restorasi
Tata ruang pemukiman yang tidak terintegrasikan dengan potensi bencana secara geografis	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait merumuskan kebijakan dalam penataan ruang agar tidak menyebabkan bencana	Membuat kebijakan penataan ruang yang besbasis penurunan resiko bencana
Rendahnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Melakukan pemberdayaan masyarakat didaerah rawan bencana melalui kepala daerah dan BPBD kab/kota	Mengadakan program/kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana
Resiko bencana menyebabkan, kerusakan lingkungan, kerugian, luka-luka, penyakit, kematian dan rusaknya hubungan luar negeri	Mengoptimalkan fungsi SEKDA selaku kepala BPBD dan Ketua tim TAPD untuk mengalokasikan kebijakan dalam menurunkan resiko bencana	Membina sekolah-sekolah, kerjasama dengan pramuka, kelompok pemuda untuk menanamkan pentingnya menjaga lingkungan selagi dini agar paham akan resiko yang ditimbulkan bencana
Letak Geografis yang cukup sulit dalam melakukan upaya tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca-bencana	Memaksimalkan dukungan SARPRAS dan peralatan untuk menjangkau lokasi yang cukup sulit dalam melakukan upaya tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca-bencana	Melakukan pemetaan daerah yang sulit dalam melakukan upaya tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca-bencana
Ada Kabupaten / Kota yang belum membentuk BPBD dan nomenklatur belum sesuai UU peraturan berlaku	Melakukan sosialisasi tentang pentingnya ada kelembagaan penanggulangan bencan di daerah melalui tim PUSDALOP dan UPTB Trauma center dan pelayanan Kesehatan	Membuat SOP yang baku tentang penanggulangan bencana dan menata serta membenahi BPBD nomenklatur belum sesuai UU peraturan berlaku

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

5. Rekomendasi Strategi SWOT (S-O, WO, ST, dan WT)

Dari hasil matriks SWOT diatas ada beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1) Strategi S-O

- a) Merumuskan setandar pelayanan minimal sub-urusanbencana dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Prov. Sumsel.
- b) Melakukan sinkronasi tentang kebijakan pengurangan resiko bencana di BPBD Prov. Sumsel kedalam program rencana pembangunan.
- c) Memanfaatkan dukungan anggaran dengan meningkatkan upaya penanggulangan bencana melalui pemberdayaan dan program pembinaan usaha-usaha ekonomi alternatif yang ramah lingkungan yang melibatkan semua lembaga
- d) Menjadikan TNI-POLRI sebagai mitra dalam penanggulangan bencana terutama yang bersifat komando
- e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dalam peringatan dini dengan didukung SARPRAS yang ada di daerah
- f) Menjalin dan membina kerja sama antar masyarakat dalam penaggulangan bencana dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya menghadapi bencana melalui seni dan budaya masyarakat lokal

2) Strategi W-O

- a) Menyusun strategi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang mengakomodir 3 standar pelayanan minimal sub-urusan bencana
- b) Pengarus utamaan pengurangan resiko bencana kedalam rencana pembangunan RPJMD Provinsi Kabupaten/kota di Prov. Sumsel
- c) Melakukan DIKLAT dengan memanfaatkan pendanaan dari CSR perusahaan bencana
- d) Melakukan peatihan bersama dengan dengan TNI-POLRI terkait SDM penanggulangan bencana

- e) Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyusunan peta rawan bencana guna mendukung sistem peringatan dini bencana
- f) Menyusun SOP kebencanaan dengan melibatkan atau memasukkan unsur kearifan lokal dalam penanganan bencana

3) Strategi S-T

- a) Sinkronisasi tatakelola kawasan lindung dengan UU dan peraturan kebencanaan sehingga alifungsi lahan tidak menyebabkan bencana.
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait merumuskan kebijakan dalam penataan ruang agar tidak menyebabkan bencana
- c) Melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana melalui kepala daerah dan BPBD kab/kota
- d) Mengoptimalkan fungsi SEKDA selaku kepala BPBD dan Ketua tim TAPD untuk mengalokasikan kebijakan dalam menurunkan resiko bencana
- e) Memaksimalkan dukungan SARPRAS dan peralatan untuk menjangkau lokasi yang cukup sulit dalam melakukan upaya tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca-bencana
- f) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya ada kelembagaan penanggulangan bencana di daerah melalui tim PUSDALOP dan UPTB Trauma center dan pelayanan kesehatan

4) Strategi W-T

- a) Meningkatkan upaya pencegahan dengan program berbasis sosial ekonomi di daerah kawasan lindung yang telah rusak untuk melakukan restorasi
- b) Membuat kebijakan penataan ruang yang berbasis penurunan resiko bencana
- c) Mengadakan program/kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana
- d) Membina sekolah-sekolah, kerjasama dengan pramuka, kelompok pemuda untuk menanamkan pentingnya menjaga lingkungan selagi dini agar paham akan resiko yang ditimbulkan bencana

- e) Melakukan pemetaan daerah yang sulit dalam melakukan upaya tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca-bencana
- f) Membuat SOP yang baku tentang penanggulangan bencana dan menata serta membenahi BPBD nomenklatur belum sesuai UU peraturan berlaku.

5. Urutan Asumsi Strategi

Setelah menghasilkan beberapa alternatif strategi dari matrik SWOT diatas untuk lebih memfokuskan dan memantapkan pilihan strategi maka dilakukan urutan asumsi strategi sebagai faktor kunci keberhasilan. Suhendra (2014:55). Faktor kunci keberhasilan ini menjadi jembatan antara misi dan visi organisasi. Dari urutan asumsi strategi ini nantinya di pilih beberapa strategi yang benar-benar mendukung dari pencapaian visi. Adapun urutan asumsi tersebut kami susun di bawah ini:

Tabel 2.11
Matriks Penetapan Urutan Asumsi Dan Pilihan Strategi

Asumsi strategi	Keterkaitan dengan :										Urutan pilihan strategi
	Visi	Misi						Nilai-nilai			
	BPBD Tangguh SUMSEL MAJU	Melindungi masyarakat Sumsel dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah	Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang tanggap, tangkas, tangguh (3T)	Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi dan berdimensi dengan pengurangan resiko bencana	Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Membangun sistem informasi penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Kemitraan	Kearifan lokal	Kebertahanan	
Strategi S+O:											
Merumuskan setandar pelayanan minimal sub-urusanbencana dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Prov. Sumsel	4	4	2	3	4	3	0	3	3	2	28
Melakukan sinkronasi tentang kebijakan pengurangan resiko	4	4	4	3	4	3	0	3	4	2	30

bencana di BPBD Prov. Sumsel kedalam program rencana pembangunan.												
Memanfaatkan dukungan anggaran dengan meningkatkan upaya penanggulangan bencana melalui pemberdayaan dan program pembinaan usaha-usaha ekonomi alternatif yang ramah lingkungan yang melibatkan semua lembaga	2	2	2	1	3	3	0	3	2	2	20	
Menjadikan TNI-POLRI sebagai mitra dalam penanggulangan bencana terutama yang bersifat komando	2	2	1	2	1	3	0	3	2	1	17	
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dalam peringatan dini dengan didukung SARPRAS yang ada di daerah	3	3	3	2	4	3	0	3	2	2	25	
Menjalin dan membina kerja sama antar masyarakat dalam penaggulangan bencana dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya menghadapi bencana melalui seni dan budaya masyarakat lokal	3	2	2	2	2	3	2	3	1	1	21	
Jumlah											129	
Strategi W+O:												
Menyusun strategi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang mengakomodir 3		4	4	2	3	4	3	0	2	1	3	26

standar pelayanan minimal sub-urusan bencana											
Pengarus utamaan pengurangan resiko bencana kedalam rencana pembangunan RPJMD Provinsi Kabupaten/kota di Prov. Sumsel	2	3	3	2	3	3	0	1	1	2	20
Melakukan DIKLAT dengan memanfaatkan pendanaan dari CSR perusahaan bencana	3	3	1	2	3	3	1	2	2	2	22
Melakukan peatihan bersama dengan dengan TNI-POLRI terkait SDM penanggulangan bencana	1	1	1	3	0	3	0	3	0	1	13
Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyusunan peta rawan bencana guna mendukung sistem peringatan dini bencana	3	3	3	3	3	3	0	3	1	2	24
Menyusun SOP kebencanaan dengan melibatkan atau memasukkan unsur kearifan lokal dalam penanganan bencana	2	2	1	2	2	2	1	3	1	1	17
Jumlah											122
Strategi S+T:											
Sinkronisasi tatakelola kawasan lindung dengan UU dan peraturan kebencanaan sehingga alifungsi lahan tidak menyebabkan bencana	3	3	1	1	4	2	0	1	1	2	18
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait merumuskan kebijakan dalam penataan ruang agar tidak menyebabkan bencana	4	4	3	3	4	3	0	3	2	3	29
Melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana melalui kepala daerah dan BPBD kab/kota	3	3	2	3	3	3	0	3	2	2	24
Mengoptimalkan fungsi SEKDA selaku kepala BPBD dan Ketua tim TAPD untuk mengalokasikan kebijakan dalam menurunkan resiko bencana	3	3	3	2	2	4	0	3	2	2	24
Memaksimalkan dukungan SARPRAS dan peralatan untuk menjangkau lokasi yang cukup sulit dalam melakukan upaya tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca-bencana	2	2	2	1	3	4	0	3	1	2	20
Melakukan sosialisasi tentang pentingnya ada kelembagaan penanggulangan bencana di daerah melalui tim PUSDALOP dan UPTB Trauma center dan pelayanan kesehatan	3	3	3	3	3	3	0	3	1	2	24
Jumlah											139
Strategi W+T:											
Meningkatkan upaya pencegahan dengan	4	4	2	3	4	3	0	3	4	2	29

program berbasis sosial ekonomi di daerah kawasan lindung yang telah rusak untuk melakukan restorasi											
Membuat kebijakan penataan ruang yang berbasis penurunan resiko bencana	4	4	2	2	4	2	0	1	1	1	21
Mengadakan program/kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana	3	3	3	2	4	2	0	1	1	1	20
Membina sekolah-sekolah, kerjasama dengan pramuka, kelompok pemuda untuk menanamkan pentingnya menjaga lingkungan selagi dini agar paham akan resiko yang ditimbulkan bencana	4	4	2	2	4	3	0	3	1	2	25
Melakukan pemetaan daerah yang sulit dalam melakukan upaya tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca-bencana	2	2	3	2	3	2	2	3	1	2	22
Membuat SOP yang baku tentang penanggulangan bencana dan menata serta membenahi BPBD nomenklatur belum sesuai UU peraturan berlaku	1	1	2	2	3	2	1	2	1	1	16
Jumlah											133

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Upaya pencapaian Misi pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Dinas/Intansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Selatan maka dipilih faktor kunci keberhasilan dari urutan asumsi strategi yaitu :

- 1) Melakukan sinkronasi tentang kebijakan pengurangan resiko bencana di BPBD Prov. Sumsel kedalam program rencana pembangunan.
- 2) Merumuskan setandar pelayanan minimal sub-urusanbencana dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Prov. Sumsel
- 3) Meningkatkan upaya pencegahan dengan program berbasis sosial ekonomi di daerah kawasan lindung yang telah rusak untuk melakukan restorasi
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyusunan peta rawan bencana guna mendukung sistem peringatan dini bencana
- 5) Mengadakan program/kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana
- 6) Membina sekolah-sekolah, kerjasama dengan pramuka, kelompok pemuda untuk menanamkan pentingnya menjaga lingkungan selagi dini agar paham akan resiko yang ditimbulkan bencana
- 7) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya ada kelembagaan penanggulangan bencan di daerah melalui tim PUSDALOP dan UPTB Trauma center dan pelayanan kesehatan
- 8) Mengoptimalkan fungsi SEKDA selaku kepala BPBD dan Ketua tim TAPD untuk mengalokasikan kebijakan dalam menurunkan resiko bencana
- 9) Melakukan pemberdayaan masyarakat didaerah rawan bencana melalui kepala daerah dan BPBD kab/kota

5. Perencanaan Pelaksanaan Strategi

Tabel 2.12
Perencanaan Pelaksanaan Strategi/ Action Plan

No	Strategi	Pelaksanaan Strategi (Tahun)					Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Melakukan sinkronasi tentang kebijakan pengurangan resiko bencana di BPBD Prov. Sumsel kedalam program rencana pembangunan.	Dalam rapat dan pertemuan atau pembahasan rencana pembangunan. - Memastikan pengurangan resiko bencana menjadi indikator RPJMD Provinsi/kab dan kota. - Pengurangan resiko bencana menjadi IKU di BPBD Provinsi/ kab dan kota. - Melakukan/ Pelatihan	Melaksanakan program dan kegiatan terkait PRB. - Penilaian kapasitas daerah dalam PRB	Melaksanakan program dan kegiatan terkait PRB.	Melaksanakan program dan kegiatan terkait PRB.	Melaksanakan program dan kegiatan terkait PRB.	Setiap tahun selalu meningkat persentase Organisasi, Desa, masyarakat siaga bencana Dan dilanjutkan RPJP/M - Kecamatan siaga bencana - Kab/kota siaga bencana - SUMSEL maju untuk

		Penghitungan indek resiko bencana					semua - Indonesia tanguh bencana ASAP
2	Merumuskan setandar pelayanan minimal sub-urusan bencana dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Prov. Sumsel	Sinkronisasi program kegiatan terkait standar pelayanan sub-urusan bencana dengan kab/kota yaitu pelayanan: 1) Informasi kebencanaan 2) Pencegahan dan kesiapsiagaan 3) Penyelamatan dan evakuasi korban	Melaksanakan prograng program/ kegiatan sub-urusan bencana yaitu pelayanan: 1) Informasi kebencanaan 2) Pencegahan dan kesiapsiagaan 3) Penyelamatan dan evakuasi korban	Melaksanakan prograng program/ kegiatan sub-urusan bencana yaitu pelayanan: 1) Informasi kebencanaan 2) Pencegahan dan kesiapsiagaan 3) Penyelamatan dan evakuasi korban	Melaksanakan prograng program/ kegiatan sub-urusan bencana yaitu pelayanan: 1) Informasi kebencanaan 2) Pencegahan dan kesiapsiagaan 3) Penyelamatan dan evakuasi korban	Melaksanaka n prograng program/ kegiatan sub-urusan bencana yaitu pelayanan: 1) Informasi kebencanaa n 2) Pencegahan dan kesiapsiaga an 3) Penyelamat an dan evakuasi korban	Terpenuhi SPM Sub- Urusan bencana
3	Meningkatkan upaya pencegahan	Membuat program pembinaan usaha-usaha ekonomi	- Program pencegahan dan kesiap siagaan	- Program pencegahan dan kesiap siagaan - Mitigasi	- Program pencegahan dan kesiap siagaan	- Program pencegahan dan kesiap siagaan	Meningkatnya perekonomian masyarakat

	dengan program berbasis sosial ekonomi di daerah kawasan lindung yang telah rusak untuk melakukan restorasi	alternatif yang rama lingkungan. - Program pencegahan dan kesiap siagaan - Mitigasi bencana - Membina lebih banyak desa menjadi desa siap dalam menghadapi bencana - Membina lebih banyak masyarakat siap dalam menghadapi bencana	- Mitigasi bencana - Membina lebih banyak desa menjadi desa siap dalam menghadapi bencana - Membina lebih banyak masyarakat siap dalam menghadapi bencana	bencana - Membina lebih banyak desa menjadi desa siap dalam menghadapi bencana - Membina lebih banyak masyarakat siap dalam menghadapi bencana	- Mitigasi bencana - Membina lebih banyak desa menjadi desa siap dalam menghadapi bencana - Membina lebih banyak masyarakat siap dalam menghadapi bencana	- Mitigasi bencana - Membina lebih banyak desa menjadi desa siap dalam menghadapi bencana - Membina lebih banyak masyarakat siap dalam menghadapi bencana .	dan menurunkan persentase terjadinya bencana
4	Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyusunan peta rawan bencana guna mendukung	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam rakortek, rakornas dan musrenbangnas untuk penyusunan peta rawan bencana	- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam rakortek, rakornas dan musrenbangnas untuk penyusunan	- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam rakortek, rakornas dan musrenbangnas untuk penyusunan peta rawan	- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam rakortek, rakornas dan musrenbangnas untuk penyusunan	- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam rakortek, rakornas dan musrenbang	Peta yang refresentatif sebagai dasar penanggulangan bencana

	sistem peringatan dini bencana		peta rawan bencana	bencana	peta rawan bencana	nas untuk penyusunan peta rawan bencana	
5	Mengadakan program/kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana	Masyarakat tangguh/desa tangguh
6	Membina sekolah-sekolah, kerjasama dengan pramuka, kelompok pemuda untuk menanamkan pentingnya menjaga	MOU dengan DIKNAS tentang program dan kegiatan yang berada disekolah-sekolah untuk pendidikan bencana sedini mungkin	Penyusunan kurikulum kebencanaan	Pelatihan guru dan siswa dan Penerapan kurikulum	Simulasi disekolah-sekolah	Lombah sekolah tangguh/aman bencana	sekolah, rumah sakit aman bencana

	lingkungan selagi dini agar paham akan resiko yang ditimbulkan bencana						
7	Melakukan sosialisasi tentang pentingnya ada kelembagaan penanggulangan bencan di daerah melalui tim PUSDALOP dan UPTB Trauma center dan pelayanan kesehatan	Pemberian pemahaman pentingnya adanya kelembagaan penanggulangan bencan di daerah dalam pembahasan RPJMD KAB/KOTA	Sosialisasi dan pendampingan pembentukan BPBD Kota Prabumulih dan pembenahan nomenklatur	Penguatan kapasitas kelembagaan dengan pendataan dan MONEV langsung ke daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan dengan pendataan dan MONEV langsung ke daerah	Penilaian dan penganugerahan BPBD terbaik dengan beberapa kategori tingkat kab/kota prov.sumsel	Penguatan kelembagaan
8	Mengoptimalkan fungsi SEKDA	Konsultasi program/ kegiatan dan alokasi	Konsultasi program/ kegiatan dan	Konsultasi program/ kegiatan dan	Konsultasi program/ kegiatan dan	Konsultasi program/ kegiatan dan	Peningkatan kinerja

	selaku kepala BPBD dan Ketua tim TAPD untuk mengalokasikan kebijakan dalam menurunkan resiko bencana	anggaran BPBD dalam penanggulangan bencana	alokasi anggaran BPBD dalam penanggulangan bencana	alokasi anggaran BPBD dalam penanggulangan bencana	alokasi anggaran BPBD dalam penanggulangan bencana	alokasi anggaran BPBD dalam penaggulanga n bencana	
9	Melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana melalui kepala daerah dan BPBD kab/kota	Percepatan masyarakat tangguh bencana melalui Program/ kegiatan Simulasi dan gladi lapangan sesuai bencana yang dihadapi kabupaten kota	Percepatan masyarakat tangguh bencana melalui Program/ kegiatan Simulasi dan gladi lapangan sesuai bencana yang dihadapi kabupaten kota	Percepatan masyarakat tangguh bencana melalui Program/ kegiatan Simulasi dan gladi lapangan sesuai bencana yang dihadapi kabupaten kota	Percepatan masyarakat tangguh bencana melalui Program/ kegiatan Simulasi dan gladi lapangan sesuai bencana yang dihadapi kabupaten kota	Percepatan masyarakat tangguh bencana melalui Program/ kegiatan Simulasi dan gladi lapangan sesuai bencana yang dihadapi kabupaten kota	Kabupaten kota tangguh sumsel maju untuk semua

e. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder terkait baik dalam pemerintah maupun diluar pemerintahan. Berikut stakeholder atau mitra BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana:

- a) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Perangkat daerah lainnya

Kepala Daerah Sebagai pemegang kebijakan tertinggi di daerah, kepala daerah memiliki peran penting dalam menetapkan prioritas dan dukungan anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan urusan bencana. Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD berperan penting dalam koordinasi anatar perangkat daerah yang terkait dalam penanggulangan bencana. Dan berikut OPD terkait dalam Penanggulangan Bencana

- 1) BAPPEDA Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengintegrasian program yang terkait pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD).
- 2) BPKAD juga beririsan dalam mengelola anggaran daerah dan memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan SPM.
- 3) Dinas Kesehatan Bermitra dalam pelayanan kesehatan darurat dan penanganan dampak kesehatan akibat bencana.
- 4) Dinas Sosial Berperan dalam penanganan pengungsi, penyaluran bantuan sosial, dan perlindungan kelompok rentan.

- 5) Dnas PUPERKIM Terlibat dalam pemulihan infrastruktur pasca bencana.
 - 6) Dinas Pendidikan Berkontribusi dalam edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah.
 - 7) SATPOL-PP Membantu dalam penegakan peraturan terkait kebencanaan dan ketertiban umum saat bencana.
- b) Instansi Vertikal di Daerah
- 1) TNI-POLRI Berperan penting dalam evakuasi, pengamanan, dan penegakan hukum selama tanggap darurat bencana.
 - 2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas): Mitra utama dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban bencana.
 - 3) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Menyediakan informasi dan peringatan dini terkait potensi bencana hidrometeorologi.
- c) Lembaga Non-Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS):
- 1) Organisasi kemasyarakatan (Ormas): Banyak Ormas yang memiliki fokus pada isu kebencanaan dan memberikan bantuan dalam berbagai bentuk.
 - 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Berperan dalam advokasi, pendampingan masyarakat, dan pelaksanaan program-program pengurangan risiko bencana serta respons pasca bencana.
 - 3) Relawan: Kelompok masyarakat yang secara sukarela membantu dalam penanggulangan bencana.
 - 4) Organisasi keagamaan: Seringkali memiliki jaringan luas dan sumber daya untuk membantu korban bencana.

d) Sektor Swasta dan Dunia Usaha:

- 1) Perusahaan-perusahaan dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bentuk bantuan logistik, pendanaan, atau keahlian teknis.
- 2) Asosiasi pengusaha dapat membantu dalam pemulihan ekonomi pasca bencana.

e) Akademisi dan Pakar:

- 1) Universitas dan lembaga penelitian dapat memberikan kajian risiko bencana, pelatihan, dan pendampingan teknis dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana.
- 2) Para ahli di berbagai bidang (hidrologi, geologi, sosial, dll.) dapat memberikan masukan dan analisis yang dibutuhkan.

f) Media Massa:

- 1) Berperan penting dalam penyebaran informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat terkait potensi bencana, situasi darurat, dan upaya penanggulangan.
- 2) Dapat membantu dalam edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana.

g) Masyarakat dan Komunitas:

- 1) Masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan bencana, adalah mitra utama dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons awal.
- 2) Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat komunitas menjadi wadah partisipasi aktif masyarakat.

h) Bentuk Kemitraan:

Kemitraan BPBD dengan berbagai pihak ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Koordinasi: Pertemuan rutin, forum koordinasi, dan

pembentukan tim bersama.

- 2) Kerja Sama: Penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan program bersama.
- 3) Pelibatan: Mengikutsertakan mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program SPM.
- 4) Pemberdayaan: Meningkatkan kapasitas mitra melalui pelatihan dan pendampingan.
- 5) Dukungan Sumber Daya: Berbagi sumber daya (dana, logistik, tenaga ahli).
- 6) Diseminasi Informasi: Bersama-sama menyebarkan informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

Keterlibatan dan sinergi yang kuat dengan berbagai mitra ini akan sangat menentukan keberhasilan BPBD dalam melaksanakan SPM sub urusan bencana secara efektif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Selatan yang berhak mendapatkan perlindungan dari risiko bencana.

f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk memberikan dukungan signifikan dalam penanggulangan bencana. Melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik berupa logistik, infrastruktur, maupun keahlian teknis, BUMD dapat menjadi mitra strategis BPBD dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana. Misalnya, BUMD yang bergerak di bidang logistik dan transportasi dapat

membantu dalam penyaluran bantuan, sementara BUMD di sektor konstruksi dan infrastruktur dapat berperan dalam pemulihan pascabencana. Sinergi antara BPBD dan BUMD, dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing, akan memperkuat kapasitas daerah dalam merespons secara cepat dan efektif, serta membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Ada beberapa BUMD yang sudah bekerjasama dengan BPBD di Sumatera Selatan yaitu PERTAMINA, PT. PUSRI dan BANK SUMSEL BABEL

2. Permasalahan dan Isu Strategis PD

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa jenis bahaya yang bisa saja berpotensi bencana baik bencana alam maupun non alam, Beberapa potensi bencana dan pernah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Banjir

Bencana banjir berpotensi terjadi karena Sumatera Selatan memiliki DAS yang tersebar di semua wilayah Sumatera Selatan. DAS yang ada saat ini sebagian besar tidak mampu lagi menampung debit air sehingga terjadi luapan air yang menggenangi daerah sepanjang sungai. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan curah hujan akibat perubahan iklim, adanya alih fungsi lahan hutan yang tidak terkontrol dan pemanfaatan DAS sebagai kawasan budidaya. Berkurangnya daerah resapan dan daerah terbuka hijau di kawasan permukiman/perkotaan turut berkontribusi menambah potensi ancaman banjir.



Gambar.3.1.1. Peta DAS Musi (Sumber BPDAS)

Banjir juga dapat disebabkan oleh perubahan iklim, perubahan iklim akan mempengaruhi perubahan genangan tingkat permukaan laut yang selanjutnya menyebabkan bahaya banjir di pesisir Selatan wilayah Sumatera. Dampak primer yang dialami oleh Kabupaten/Kota yang diperkirakan terkena rendaman adalah (1) terjadinya peningkatan frekuensi banjir di wilayah pesisir terutama wilayah yang masi berada pada sistem Sungai Musi; (2) turunnya permukaan air tanah yang disebabkan oleh pemanfaatan air tanah yang tidak memperhitungkan keseimbangan sehingga menyebabkan terjadinya intrusi air laut ke darat dan perubahan vegetasi, pertanian dan kesuburan tanah pesisir; (3) munculnya kenaikan muka laut juga mengakibatkan volume air laut yang mendesak ke dalam sungai semakin besar yang akan mengubah salinitas perairan pesisir; (4) terjadinya kemunduran ke arah darat batas antara perairan tawar dan payau, perubahan lokasi fisik, yaitu batas perairan darat, berkurangnya luas kawasan pantai dan semakin

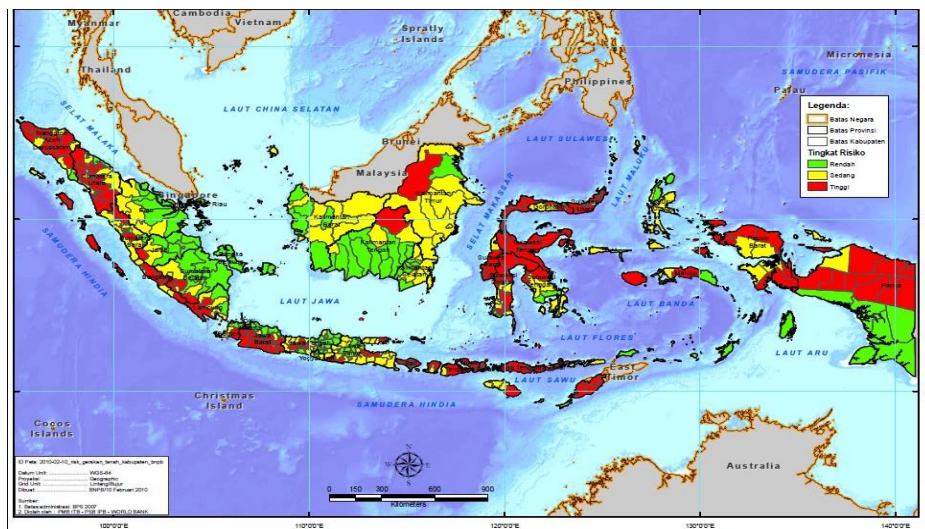
mengecilnya garis pantai sehingga berpengaruh pada luas administratif kota-kabupaten di kawasan pesisir. Kabupaten/Kota yang terkena rendaman di antaranya adalah OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Pola ruang yang terkena bahaya rendaman adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, pertanian lahan basah, hutan suaka alam, perkebunan, permukiman, dan kawasan pelabuhan Tanjung Api-api. Berdasarkan kajian kerentanan, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang terkena risiko genangan pada tingkat risiko sangat tinggi yaitu Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

2. Tanah Longsor

Ada 5 kondisi yang menjadi penentu terjadinya bencana longsor, yaitu kondisi geomorfologi, geologi, tanah atau batuan penyusun lereng, iklim, dan hidrologi lereng. Sumatera Selatan terdiri dari wilayah-wilayah yang sebagian besar merupakan perbukitan atau pegunungan sehingga banyak dijumpai lahan miring ataupun bergelombang. Lereng pada lahan miring ini berpotensi mengalami gerakan massa tanah atau batuan. Wilayah Sumatera Selatan juga memiliki kondisi geologi yang dinamis karena adanya pergerakan Lempeng Samudera Australia yang menunjam di bawah Lempeng Benua Eurasia.

Temperatur dan curah hujan tinggi sangat mendukung terjadinya proses pelapukan batuan menjadi tanah pada lereng, akibatnya lereng akan tersusun oleh lapisan tumpukan tanah tebal yang relatif lebih rentan terhadap gerakan tanah. Getaran gempa bumi atau letusan gunungapi bisa menyebabkan terlepasnya lapisan bumi paling atas seperti bebatuan dan / atau tanah dari bagian utama gunung atau bukit.

Tanda-tanda terjadinya longsor dapat dilihat dari beberapa parameter; antara lain timbulnya keretakan pada tanah di lereng bukit atau gunung, runtuhnya bagian-bagian tanah dan batu dalam jumlah besar atau jumlah kecil dengan intensitas sering, adanya suara gemuruh dan tanda-tanda lain yang menunjukkan adanya penurunan kualitas landscape dan ekosistem.



Gambar.3.2. Peta Resiko Bencana Gerakan Tanah di Indonesia
(Sumber : BNPB)

3. Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung

Angin puting beliung dianggap sebagai salah satu jenis angin yang berbahaya karena dapat menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Hal ini dikarenakan benda-benda yang terbawa oleh angin puting beliung dapat terangkat dan terlempar begitu saja. Hingga saat ini telah banyak diberitakan bencana angin puting beliung di banyak tempat. Angin puting beliung yang cukup besar bahkan sampai merusak rumah-rumah warga, pohon, alat transportasi sehingga tidak heran jika berlalunya angin ini dapat membuat banyak kerusakan sekaligus menimbulkan kerugian yang tidaklah sedikit.

Hampir semua tempat yang ada di Indonesia, rawan bencana angin puting beliung. Namun meski begitu ada

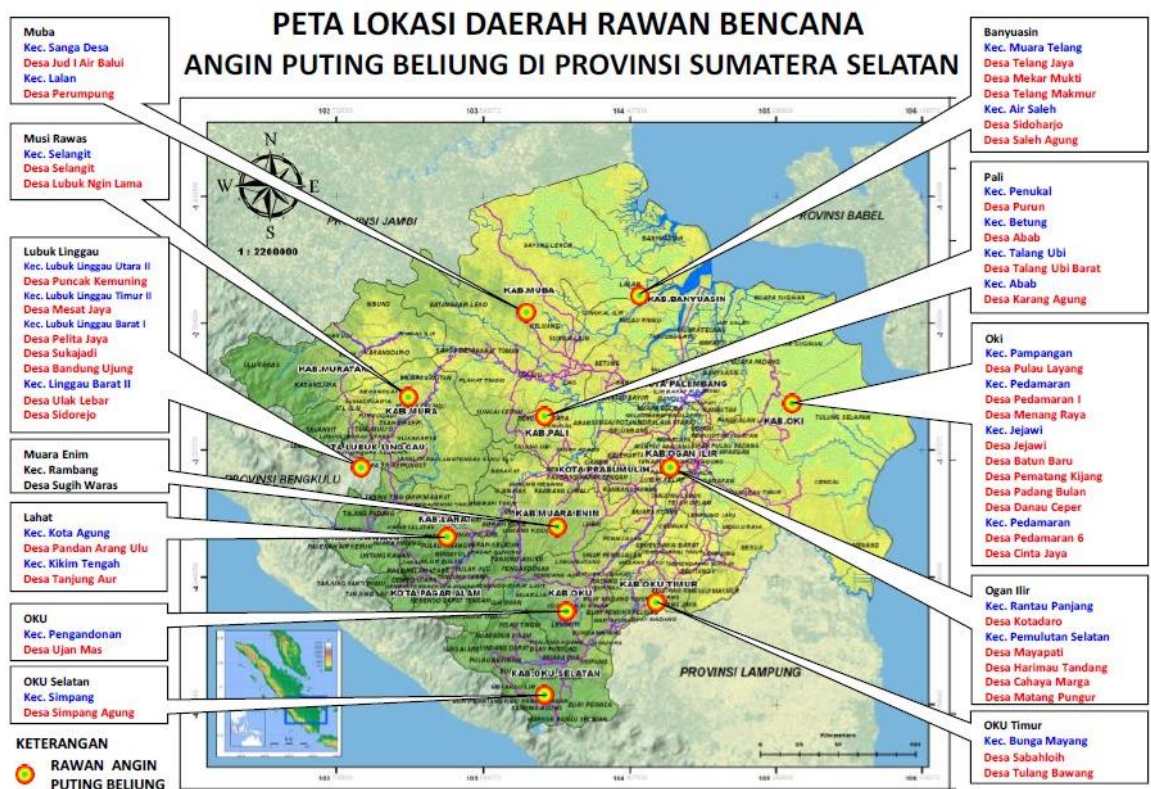
beberapa tempat yang nyatanya lebih sering diserang oleh angin puting beliung jika dibandingkan dengan tempat yang lain. Hal ini sering terjadi pada Nusa Tenggara, Sumatera serta Sulawesi, Jawa Barat terjadi di Banjar, Ciamis, Garut dan Tasik, Sukabumi dan Sumedang.

Tabel 3.1.Potensi Risiko Angin Puting Beliung
Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	OGAN KOMERING ULU	Pengandonan	Ujan Mas
2	OGAN KOMERING ILIR	Pampanag	Pulau Layang
		Pedamaran	Pedamaran 1
			Menang Raya
		Jejawi	Batun Baru
			Pematang Kijang
			Padang Bulan
			danau Ceper
3	MUARA ENIM	Muara Enim	
		Ujan Mas	
		Rambang	Sugi Waras
		Sungai Rotan	
		Semende Darat	
4	LAHAT	Tj. Tebat	Tj. Menang
		Merapi Timur	Gedung Agung
		Mulak Ulu	Karang Babatan
			Sungkai
			Pengentaan
		Kota Agung	Pandan arang Ulu
		Kikim Tengah	Tanjung Aur
		Pulau Pinang	
		Lahat	
		Gumay Ulu	

5	MUSI RAWAS	Selangit	
		Terawas	
		Tiang Pumpung Kepungut	
		Megang Sakti	
		Purwodadi	
6	MUSI BANYUASIN	Sanga Desa	Jud I Air Balui
		Lalan	Perumpung
7	BANYUASIN	Muara Telang	Telang Jaya
			Telang Makmur
			Mekar Mukti
8	OKU SELATAN	Simpang	Simpang Agung
9	OKU TIMUR	Bunga Mayang	Sabah Loih
			Tulang Bawang
10	OGAN ILIR	Rantau Panjang	Kota Daro
		Pemulutan Selatan	Maya Pati
			Harimau Tandang
			Cahaya Marga
			Matang Pungur
11	EMPAT LAWANG		
12	PALI	Penukal	Purun
		Betung	Abab
		Talang Ubi	Talang Ubi Barat
13	MURATARA	Abab	Karang Agung
		Nibung	Jadi Mulya
			Kerani Jaya
			Sumber Makmur
			Mulya Jaya
			Kelumpang Jaya
			Srijaya Makmur
			Karya Makmur
			Tebing Tinggi
			Bumi Makmur
			Sumber Sari
			Desa Jadi Mulya I

14	PALEMBANG		Jakabaring
15	PRABUMULIH		
16	PAGAR ALAM		
17	LUBUK LINGGAU	Lubuk Linggau Utara III	Puncak Kemuning
		Lubuk Linggau Timur III	Mesat Jaya
		Lubuk Linggau Barat I	Pelita Jaya
			Suka Jadi
			Bandung Ujung
		Linggau Barat II	Ulak Lebar
			Sido Rejo



Gambar.3.3. Peta angin puting beliung
(Sumber : BPBD)

Dampak buruk dari angin puting beliung, dapat meluluhlantahkan tempat dengan area seluas 5 kilometer. Dalam hal ini rumah serta banyak tanaman akan hancur

serta tumbang akibat diterjang oleh angin puting beliung. Bukan hanya itu namun makhluk hidup juga bisa mati akibat terlempar atau terbentur oleh benda-benda keras yang ikut masuk dalam pusaran angin. Upaya Mitigasi Angin Puting Beliung Angin puting beliung merupakan bencana yang bisa muncul kapan saja, dan susah untuk diprediksi. Untuk itu bagi masyarakat pada umumnya terutama yang tinggal pada risiko bencana angin puting beliung yang tinggi sangat diharapkan dapat mampu mengenali dan menghadapi angin puting beliung.

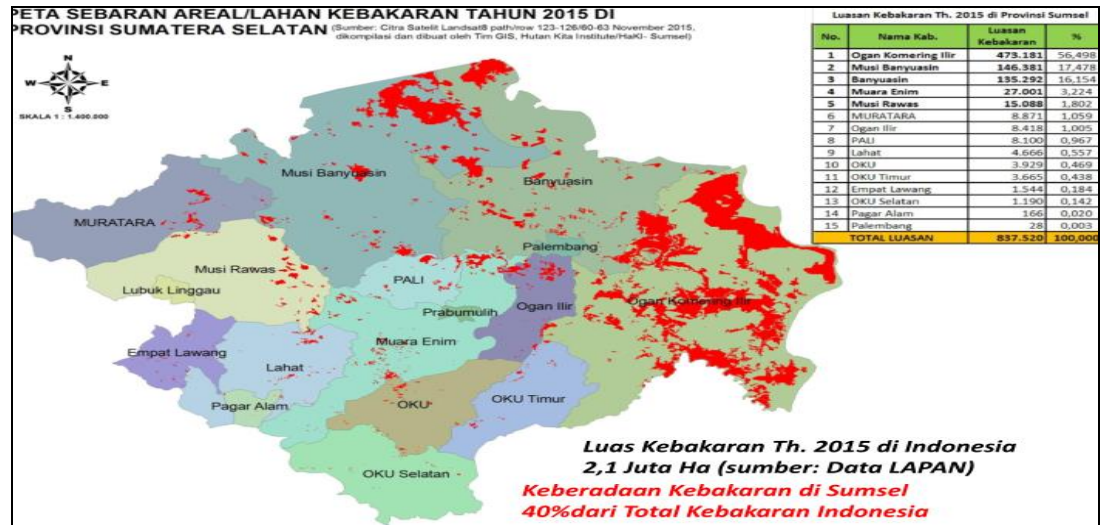
4. Kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun

Kejadian kebakaran hutan dan lahan menjadi isu lingkungan di dunia menimbulkan dampak yang merugikan. Dampak kejadian kebakaran hutan dan lahan bersifat multidimensi meliputi dampak secara sosial, ekonomi, lingkungan dan politik. Kajian ekonomi terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997/1998 oleh Tacconi (2003) menunjukkan bahwa kebakaran tersebut mengakibatkan degradasi dan deforestasi secara ekonomi bernilai 1,62-2,67 milyar dolar, biaya akibat kabut asap sebesar 674-799 juta dolar dan valuasi emisi karbon sebesar 2,8 milyar dolar. Dampak sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah kesehatan, seperti asma, bronchitis, ISPA, hingga kematian, serta dampak atas hilangnya pekerjaan. Bagi sektor lingkungan, dampak akibat kebakaran lahan dan hutan sangat besar, yaitu kerusakan fungsi lahan dan kabut asap yang dapat memperburuk perubahan iklim yang ada. Sedangkan dampak politik yang muncul akibat kebakaran lahan dan hutan adalah polusi kabut asap yang terjadi lintas Negara.

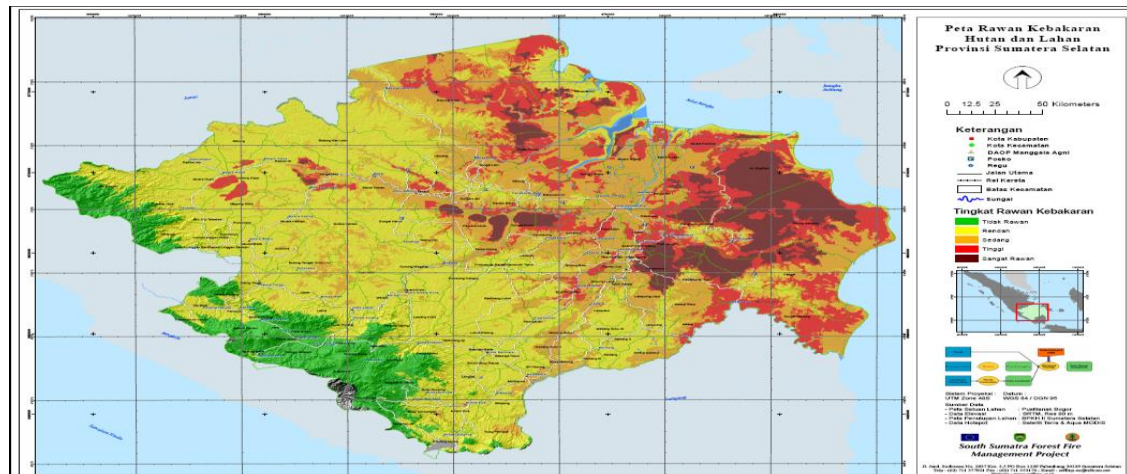
Kebakaran lahan/hutan biasanya disebabkan karena faktor manusia seperti pembukaan lahan pertanian baru dengan cara pembakaran, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok tanpa ijin atau menyalahi peraturan yang ada. Potensi risiko pada masyarakat berupa kerugian harta benda, kerusakan hutan, kerusakan lahan pertanian, perkebunan, perternakan, dan rumah penduduk. Potensi risiko pada pemerintahan berupa kerusakan hutan lindung, hutan wisata dan taman hutan rakyat (tahura), hutan tanaman industri, sarana dan prasarana umum.

Asap yang merupakan efek dari kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah nasional yang mengancam setiap tahun. Asap disebabkan oleh terjadinya proses pembakaran baik lahan maupun hutan. Secara umum, tingkat kadar asap tergantung dari banyak titik api (*fire spot*) yang berpotensi membakar area hutan dan lahan. Semakin banyak titik api (*fire spot*) di suatu wilayah yang rentan terbakar, maka semakin besar potensi kebakaran yang menimbulkan asap. Dampak yang ditimbulkan asap sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan, selain itu sangat mengganggu aktivitas berbagai sektor. Asap dengan kadar ISPU (*Indeks Standar Pencemaran Udara*) > 200 ppm dari aspek kesehatan akan berakibat pada kondisi kesehatan masyarakat yang beresiko, sedangkan dari aspek transportasi dilihat dari sisi jarak pandang yang akan berdampak pada kelancaran transportasi terutama untuk penerbangan.

Provinsi sumatera selatan setiap tahun mengalami kebakaran hutan dan lahan dan menyebabkan bencana asap pada tahun 2014 dengan jumlah hots spot 7.234, pada tahun 2015 meningkat menjadi 27.043 hots spot, pada tahun 2016 menurun menjadi 959 hots spot kemudian tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan berjumlah 1.212 hots spot.



Gambar.3.4. Peta Sebaran Area/Lahan kebakaran tahun 2015 (lapan)



Gambar. 3.5. Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

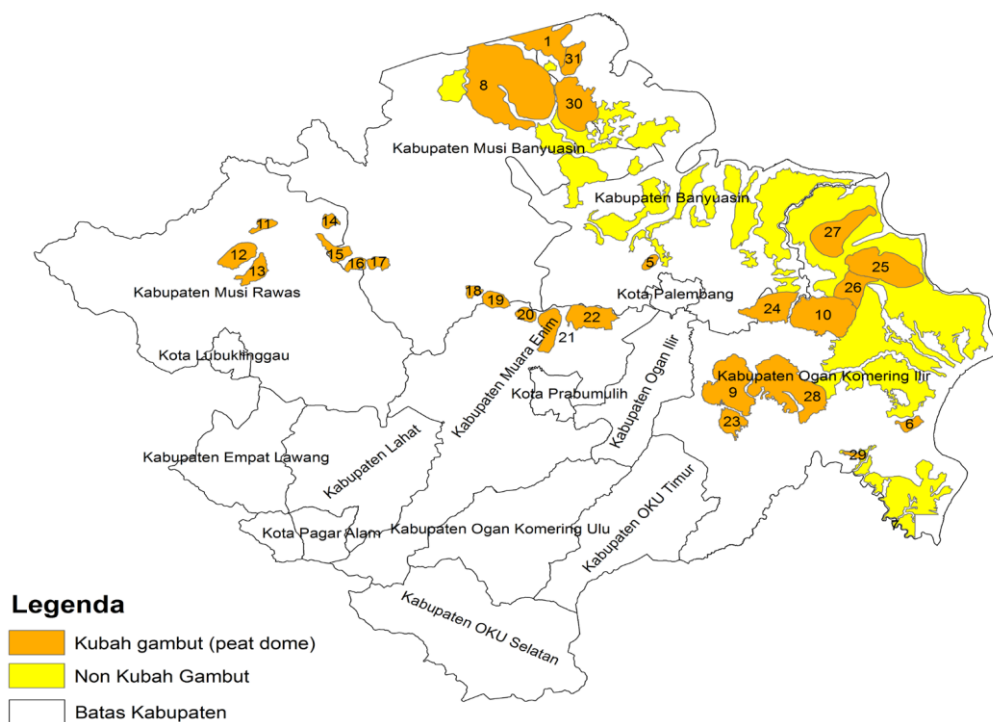
Tabel 3.2. Data desa rawan dan sangat rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah
----	-----------------	-----------	------	--------

		Rawan	Sangat Rawan	Rawan	Sangat Rawan	
1	Ogan Komering Ilir	18	14	63	87	150
2	Banyuasin	19	14	111	35	146
3	Musi Banyuasin	14	12	68	66	134
4	Ogan Ilir	13	7	57	15	72
5	Muara Enim	18	12	102	39	141
6	Penukal Lematang Abab Ilir	5	5	34	11	45
7	Musirawas	13	8	88	27	115
8	Musirawas Utara	7	7	43	21	64
9	Empat Lawang	7	3	47	5	52
10	Lahat	18	7	80	12	92
11	Ogan Komering Ulu	12	7	68	23	91
12	Ogan Komering Ulu Selatan	17	8	83	20	103
13	Ogan Komering Ulu Timur	12		22	25	47
14	Pagaralam	4	8	5	1	6
15	Palembang	8	1	10	1	11
16	Lubuk Linggau	5	2	9	4	13
17	Prabumulih	5	2	10	4	14
JUMLAH		195	118	900	396	1296

Sumber BPBD Prov. Sumsel

Kebakaran hutan dan lahan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 merupakan kejadian kebakaran yang terparah yang pernah terjadi diwilayah Provinsi Sumatera Selatan, belajar dari kejadian tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komando Gubernur Sumatera Selatan melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah yang dipandang perlu guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang dapat terjadi pada musim kemarau. Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi mengingat luasnya lahan gambut yang cukup luas, yaitu 1.476.226 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Pali dan Ogan Ilir.



Gambar. 3.6. Distribusi lahan gambut Provinsi Sumatera Selatan
 Sumber (Source) : SSFFMP (2008) dalam BKSDA Sumatera Selatan (2015)

5. Letusan Gunung Api

Indonesia memiliki beragam tipe gunungapi yaitu Tipe-A (79 buah), yakni gunungapi yang pernah mengalami erupsi sekurangkurangnya satu kali sesudah 1600 Masehi. Tipe-B (28 buah), yakni gunungapi yang sesudah 1600 Masehi belum mengalami erupsi magmatik, namun masih memperlihatkan gejala kegiatan misalnya solfatara dan fumarola. Tipe-C (20 buah), yakni gunungapi yang erupsinya tidak diketahui dalam sejarah manusia namun masih terlihat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan fumarola. Dari beragam gunungapi yang ada tercatat bahwa gunungapi Tipe A tersebar di Sumatra (13 buah), Jawa (21 buah), Bali (2 buah), Nusa Tenggara (19 buah), Sulawesi (11 buah), dan Kepulauan Maluku (13 buah). Di setiap provinsi tersebut memiliki lebih dari satu gunungapi aktif yang

berpotensi dapat meletus dan diantaranya menjadi prioritas utama.



Gambar 3.7. Sebaran Gunungapi tipe A di Indonesia

Pengelolaan gunungapi saat ini dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia. Mandat yang dimiliki PVMBG adalah (1) Penelitian dan pemantauan aktivitas gunungapi; (2) Peringatan Dini Bencana Letusan Gunungapi, melalui penentuan tingkat kegiatan gunungapi: aktif, waspada, siaga, awas; (3) Penetapan Kawasan Rawan Bencana; (4) Pembentukan Tim Tanggap Darurat; (5) Sosialisasi kepada Pemerintah daerah dan masyarakat; (6) Pelatihan evakuasi dan penataan tata ruang.

Seperti halnya gunung-gunung lain di Indonesia, gunung Dempo pun memiliki sejarah dan misteri di dalamnya. Sampai saat ini, gunung Dempo masih berstatus aktif dan beberapa ahli geologi menyebutnya sebagai salah

satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Berikut adalah ulasan tentang sejarah letusan gunung Dempo.

Tabel 3.3. Sejarah Letusan Gunung Dempo

No	Tahun Kejadian	Catatan Sejarah Letusan
1	1818	Letusan pertama yang tercatat oleh sejarah, yakni pada tahun 1818, namun catatan tentang tanggal kejadian tidak bisa dipastikan. Letusan ini menyebabkan puncak gunung Dempo menjadi gundul dan sebagian besar hutan habis terbakar.
2	1839	Tidak lama berselang, kembali terjadi letusan, yakni pada tahun 1839. Sebagian masyarakat menggambarkan terdengarnya suara gemuruh yang cukup keras dan api terlihat menyala di atas puncaknya. Mengakibatkan kerusakan pada hutan, entah itu terbakar atau tumbanganya pohon-pohon besar di sana.
3	1 Januari 1853	Letusan selanjutnya tidak terlalu berbahaya dan tidak terlalu besar, tidak banyak keterangan tentang letusan satu ini
4	18 Mei 1879	Masyarakat sekitar mendengar gemuruh letusan selama 10 menit dan terlihat gunung Dempo mengeluarkan kepulan awan hitam dari puncaknya.
5	1880	Pada bulan Mei 1880, gunung Dempo kembali memperlihatkan keaktifan laharnya, ia meletus dengan sekala sedang.
6	16 Februari 1881	Satu tahun berikutnya, seakan ingin memperlihatkan bahwa ia merupakan gunung berapi yang sangat aktif, gunung Dempo kembali meletus, mengakibatkan gempa di kawasan sekitarnya, memperdengarkan suara gemuruh dan menyemburkan asap dari puncaknya.
7	Juli 1884	Sepanjang bulan Juli di tahun 1884, gunung Dempo sering terlihat menyemburkan gumpalan asap dari kawahnya, sesekali terdengar dentuman yang sangat keras dari gunung berapi tersebut.
8	1895	Pada bulan Juli, gunung Dempo mengeluarkan kepulan asap dan menghujani kawasan di sekitarnya dengan abu vulkanik. Sementara di tahun yang sama, pada bulan September, ia kembali aktif, mengepulkan asap, menghujani abu dan mengalirkan lumpur panas. Pada letusan ini, terdengar satu kali dentuman yang keras.
9	26-27 Oktober 1900	Memperdengarkan suara dentuman yang amat keras dan mengepulkan asap yang sangat tinggi.
10	1905	Perut gunung Dempo seperti sedang bergejolak, kala itu kawahnya sering sekali menyemburkan air panas hingga mencapai ketinggian 12 meter.
11	16-17 Februari 1908	Gunung Dempo mengalirkan lumpur panas ke sungai Betung dan menghujani kawasan sekitarnya dengan abu.
12	1921	Menurut Stehn, seorang ahli geologi, gunung Dempo mengeluarkan uap panas dari perutnya, hal ini mengakibatkan naiknya permukaan air di kawah gunung Dempo. Kejadian ini sama persis dengan kegiatan vulkanis di gunung Krakatau.
13	19 Mei 1922	Terjadi letusan kecil selama 1 menit, kepulan uap terlihat mengepul dari kawahnya.
14	April 1926	Sering terdengar suara gaduh dari arah gunung Dempo, seperti air yang sedang dituangkan ke lantai dan bebetuan yang sedang dilemparkan.
15	1934	Pada bulan Januari, Februari dan bulan April, terjadi hujan abu di kawasan sekitar gunung Dempo, hujan abu yang berturut-turut tersebut menyebabkan kerusakan pada kebun teh Ampak, rusak dan kering.
17	1936	Pada tanggal 26 November 1936, terdengar suara gemuruh dari arah gunung Dempo, sebanyak 3 kali. Selanjutnya, gunung tersebut meluncurkan hujan abu dan belerang, sekitar 30 menit lamanya, serta mengalirkan lumpur ke sebelah barat laut darinya.
18	Juli 1939	Pada tanggal 25 Juli, terjadi letusan yang cukup hebat, sekitar 15 menit

		lamanya, gunung Dempo menyemburkan gumpalan hitam berupa lumpur panas, menyebabkan hujan lumpur di kawasan sekitarnya. Kebun teh Gunung Dempo menjadi pihak yang paling dirugikan oleh letusan ini.
20	1940	30 Januari: Diawali dengan beberapa kali suara dentuman dan gemuruh, kemudian gunung Dempo mengalirkan lumpur bercampur belerang ke kawasan-kawasan sekitarnya, merusak ladang sawah, ladang kopi dan perkebunan milik masyarakat sekitar, di beberapa tempat, endapan lumpur mencapai tinggi 50cm. 4 Februari: seorang peneliti bernama Stehn melakukan pendakian di gunung Dempo, ia menuturkan bahwa semakin ke atas, maka endapan abu semakin tebal, terlihat hutan yang rusak dan pepohonan yang terbakar serta tumbang.7 Februari: gunung Dempo mengeluarkan suara gemuruh sebanyak 2 kali.8 Februari: pada pagi harinya, terlihat gumpalan asap di atas gunung Dempo dan pada malam harinya terjadi gempa, serta turunnya hujan abu.12 Februari: Seakan tidak puas, gunung Dempo kembali bereaksi, kali ini ia mengeluarkan kepulan asap yang tak terlalu padat.
21	1974	Kawah gunung Dempo menyemburkan belerang
22	21 Mei 2009	Selama 5 menit, gunung Dempo mengalami letusan freatik, terasa gempa di kawasan sekitarnya.
23	2015	Pada tanggal 30 April, badan PVMBG mengeluarkan laporan tentang peningkatan status gunung Dempo menjadi waspada, warga dilarang mendekatinya dengan radius 1km. Kemudian pada tanggal 15 September, masyarakat Pagaralam panik karena melihat kepulan asap yang sangat pekat, seakan puncak gunung Dempo sedang terbakar hebat.
24	2017	Gunung Dempo kembali bereaksi, meletus dengan skala kecil, mengakibatkan terjadinya hujan abu di kawasan sekitarnya. Mengakibatkan kepanikan bagi masyarakat Pagaralam, mengingat perkampungan mereka sangat dekat jaraknya dengan gunung Dempo.

6. Gempa Bumi

Secara geografis Indonesia terletak pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng pasifik yang merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia. Zona ini memberikan kontribusi sebesar hampir 90% dari kejadian gempa di bumi dan hampir semuanya merupakan gempa besar di dunia (Kramer, 1996). Beberapa gempa besar telah terjadi dalam 10 tahun terakhir dan mengakibatkan kehilangan jiwa serta kerugian material yang mempengaruhi sektor ekonomi dan pembangunan. Beberapa gempa besar yang terjadi dalam dekade terakhir di Indonesia yaitu gempa Bengkulu 2000 (Mw7.8), gempa Aceh-Andaman Tsunami 2004 (Mw9.2), gempa Nias- Simeulue 2005 (Mw8.7), gempa Yogyakarta 2006, gempa Jawa Selatan yang diikuti tsunami 2006 (Mw7.6), gempa Bengkulu 2007 (Mw 8.4 and 7.9) dan

gempa terbaru di Padang (Mw7.6) pada September 2009. Besar kerugian secara ekonomi yang terjadi sejak tahun 2004-2010 bervariasi dari US\$ 39 juta sampai dengan US\$ 4,7 Miliar dan menyebabkan lebih dari 200.000 korban jiwa.

Hal ini menunjukkan dibutuhkan adanya rencana mitigasi bencana gempa sehingga bisa meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Beberapa dampak gempabumi beserta bahaya ikutannya (seperti tsunami, keretakan tanah, dan kelongsoran lereng) yang ditimbulkan oleh gempabumi Tingginya aktivitas kegempaan juga terlihat dari hasil pencatatan dalam rentang waktu 1900-2009 terdapat lebih dari 8.000 kejadian gempa utama dengan magnitudo $M > 5.0$. Kejadian gempa-gempa utama (main shocks) dalam rentang waktu tersebut dan distribusi gempa global untuk wilayah Indonesia dapat dilihat dalam gambar 24. Proses terjadinya gempa sangat sulit untuk diamati secara langsung, sebab melibatkan interaksi yang sangat kompleks antara materi dan energi yang terdapat pada sistem sesar aktif di bawah.

Provinsi Sumatera selatan tidak termasuk daerah yang dilalui patahan oleh karena itu jika terjadi gempa akan terasa getaran ringan namun mengingat dampak yang ditimbulkannya kerugian yang sangat besar sudah semestinya kita melakukan antisipasi dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan. Ada beberapa catatan terjadi gempa di Sumatera selatan yaitu:

Tabel 3.4. Sejarah gempa bumi di Sumatera Selatan

No	Waktu Kejadian	Sejarah/catatan gempa
1	5 Maret 2010	Kekuatan 6,8 Skala Richter di lepas pantai Sumatera
2	25 Juli 2014	Gempa bumi tektonik 7,3 skala Richter kedalaman 600 km koordinat 2,5 LS 104,0 BT
3	20 Agustus 2017	Gempa Bumi tektonik berkekuatan 5,0 SR

		mengguncang Ogan Komering Ulu, Gempa berpusat di darat 33 KM Barat Daya Ogan Komering Ulu dengan titik koordinat 4.25 LS 103.8 BT dengan kedalaman 10 KM, Gempa Dirasakan (Skala MMI) : II Liwa, Gempa Tidak Berpotensi Tsunami
4	1 Januar 2018	Kekuatan 5 skala Richter

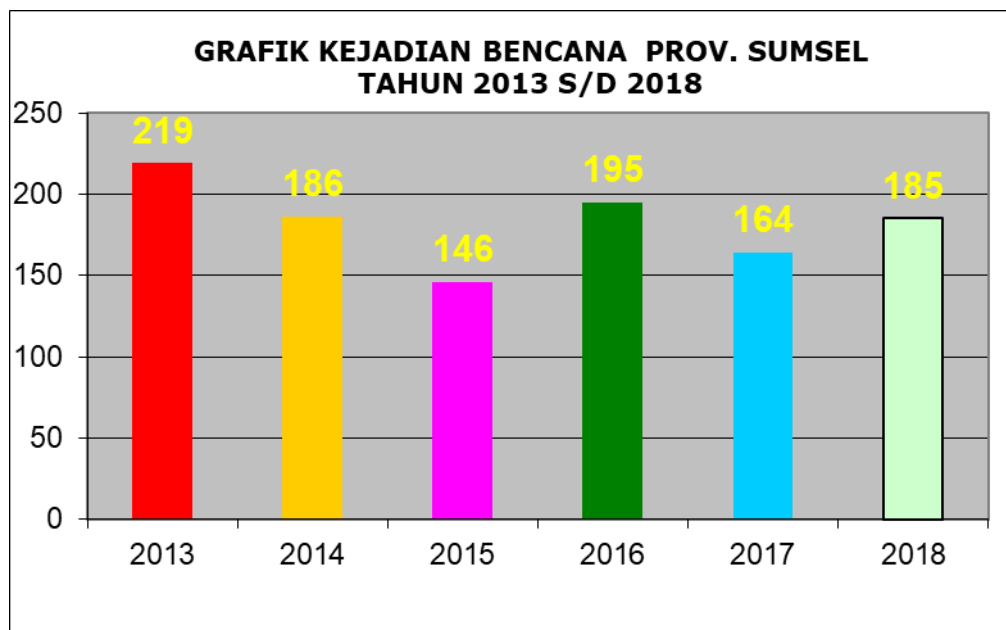
Adanya bahaya yang tersebar di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan bisa saja menyebabkan terjadinya bencana apabila kabupaten/kota tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi peristiwa sebab bencana datangnya kadang kala pada saat masyarakat belum siap maka masyarakat yang rentan akan mengalami resiko bencana. Tiap Kabupaten/Kota memiliki tingkat dan jenis bahaya yang berbeda maka dampak yang dialami dan upaya penanggulangannya tentu memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Kabupaten yang sering terjadi kebakaran hutan, lahan dan kebun misalnya Kabupaten OKI, OI, MUBA, Banyu Asin, Muara Enim, PALI dan MURATARA sumberdaya yang disiapkan adalah terkait bencana Karhulabun. Permasalahan dan tantangan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumsel berdasarkan Laporan Akhir Posko Karhutlah Provinsi Sumsel tahun 2018 yaitu:

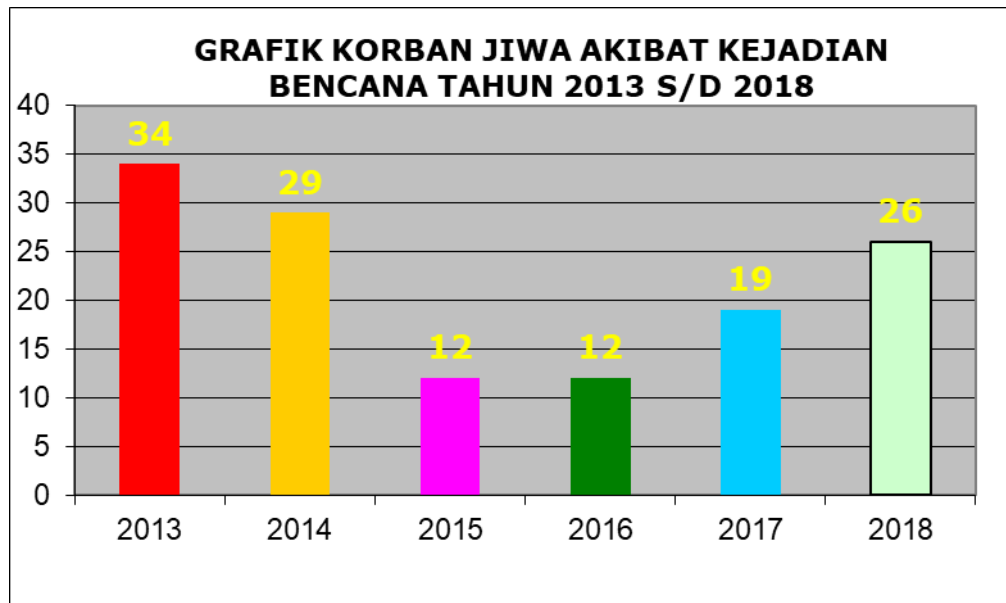
- 1) Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau
- 2) Karakteristik lahan gambut yang sulit dipadamkan
- 3) Luasnya lahan yang rawan dan berpotensi terbakar
- 4) Sulit/terbatasnya sumber air dilapangan
- 5) Masih adanya kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar
- 6) Masih berlangsungnya kegiatan masyarakat yang secara ekonomis memanfaatkan kawasan hutan untuk menanam

padi sonor, mencari ikan, kayu gelam dan lainnya di lahan gambut.

- 7) Terbatasnya peluang usaha atau tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan.

Bencana yang terjadi dapat menyebabkan kerugian kerusakan, kecacatan, kemiskinan bahkan kematian berdasarkan data yang telah kami himpun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terdapat 1095 kali kejadian bencana di Provinsi Sumatera Selatan dan menyebabkan meninggal dunia sebanyak 132 orang. Dibawah ini kami sajikan grafik kejadian bencana dan grafik korban jiwa yang disebabkan oleh bencana dari tahun 2013 – 2018.





Mengingat banyaknya potensi bencana yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan dampak yang ditimbulkan oleh kejadian bencana ini sangat mengkhawatirkan maka dalam penanganannya harus di prioritaskan terutama dalam rencana pembangunan. Pembangunan yang telah direncanakan dengan sempurna tanpa memperhitungkan pengurangan resiko bencana didalamnya terutama rencana pembangunan diwilayah yang ada resiko bencana bisa saja menemui kegagalan. Kejadian bencana dapat menyebabkan infrastruktur hancur, masyarakat mengalami beban penderitaan, kerugian dan kerusakan harta benda, korban jiwa bahkan suatu daerah bisa miskin dalam sekejap mata oleh dikarenakan bencana yang terjadi. Karena itu konsep pengurangan resiko bencana dapat dijadikan solusi sebagai investasi dalam artian melindungi hasil pembangunan karena biaya tanggap darurat bencana serta pemulihan pasca bencana jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pengurangan resiko bencana.

a. Permasalahan Pelayanan PD

Ada beberapa permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

diantaranya:

- 1) Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Pembangunan Daerah belum optimal.
- 2) Pelaksanaan Setandar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana belum optimal
- 3) Upaya pencegahan, mitigasi bencana dan pengurangan risiko belum optimal
- 4) Kejadian bencana di Sumatera Selatan dan risiko yang ditimbulkan cenderung semakin meningkat (banjir tanah longsor, karhutla, angin puting beliung)
- 5) Kabupaten kota masih banyak belum Menyusun dan belum memperbaharui dokumen kebencanaan
- 6) Kejadian karhutla diprovinsi sumsel masih tinggi
- 7) Risiko bencana di beberapa kab/kota Prov. Sumsel masih tinggi
- 8) Dukungan SDM dan anggaran penanggulangan bencana masih minim

b. Isu Strategis

- 1) Masih tingginya risiko bencana di beberapa kabupaten kota Prov. Sumsel
- 2) Masih tingginya kejadian karhutla di beberapa kabupaten kota Prov. Sumsel
- 3) Dukungan pendanaan dan SDM dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan bencana kab/kota masih rendah

Beberapa Isu-isu Strategis yang sering muncul

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Sumatera Selatan, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas dan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus meningkatkan koordinasi dan membangun kemitraan bersama masyarakat, dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan K/L, serta OPD terkait dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Untuk meminimalisir korban bencana, dan rusaknya pembangunan yang ditimbulkan oleh bencana maka konsep pengurangan resiko bencana dalam rencana pembangunan daerah adalah sebuah keharusan;
3. Memberikan informasi daerah-daerah rawan bencana kepada masyarakat dan memberi peringatan kepada masyarakat agar menghindari daerah rawan bencana sehingga tidak menjadi korban bencana;
4. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ditengah-tengah masyarakat agar masyarakat dapat terhindar dari kejadian bencana;
5. Melakukan evakuasi dan penyelamatan korban bencana dengan cepat untuk memperkecil terjadinya korban;
6. Melaksanakan pemulihan pasca bencana sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat berjalan dengan baik;
7. Melakukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan berbasiskan pengurangan resiko bencana;
8. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui

- sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan lingkungan hidup dan perubahan iklim;
9. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 10. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 11. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
 12. Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, sert kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisas peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
 13. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan

kemampuan sumberdaya tersedia;

14. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
15. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
16. Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
17. Membangun panduan penanganan pengungsi sebagai sistem koordinasi pelaksanaan penanganan pengungsi yang terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan, pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan, dan ketertiban pada saat situasi darurat;
18. Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;
19. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
20. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak – pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
21. Belum optimalnya pengalokasian anggaran dana siap pakai (on call) sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing – masing sub bidang yang berada dibawah bidang penanganan darurat.

22. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari sub bidang – sub bidang pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan, serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
23. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
24. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antar kementerian/lembaga, Pusat dan daerah;
25. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi akibat bencana.
26. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
27. Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
28. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
29. Membangun database dan sistem informasi kinerja

logistik dan peralatan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas.

30. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program melalui koordinasi antara dukungan manajemen dengan bidang, antar bidang, sub bidang, serta antara Pusat dan daerah;
31. Peningkatan koordinasi dan pengelolaan program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN;
32. Diperlukan adanya kajian, reviu, dan pemutakhiran peraturan dan perundangan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
33. Masih banyaknya peraturan perundang – undangan yang belum disosialisasikan sampai ditingkat kabupaten/kota;
34. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga baik antara kementerian/lembaga, Pusat – daerah, maupun dengan lembaga lembaga non-pemerintah;
35. Peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu;
36. Peningkatan layanan administrasi dan kepegawaian yang berkualitas, peningkatan produktivitas pegawai;
37. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset penanggulangan bencana.
38. Peningkatan pengendalian dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
39. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana;
40. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
41. Belum optimalnya sistem pengendalian internal.

42. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) membuka hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri;
43. Mengidentifikasi pelaksanaan fungsi penelitian, pengembangan dan inovasi penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui kerjasama dengan berbagai kelembagaan;
44. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
45. Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan secara aktual dan terintegrasi;
46. Peningkatan sarana dan prasarana data dan informasi untuk pengumpulan dan diseminasi data dan informasi kebencanaan;
47. Pengembangan Pusdalops di daerah risiko bencana tinggi;
48. Peningkatan kualitas kehumasan, penerangan, dan dokumentasi kebencanaan.

Tabel 2.3 (Inmen 2/2025)
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi DAS, hutan, tata ruang wilayah	Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Pembangunan Daerah belum optimal	Resiliensi Bencana	Perubahan iklim global	Integrasi PRB ke dalam RPJMN / RPJMD	Sinkronisasi RPB kab/kota	Kurangnya integrasi PRB dalam perencanaan pembangunan daerah
Potensi kelembagaan dan regulasi (SPM)	Pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana belum optimal	Resiliensi Bencana	Adaptasi perubahan iklim	Implementasi SPM Bencana	Standar pelayanan BPBD kab/kota	Rendahnya implementasi SPM di daerah
Potensi tata ruang dan infrastruktur	Upaya pencegahan, mitigasi bencana, dan PRB belum optimal	Resiliensi Bencana	Adaptasi perubahan iklim	Mitigasi & adaptasi bencana	Penanganan banjir, longsor, karhutla	Belum optimalnya PRB di Sumsel

Potensi geografis dan iklim tropis	Kejadian bencana meningkat (banjir, tanah longsor, karhutla, angin puting beliung)	Resiliensi Bencana	Dampak perubahan iklim	Peningkatan risiko bencana nasional	Karhutla & banjir musiman	Masih tingginya risiko bencana di Sumsel
Potensi tata ruang dan perencanaan wilayah	Banyak kabupaten/kota belum menyusun atau memperbarui dokumen kebencanaan	Resiliensi Bencana	Adaptasi perubahan iklim	Dokumen RPJMD & RTRW berbasis PRB	Dokumen RPB kab/kota	Belum optimalnya dokumen kebencanaan
Potensi hutan dan lahan gambut	Kejadian karhutla masih tinggi	Resiliensi Bencana	Perubahan iklim global	Kebakaran hutan dan lahan	Karhutla di Sumsel	Masih tingginya kejadian karhutla
Potensi daerah rawan bencana	Risiko bencana di beberapa kabupaten/kota masih tinggi	Resiliensi Bencana	Perubahan iklim global	Risiko bencana nasional	Risiko tinggi di wilayah kab/kota	Masih tingginya risiko bencana lokal
Potensi SDM dan keuangan daerah	Dukungan SDM dan anggaran penanggulangan bencana masih minim	Resiliensi Bencana	Agenda SDGs global (ketahanan iklim)	Kelembagaan & pendanaan penanggulangan bencana	Kapasitas BPBD terbatas	Rendahnya dukungan SDM & anggaran

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dilaksanakan oleh BPBD Provinsi saja namun melibatkan Kementerian, Lembaga, Dunia Usaha, Akademisi, Media, OPD terkait, masyarakat, dan BPBD yang ada di kabupaten/kota. Sebanyak 17 BPBD Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah terbentuk 16 dan 1 lagi masih dalam proses pembentukan. Secara kuantitas Provinsi Sumatera Selatan sudah siap untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD kabupaten/kota adalah ujung tombak dalam penanggulangan bencana karena bencana yang terjadi adanya di desa-desa, kelurahan yang merupakan wilayah kerja di daerahnya, namun Provinsi mendukung kesenjangan dan pengawasan serta monitoring pelaksanaan SPM Sub urusan di Kab/Kota.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terlepas dari pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Badan penanggulangan bencana daerah memiliki tugas mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari dan meminimalisir dampak bencana, serta

memiliki daya serap informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana adalah utama dalam setiap upaya penanggulangan bencana termasuk kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana.

Dalam mewujudkan pembangunan BPBD Provinsi Sumatera Selatan secara sistematis dan bertahap menuntut adanya kesiapan serta kemampuan dalam penanggulangan bencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan daerah yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Provinsi Sumatera Selatan tentunya akan melakukan pembangunan disegala aspek, diantaranya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan demi berlangsungnya kehidupan manusia global yang damai dan tetap harmonis dengan lingkungan dunia yang kita tempati sekarang ini. Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan sinergi dengan upaya pengurangan resiko bencana karena tujuan dari pengurangan resiko bencana yaitu melindungi pembangunan atau resiko kegagalan pembangunan yang disebabkan oleh kejadian bencana. Penerapan pengurangan resiko bencana dalam rencana pembangunan zaman modern sekarang ini adalah sebuah keniscayaan ditambah lagi di negara kita banyak bahaya yang mengintai, telah kita saksikan bersama banyak hasil pembangunan yang tidak bisa dinikmati masyarakat karena hancur oleh bencana, pemerintah mengharapkan kesejahteraan masyarakat dari hasil pembangunan yang ada tetapi karena pembangunan dilaksanakan di daerah rawan longsor atau banjir, ketika longsor atau banjir datang maka

kesengsaraan yang didapat dan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan penduduk tidak terlaksana.

Dalam rangka mendukung tujuan Pembangunan SUMSEL pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dengan visi SUMSEL yaitu:

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

Sumatera Selatan untuk mencapai visinya memiliki 7 misi, tujuan dan sasaran BPBD mendukung misi ke-4 *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan”* dan tujuan ke-7 *“Optimalisasi Pengelolaan Bencana”* dengan sasaran Meningkatnya Upaya Penurunan tingkat kerentanan Bencana dan Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana serta sinkronisasi perencanaan penanggulangan bencana dengan rencana Pembangunan.

Untuk mendukung visi tersebut BPBD menetapkan visi yang selaras yaitu **“BPBD TANGGUH SUMSEL TERUS MAJU”**

Dengan rumusan Misi BPBD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a) Memperkuat Sistem Pengurangan Risiko Bencana secara Terintegrasi dan Berkelanjutan.
- b) Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Kapasitas Penanganan Pra-Bencana secara Inklusif dan Responsif;
- c) Menyempurnakan Sistem Tanggap Darurat yang Cepat, Tepat, dan Terkoordinasi;
- d) Menjamin Pemulihan Pascabencana yang Efektif, Berkelanjutan, dan Berbasis Pembangunan Resilien;

- e) Mendorong Mitigasi Bencana sebagai Pilar Pembangunan Berbasis Ketahanan Iklim dan Lingkungan.

Dalam mendukung untuk mewujudkan visi misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan BPBD Prov. Sumsel telah menyusun rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Baseline	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Pengelolaan Bencana dan terwujudnya tatakelola pemerintahan	1. Menurunya risiko bencana	1. Indek Risiko Bencana Sumsel	131,05	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,24
		2. Meningkatnya Upaya penanggulangan Bencana.	1. Persentase integrasi Dokumen Kebencanaan dengan Rencana Pembangunan 2. Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana 3. Persentase Penurunan Tingkat Kerentanan Bencana							
		2.1 Meningkatkan Penanganan Pra Bencana.	Persentase Penanganan Pra Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2.2 Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.	2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2.3 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	3. Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2.4 Meningkatnya kualitas Dokumen	4. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		2.5 Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	5. Persentase Terpenuhiya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

2. Sasaran Renstra BPBD Tahun 2025-2029

Sasaran ini memiliki peran krusial sebagai kompas yang memandu setiap langkah dan upaya dalam pencapaian pembangunan. Dengan menetapkan sasaran yang jelas dan terukur, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) SUMSEL dan RENSTRA PD tahun 2025-2029 pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki arah yang sama dan tujuan yang spesifik untuk dicapai. Sasaran ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan, tetapi juga memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien, mendorong koordinasi lintas sektor, dan memungkinkan evaluasi progres secara berkala. Tanpa sasaran yang terdefinisi, pembangunan akan kehilangan fokus, berpotensi tidak terarah, dan sulit diukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, telah di rumuskan sasaran pembangunan yang selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumsel untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut sasaran Renstra PD yang telah di tentukan:

Tabel 3.2 Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIAT AN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Pengelolaan Bencana dan terwujudnya tatakelola pemerintahan	Menurunnya Risiko Bencana			Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel		
		Meningkatnya Ketahanan Daerah			Indeks Ketahanan Daerah		
Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan		Meningkatnya upaya penanggulang an bencana			1. Persentase integrasi Dokumen Kebencanaan dengan Rencana Pembangunan 2. Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan		

					Bencana 3. Persentase Penurunan Tingkat Kerentanan Bencana		
		Meningkatnya Penanganan Pra Bencana	Terpenuhi ya Pelayanan Pra Bencana	Meningk atnya kualitas Penanga nan Pra Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Program Penanggulan gan bencana	
					Persentase Penduduk Daerah rawan Bencana yang Medapatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/K ota / Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/K ota (Per Jenis Bencana)	

					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

					Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
					Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Penyusunan Rencana Kontinjensi	
					Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Geladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	

						Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
		Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Terpenuhinya Pelayanan saat Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya kualitas Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Program Penanggulangan bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ ResponCepat BencanaNon ALam Epidemi/Wabah Penyakit	
					Jumlah Laporan PelaksanaanRespon Cepat Penanganan DaruratBencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	

						Bencana/Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

						Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana	Terpenuhinya Pelayanan Pasca Bencana	Meningkatnya kualitas Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Program Penanggulangan bencana/Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Pen	

						yusunan Regulasi Penanggulan gan Bencana Kabupaten/K ota	
					Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana/Kerj a Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam penanggulan gan Bencana Kabupaten/K ota	
					Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi	Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana/Pen gelolaan dan Pemanfaatan	

					Pemerintahan Daerah (SIPD)	Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penagwasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	

					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	

					penanganan pascabencana Provinsi		
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana/Peri ngkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam	Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana/Pem binaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	

					1 (satu) tahun	(SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Kebencanaan	Sinkronisasi Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keterkaitan Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dinyatakan Sah/Legal	Program Penanggulangan bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	
					Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota /Penyusunan Kajian Risiko Bencana	
		Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan	

						Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah /	

					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Koordinasi dan Pemyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Seme steran SKPD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Fasilitas Kunjungan Tamu	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Kendaraan operasional Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	

						Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah /	

						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	--	---	--

3. Strategi BPBD Prov. Sumsel dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Adapun Strategi yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta Faktor Pendorong dan Penghambat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Strategi pencapaian tujuan dan Sasaran

VISI: SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRIORITAS	KEBIJAKAN
<i>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan</i>	Meningkatnya Pengelolaan Bencana dan terwujudnya tatakelola pemerintahan	1. Menurunkan Risiko Bencana	Mingkatkan kapasitas, menurunkan tingkat kerentanan dan internalisasi pengurangan resiko bencana kedalam rencana pembangunan)	Menurunkan resiko bencana di Kabupaten/Kota yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi	Memperkuat SDM, lembaga penanggulangan bencana
		2. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana	1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di Daerah Rawan Bencana		Memperkuat kelembagaan terkait informasi di daerah rawan bencana
			2. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan Bencana		Melaksanakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana
			3. Meningkatkan Pelayanan Evakuasi dan Penyelamatan Korban Bencana		Melaksanakan upaya evakuasi dan penyelamatan terhadap korban bencana dengan cepat
			4. Meningkatkan Pemulihan Pascabencana		Melaksanakan pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana
			5. Meningkatkan kualitas Dokumen		Melakukan penyusunan dokumen kebencanaan

			6. Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah		Melakukan pelayanan pemerintah daerah
--	--	--	---	--	---------------------------------------

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pencapaian Tujuan, Sasaran
dalam RPJMD 2025-2029

VISI: SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA				
<i>“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan”</i>				
NO	MISI DAN STRATEGI	PERMASALAHAN PELAYAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Pengelolaan Bencana dan terwujudnya tatakelola pemerintahan	Belum optimalnya upaya pengurangan resiko bencana dalam rencana pembangunan	Pengurangan resiko bencana belum optimal didalam rencana pembangunan	Terpadunya Rencana Penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan
		Masih tingginya tingkat kerentanan bencana	Upaya dalam menurunkan tingkat kerentanan belum optimal	Mengoptimalkan upaya dalam menurunkan tingkat kerentanan
		Masih rendahnya kapasitas penanggulangan bencana	Upaya dalam mningkatkan kapasitas belum optimal	Mengoptimalkan upaya dalam peningkatan kapasitas
		Masi terfokus pada tanggap darurat bencana	Pemahaman paradigma penanganan bencana masih kurang	Penguatan penanggulangan bencana pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
		Informasi kebencanaan belum terlaksana secara optimal	Dukungan anggaran yang tidak memadai di daerah	Adanya bantuan peralatan dan diklat terkait pengembangan informasi bencana dari pusat dan daerah
		Belum optimalnya respon setiap kejadian bencana	Informasi kejadian bencana sering lambat	Penguatan SDM dan kelembagaan serta peralatan komunikasi

4. Arah Kebijakan PD dalam Mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan disini merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Untuk mencapai pembangunan Provinsi Sumatera Selatan lima tahun kedepan, maka terdapat sinergi atau Hubungan antara Misi, Tujuan dengan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Hubungan antara Misi, Tujuan dengan Sasaran,
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan</i>	1) Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan, Meningkatkan Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana, Menurunkan Tingkat Kerentanan Bencana.	1) Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Rencana Pembangunan	1) Memperkuat SDM, lembaga dan sinkronisasi rencana penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan
	2) Meningkatkan Pelayanan Informasi di Daerah Rawan Bencana.	2) Memperkuat Sosialisasi, Informasi dan Edukasi di Daerah Rawan Bencana	2) Memberikan informasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana
	3) Meningkatkan Penanganan Pra Bencana.	3) Memperkuat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3) Melaksanakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana
	4) Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.	4) Memperkuat dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana.	4) Respon Cepat terhadap Kejadian Bencana

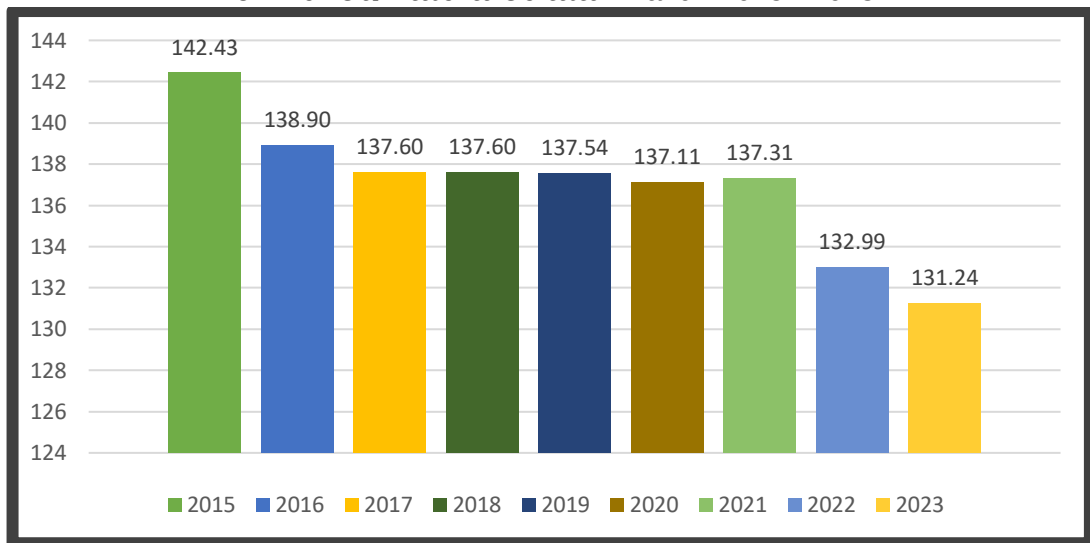
	5) Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	5) Memperkuat dalam Penanganan Pasca Bencana	5) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik maupun nom Fisik
	6) Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal.	6) Meningkatkan koordinasi antar lembaga Penanggulangan Bencana	6) Melaksanakan Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Kebencanaan

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terlepas dari pencapaian tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan daerah namun hal yang lebih penting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengawal serta mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan maju untuk semua dari ancaman bencana sehingga implementasi dari penyelenggaraan penanggulangan bencana berwawasan pengurangan resiko bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dapat mewujudkan pembangunan yang diharapkan. Kebanyakan bencana yang terjadi tidak bisa diprediksi sebelumnya dan kadang kala bencana yang terjadi tidak bisa kita tolak namun upaya yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana tersebut. Risiko bencana tiap daerah berbeda-beda oleh karena itu strategi dan penanganannya tentu berbeda-beda juga, sebelum kita menginterpendensi dengan kebijakan/program/kegiatan dalam penanggulangan bencana perlu kita ketahui data-data, tingkat risiko daerah yang akan dilaksanakan program/kegiatan agar tujuan pembangunan tepat sasaran. Dibawah ini data indeks resiko bencana kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan:

Grafik 3.1

Nilai IRBI Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2023



Sumber: InaRISK

Dari grafik diatas Provinsi Sumsel telah berhasil melakukan penurunan risiko bencana. Berdasarkan grafik diatas nilai Indeks Risiko Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2015-2023 adanya penurunan, bukti adanya penurunan kerentanan dan penguatan kapasitas dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD serta Renstra PD bahwa BPBD akan menurunkan risiko bencana dalam dalam rencana Pembangunan priode 2025-2029 kedepan.

Mengingat pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana ini adalah tugas bersama BPBD dan semua stakeholder terkait maka perlu sinkronisasi arah kebijakan stakeholder terkait penanggulangan bencana. Banyak sekali arah kebijakan dalam penanggulangan bencana diantaranya penataan ruang, kajian lingkungan hidup strategis ini sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 menyebutkan perlu adanya penegakan hukum dalam pelaksanaan tata ruang sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana.

Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana dari UU tentang penataan ruang, salah satunya adalah PP. No. 26/2008 tentang RTRWN. Isi dari PP ini menekankan terhadap

persyaratan kawasan lindung, seperti sempadan sungai, garis pantai, kemiringan lahan, kedalaman lahan gambut dan lain sebagainya, yang pada intinya pembangunan dan pembukaan lahan yang dilaksanakan harus memperhatikan risiko tinggi terhadap bencana lingkungan seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan peristiwa dengan anomali cuaca akibat perubahan iklim dalam penetapan rencana tata ruang. Selanjutnya, diterbitkan PP. No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. PP ini menegaskan bahwa dalam dalam rangka penyelenggaraan tata ruang, penting untuk mempertimbangan daerah rawan bencana untuk mengurangi risiko bencana. Untuk wilayah perkotaan sendiri, diutamakan adanya penyediaan jalur evakuasi bencana. Sekalipun kebijakan tata ruang ini tidak secara eksplisit menyebutkan perubahan iklim, namun secara substansial pada beberapa pasal dapat dijadikan rujukan. Berdasarkan hal tersebut, UU No. 32/2009 tentang PPLH yang memang memposisikan KLHS sebagai bagian dari pra syarat dalam penyusunan tata ruang dapat sinergis berjalan. KLHS juga memuat kajian kerentanan iklim sebagai bagian yang perlu dilakukan. Merujuk hal tersebut diatas, kajian risiko bencana dan kajian iklim menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan tata ruang di tingkat nasional, pulau maupun provinsi sampai kabupaten/kota. Jika ini dilakukan dengan baik dan benar, maka tata ruang di Indonesia akan mencerminkan sebuah tata ruang yang sensitif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 kami sajikan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 3.9

Hasil Telaah Struktur Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
I.	Rencana pusat permukiman / Struktur Perkotaan			
I.1	Pemantapan Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Palembang	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi	Tahun 2017 – 2018
I.2	Pengembangan dan Pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Kayuagung 2. Prabumulih 3. Baturaja 4. Muara Enim 5. Lahat 6. Lubuk Linggau 7. Sekayu	Pemerintah, SKPD Provinsi	Tahun 2017 – 2018
I.3	Peningkatan status menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)	1. Indralaya 2. Martapura 3. Sungsang 4. Pagar Alam	SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota	Tahun 2017 – 2018
I.4	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Sungai Lilin 2. Tebing Tinggi 3. Muara Beliti 4. Muara Dua 5. Pangkalan Balai 6. Gumawang 7. Tugumulyo 8. Talang Ubi 9. Peninjauan 10. Muara Rupit 11. Bayung Lencir 12. Tanjung Raja 13. Muara Lakitan 14. Pengadonan	SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota	Tahun 2017 – 2020
II.	Rencana jaringan transportasi			
II.1	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Darat			
II.1.1	Peningkatan fungsi jaringan jalan Arteri Primer	1. Lintas Barat 2. Lintas Tengah 3. Palembang-Prabumulih-Muara Enim	Dishub, PU Bina Marga	Tahun 2016-2036
II.1.2	Peningkatan fungsi jaringan jalan Kolektor Primer	1. Lingkar Palembang 2. Palembang-Tanjung Api-Api 3. Tugumulyo-Gumawang-Martapura 4. Sekayu-Babat toman-Muaralakitan-Muara Beliti 5. Sekayu-Talangubi-Gunung Megang 6. Prabumulih-Karangagung-Baturaja 7. Tebingtinggi -	Dishub, PU Bina Marga	Tahun 2016-2036

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
		Pendopo-Muarapinang- Pagar Alam- Tanjungsakti-Lahat 8. Muaradua- Madukisam- PulauPangung- Kotaagung-Pagaralam		
II.1.3	Pengembangan Terminal Terpadu Multi Moda Palembang (Tipe A)		Kementerian Perhubungan Dishub, PU Bina Marga	Tahun 2017-2021
II.1.4	Pengembangan Terminal Tipe A		Pemerintah Pusat	Tahun 2019-2020
II.1.5	Pengembangan Terminal Tipe B		Dishub Provinsi	Tahun 2017-2021
II.1.6	Pengembangan Terminal Tipe C		Dishub	Tahun 2017-2026
II.1.7	Studi Kelayakan pengembangan jalur kereta api untuk melayani Sumatera Selatan bagian barat dan timur	Sumatera Selatan bagian barat dan timur	Dishub, BAPPEDA	Tahun 2022
II.1.8	Pengembangan jalur kereta api lintas antar PKN (Lampung-Palembang-Jambi)	Lampung-Palembang-Jambi		Tahun 2022-2036
II.1.9	Pengembangan lintas jalur lintas kereta api baru dan stasiun	1. Tanjung Enim-Tanjung Api-api 2. Lubuk linggau-Simpang Tanjung Api-api Muare Enim-Prabumulih 3. Tanjung Enim-Pelabuhan Linau 4. Lubuk Linggau-Kota Padang-Pelabuhan Pulau Balai 5. Palembang-Betung-Batas Jambi 6. Tj Enim-Srengseng 7. Lahat-Muara Belida		
II.2	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Laut			
II.2.1	Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Api-Api	Banyuasin	Dishub	Tahun 2017-2036
II.2.2	Pembangunan infrastuktur pendukung Pelabuhan Tanjung Api-Api	Banyuasin	APBN Dishub, PU Bina Marga, PU Cipta Karya	Tahun 2022-2036
II.2.3	Optimalisasi dan peningkatan Fungsi dan pelayanan Pelabuhan Nasional		Dishub	Tahun 2017-2026

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
II.2.4	Peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan dan pelayaran		Dishub	Tahun 2017-2026
II.3	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Udara			
II.3.1	Peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung tatanan kebandarudaraan Bandara Internasional SMB II	Palembang	Dishub	Tahun 2017-2021
II.3.2	Perluasan runway dan fasilitas bandara SMB II	Palembang	Dishub	Tahun 2022-2026
II.3.3	Peningkatan fasilitas kebandarudaraan bandara pendukung	1. Silampari 2. Atung Bungsu	Dishub	Tahun 2022-2036
III.	Rencana jaringan energy			
III.1	Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik			
III.1.1	Peningkatan pelayanan listrik masuk desa se Provinsi	Sumatera Selatan	PLN	Tahun 2017-2036
III.1.2	Identifikasi potensi dan eksplorasi sumber listrik baru	1. PLTA, PLTU, Geothermal 2. Mikro Hidro 3. Lainnya	PLN	Tahun 2017-2036
IV.	Rencana jaringan telekomunikasi			
IV.1	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi			
IV.1.1	Peningkatan pelayanan jaringan komunikasi :1. Kabel2. Nirkabel (wireless)		Telkom, Investor	Tahun 2017-2036
IV.1.2	Peningkatan pelayanan jaringan Internet/Data : 1. Broadband/ 3,5G-4G 2. WiFi 2,4 dan 5,8 Ghz 3. Wimax 4. Leased Line/Kabel		Badan Komunikasi dan Informatika, Telkom, Investor	Tahun 2017-2036
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air			Tahun 2017-2036

Rencana struktur ruang harus sinergi dengan rencana penanganan bencana agar pembangunan yang akan

dilaksanakan tidak terdampak bencana sehingga dapat menekan resiko kerusakan atau kerugian dan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 3.10
Hasil Telaah Pola Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No	Rencana Pola Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
I.	Rencana kawasan lindung			
I.1	Inventarisasi kawasan lindung	Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2021
I.2	Penetapan tata batas kawasan Hutan Lindung		Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2019-2021
I.3	Penghutan kembali (reforesty) dan reboisasi kawasan hutan lindung	Seluruh Hutan Lindung yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2036
I.4	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional	Wilayah TNKS di Sumatera Selatan, Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa	BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2021-2036
	Pemantauan dan pengawasan di kawasan lindung	Seluruh wilayah	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional, BP DAS	Tahun 2017-2036
	Pembangunan jalan inspeksi untuk pengendalian kawasan TNKS, hutan lindung, konservasi dan suaka margasatwa	Seluruh wilayah	PU Bina Marga, Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2021
	Pengelolaan hutan bersama masyarakat	Seluruh wilayah	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2036
	Evaluasi terhadap hak penguasaan lahan yang telah dikeluarkan/ direkomendasikan oleh	Seluruh Kawasan lindung	Dinas Kehutanan, Bappeda	Tahun 2017-2026

No	Rencana Pola Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
	pemerintah pusat dan daerah.			
II.	Rencana kawasan budaya yang memiliki nilai strategis			
II.1	Pengembangan infrastruktur dan sarana sosial ekonomi	1. Metropolitan Palembang 2. Perkotaan Lubuk Linggau. 3. Muara Enim dan sekitarnya 4. Pelabuhan Tanjung Api-Api 5. Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih 6. Kawasan Koridor Lahat – Muara Enim 7. Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk Sekayu dan Kayuagung). 8. Kawasan Tulung Salapan- Cengal Kabupaten OKI. 9. Kawasan Koridor Baturaja-Martapura. 10. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau.	Seluruh Stakeholder	Tahun 2017-2036
II.2	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional	Kawasan Pesisir OKI	BAPEDALDA, Bappeda, BPKH Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2026
II.3	Pemantauan dan pengawasan di kawasan Untuk menjaga fungsi dan kelestarian kawasan	Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2036
II.4	Pemantauan dan pengawasan untuk menjaga kelestarian kawasan	Kawasan Perkotaan Pagar Alam.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda	Tahun 2017-2036
II.5	Pengembangan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi Tinggi	Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai Rantau Dedap (Semendo Darat Laut, Darat Tengah, Darat Ulu Kabupaten Muara Enim).	Bappeda, Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi	Tahun 2017-2036

No	Rencana Pola Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
II.6	Pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian dan perikanan	Kawasan Agropolitan Musi Rawas. Kawasan Agropolitan OKI. Kawasan Agropolitan OKU Timur.	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahun 2017-2026
II.7	Kawasan yang memiliki nilai strategis dalam bidang Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pusat Latihan Tempur Baturaja (dahulu OMIBA).	KODAM, KODIM	Tahun 2022-2031
II.8	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	Kawasan-kawasan strategis di seluruh kawasan	Bappeda PU Cipta Karya APBD Provinsi APBD Kabupaten	Tahun 2017-2022

Rencana pola ruang juga harus sinergi dengan rencana penanganan bencana agar rencana tata ruang yang akan dilaksanakan tidak terdampak bencana dan/atau tidak menyebabkan timbulnya bencana sehingga hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menyebabkan bencana baru.

Dalam Perencanaan Proyeksi 5 tahun ke depan BPBD Provinsi memiliki Beberapa Tahapan Tematik yang terfokus pada keberhasilan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan di Renstra BPBD Provinsi Sumatera Selatan, tahapan tersebut bisa dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penyelarasan Penanggulangan Bencana Sumatera Selatan dengan Perubahan Iklim	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana pada aspek mitigasi, penanganan bencana banjir dan karhutla dalam menghadapi fenomena El Nino	Modernisasi Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Risiko Penanggulangan Bencana	Penguatan Ketahanan Komunitas Berbasis Lokal, Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana	Mewujudkan Indeks Kapasitas Daerah Berkategorikan Tinggi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program

Penanggulangan bencana yang efektif dan terencana dengan baik membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan. Manfaat utama adalah perlindungan nyawa dan pengurangan penderitaan manusia. Dengan adanya sistem peringatan dini yang handal, kesiapsiagaan masyarakat yang meningkat, dan respons tanggap darurat yang cepat dan terkoordinasi, risiko jatuhnya korban jiwa dan luka-luka akibat bencana dapat diminimalkan secara drastis. Selain itu, penanggulangan bencana yang baik memastikan kebutuhan dasar korban bencana, mulai dari tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, hingga layanan kesehatan dan psikososial, sehingga mengurangi dampak traumatis dan mempercepat pemulihan kondisi fisik maupun mental pascabencana. Investasi dalam penanggulangan bencana adalah investasi dalam kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dalam bidang penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan terhadap aset dan infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi baik daerah maupun nasional. Kerusakan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi akibat bencana dapat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial. Upaya mitigasi yang tepat, seperti pembangunan infrastruktur yang resilien dan penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana, dapat mengurangi potensi kerusakan dan kerugian ekonomi yang besar. Selain itu, penanggulangan bencana yang efektif juga mempercepat proses pemulihan ekonomi pascabencana, memungkinkan masyarakat untuk kembali beraktivitas dan pembangunan daerah untuk kembali berjalan.

Seuai dengan Kepmen Nomor: 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang hasil verifikasi , validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah, BPBD Memiliki 2 Program yaitu:

- 1) Program Urusan Pemerintah Daearah Provinsi
- 2) Program Penanggulangan Bencana

2. Uraian Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 program dengan total 11 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional pemerintah daerah melalui 7 kegiatan utama:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan: Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan daerah.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD beserta laporan hasil koordinasinya.
- Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan DPA-SKPD: Memastikan dokumen perubahan RKA dan DPA-SKPD tersusun dengan baik dan sesuai kebutuhan.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Menyusun laporan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Menjamin distribusi gaji

dan tunjangan bagi 122 ASN secara tepat waktu.

- Penyediaan Administrasi Tugas ASN: Menyediakan dokumen pendukung administrasi tugas ASN untuk kelancaran operasional.
- Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan: Menyusun laporan keuangan berkala sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas: Menyediakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya untuk ASN.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai: Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan sesuai tugas dan fungsi.

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Sarana Kantor: Meliputi instalasi listrik, peralatan kantor, rumah tangga, barang cetakan, dan bahan bacaan untuk mendukung kenyamanan kerja.
- Fasilitas Kunjungan Tamu dan Rapat Koordinasi: Menyelenggarakan layanan tamu serta rapat koordinasi untuk mendukung sinergi antar-SKPD.

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah

- Pengadaan Kendaraan Operasional: Menyediakan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas operasional penanggulangan bencana.
- Pengadaan Sarana Prasarana Gedung: Memenuhi kebutuhan sarana pendukung gedung kantor.

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang

- Jasa Surat Menyurat dan Komunikasi: Menjamin kelancaran komunikasi dan layanan surat-menyurat.
- Jasa Pelayanan Umum Kantor: Menyediakan layanan umum

seperti kebersihan dan keamanan kantor.

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- Pemeliharaan Kendaraan dan Gedung: Melakukan pemeliharaan rutin terhadap 45 unit kendaraan dinas, 60 unit peralatan, serta 2 gedung kantor.
- Rehabilitasi Sarana Prasarana: Memastikan sarana prasarana gedung tetap layak dan berfungsi optimal.

2. Program Penanggulangan Bencana

Program ini fokus pada pengurangan risiko bencana dan penanganan darurat melalui 4 kegiatan utama:

2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana: Menghasilkan dokumen kajian risiko bencana yang menjadi acuan kebijakan.
- Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan pemahaman kepada 500 warga dan aparatur di kawasan rawan bencana melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

2.2 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

- Pelatihan Mitigasi Bencana: Meningkatkan kapasitas 120 orang dalam pencegahan dan mitigasi bencana.
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana: Mendistribusikan perlengkapan perlindungan diri kepada keluarga di kawasan rawan bencana.
- Gladi Kesiapsiagaan: Melibatkan warga dan aparatur dalam simulasi penanganan darurat bencana.
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Kontijensi

- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

2.3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Darurat Bencana: Melakukan aksi tanggap darurat dan menyusun laporan respon bencana.
- Pencarian dan Evakuasi Korban: Menyelamatkan korban bencana serta mendistribusikan logistik darurat.
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

2.4 Penataan Sistem Penanggulangan Bencana

- Penyusunan Regulasi: Membuat regulasi pendukung penanggulangan bencana di daerah.
- Penguatan Kelembagaan: Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan lembaga bencana melalui pelatihan dan sertifikasi.
- Koordinasi Pascabencana: Memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan sesuai rencana (R3P).
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi
- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Pengelolaan Bencana dan terwujudnya tatakelola pemerintahan	Menurunnya Risiko Bencana			Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel		
		Meningkatnya Ketahanan Daerah			Indeks Ketahanan Daerah		

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan		Meningkatnya upaya penanggulangan bencana			1. Persentase integrasi Dokumen Kebencanaan dengan Rencana Pembangunan 2. Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana 3. Persentase Penurunan Tingkat Kerentanan Bencana		
		Meningkatnya Penanganan Pra Bencana	Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana	Meningkatnya kualitas Penanganan Pra Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Program Penanggulangan bencana	
					Persentase Penduduk Daerah rawan Bencana yang Medapatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota / Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
					Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyusunan Rencana Kontinjensi	

					Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
		Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Terpenuhinya Pelayanan saat Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya kualitas Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Program Penanggulangan bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ ResponCepatBencanaNon ALam Epidemi/Wabah Penyakit	
					Jumlah Laporan PelaksanaanRespon Cepat Penanganan DaruratBencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana	Terpenuhinya Pelayanan Pasca Bencana	Meningkatnya kualitas Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Program Penanggulangan bencana/Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan	

						Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penagwasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

		Meningkatnya Kualitas Dokumen Kebencanaan	Sinkronisasi Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keterkaitan Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dinyatakan Sah/Legal	Program Penanggulangan bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	
					Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota /Penyusunan Kajian Risiko Bencana	
		Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Kendaraan operasional Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

	BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	18.205.506.427	100%	21.460.827.000	100%	19.748.328.120	100%	25.672.826.556	100%	33.374.674.523	100%	43.387.076.880	100%	56.403.199.944		
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	193.212.101	-	220.000.000	-	302.000.000	-	392.600.000	-	510.380.000	-	663.494.000	-	862.542.200		
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Rp 79.940.000,00	1 Laporan	Rp 150.000.000,00	1 Laporan	149.000.000	1 Laporan	Rp 193.700.000,00	1 Laporan	Rp 251.810.000,00	1 Laporan	Rp 327.353.000,00	1 Laporan	Rp 425.558.900,00		
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Rp 14.803.000,00	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	Rp 19.500.000,00	1 Dokumen	Rp 25.350.000,00	1 Dokumen	Rp 32.955.000,00	1 Dokumen	Rp 42.841.500,00		

		Dokumen RKA-SKPD															
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -		
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 19.920.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	Rp 19.500.000,00	1 Dokumen	Rp 25.350.000,00	1 Dokumen	Rp 32.955.000,00	1 Dokumen	Rp 42.841.500,00		
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	Rp 10.000.000,00	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp -		
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp 78.549.101,00	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	Rp 110.500.000,00	1 Laporan	Rp 143.650.000,00	1 Laporan	Rp 186.745.000,00	1 Laporan	Rp 242.768.500,00		

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan		2 Laporan	38.000.000	2 Laporan	Rp 49.400.000,00	2 Laporan	Rp 64.220.000,00	2 Laporan	Rp 83.486.000,00	2 Laporan	Rp 108.531.800,00		
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	13.084.639.575	-	15.938.176.000	-	15.388.798.533	-	20.005.438.093	-	26.007.069.521	-	33.809.190.377	-	43.951.947.490		
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.833.655.176,00	122 Orang	Rp 12.136.454.000,00	122 Orang	13.602.933.973	122 Orang	Rp 17.683.814.164,90	122 Orang	Rp 22.988.958.414,37	122 Orang	Rp 29.885.645.938,68	122 Orang	Rp 38.851.339.720,29		
Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 3.151.091.000,00	28 Orang	Rp 3.701.722.000,00	28 Orang	1.685.864.560	28 Orang	Rp 2.191.623.928,00	28 Orang	Rp 2.849.111.106,40	28 Orang	Rp 3.703.844.438,32	28 Orang	Rp 4.814.997.769,82		

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 99.893.399,00	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	Rp 130.000.000,00	1 Laporan	Rp 169.000.000,00	1 Laporan	Rp 219.700.000,00	1 Laporan	Rp 285.610.000,00		
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	130.000.000	-	361.651.000	-	150.000.000	-	195.000.000	-	253.500.000	-	329.550.000	-	428.415.000		
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	Rp 150.000.000,00	1 Paket		1 Paket	Rp -	1 Paket	Rp -	1 Paket	Rp -	1 Paket	Rp -		
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 130.000.000,00	50 Orang	Rp 211.651.000,00	50 Orang	150.000.000	50 Orang	Rp 195.000.000,00	50 Orang	Rp 253.500.000,00	50 Orang	Rp 329.550.000,00	50 Orang	Rp 428.415.000,00	Pendidikan yang berkeadilan	
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	2.033.758.304	-	2.000.000.000	-	1.619.529.587	-	2.105.388.463	-	2.737.005.002	-	3.558.106.503	-	4.625.538.453		

Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 149.396.800,00	1 Paket	Rp 100.000.000,00	1 Paket	130.000.000	1 Paket	Rp 169.000.000,00	1 Paket	Rp 219.700.000,00	1 Paket	Rp 285.610.000,00	1 Paket	Rp 371.293.000,00		
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 642.007.000,00	1 Paket	Rp 400.000.000,00	1 Paket	479.529.587	1 Paket	Rp 623.388.463,10	1 Paket	Rp 810.405.002,03	1 Paket	Rp 1.053.526.502,64	1 Paket	Rp 1.369.584.453,43		
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 124.998.000,00	1 Paket	Rp 100.000.000,00	1 Paket	100.000.000	1 Paket	Rp 130.000.000,00	1 Paket	Rp 169.000.000,00	1 Paket	Rp 219.700.000,00	1 Paket	Rp 285.610.000,00		
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 249.617.500,00	1 Paket	Rp 200.000.000,00	1 Paket	200.000.000	1 Paket	Rp 260.000.000,00	1 Paket	Rp 338.000.000,00	1 Paket	Rp 439.400.000,00	1 Paket	Rp 571.220.000,00		
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 79.920.000,00	1 Paket	Rp 100.000.000,00	1 Paket	80.000.000	1 Paket	Rp 104.000.000,00	1 Paket	Rp 135.200.000,00	1 Paket	Rp 175.760.000,00	1 Paket	Rp 228.488.000,00		
Sub Kegiatan	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 89.800.000,00	1 Laporan	Rp 200.000.000,00	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	Rp 162.500.000,00	1 Laporan	Rp 211.250.000,00	1 Laporan	Rp 274.625.000,00	1 Laporan	Rp 357.012.500,00		
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 698.019.004,00	1 Laporan	Rp 900.000.000,00	1 Laporan	505.000.000	1 Laporan	Rp 656.500.000,00	1 Laporan	Rp 853.450.000,00	1 Laporan	Rp 1.109.485.000,00	1 Laporan	Rp 1.442.330.50		

		SKPD													0,00		
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	352.000.000	-	1.610.000.000	-	65.000.000	-	84.500.000	-	109.850.000	-	142.805.000	-	185.646.500		
Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan operasional Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp 352.000.000,00	1 Unit	Rp 370.000.000,00	1 Unit	65.000.000	1 Unit	Rp 84.500.000,00	1 Unit	Rp 109.850.000,00	1 Unit	Rp 142.805.000,00	1 Unit	Rp 185.646.500,00		
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Paket	Rp 1.240.000.000,00	1 Paket		1 Paket	Rp -	1 Paket	Rp -	1 Paket	Rp -	1 Paket	Rp -		
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	666.868.936	-	1.020.000.000	-	813.000.000	-	1.056.900.000	-	1.373.970.000	-	1.786.161.000	-	2.322.009.300		
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 114.996.000,00	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	Rp 130.000.000,00	1 Laporan	Rp 169.000.000,00	1 Laporan	Rp 219.700.000,00	1 Laporan	Rp 285.610.000,00		
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Rp 535.472.936,00	1 Laporan	Rp 900.000.000,00	1 Laporan	693.000.000	1 Laporan	Rp 900.900.000,00	1 Laporan	Rp 1.171.170.000,00	1 Laporan	Rp 1.522.521.000,00	1 Laporan	Rp 1.979.277.300,00		

		Disediakan															
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 16.400.000,00	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	Rp 26.000.000,00	1 Laporan	Rp 33.800.000,00	1 Laporan	Rp 43.940.000,00	1 Laporan	Rp 57.122.000,00		
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	2.097.027.511	-	1.921.000.000	-	1.410.000.000	-	1.833.000.000	-	2.382.900.000	-	3.097.770.000	-	4.027.101.000		
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 1.276.847.650,00	45 Unit	Rp 1.000.000.000,00	45 Unit	1.000.000.000	45 Unit	Rp 1.300.000.000,00	45 Unit	Rp 1.690.000.000,00	45 Unit	Rp 2.197.000.000,00	45 Unit	Rp 2.856.100.000,00		
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 395.306.233,00	60 Unit	Rp 200.000.000,00	60 Unit	300.000.000	60 Unit	Rp 390.000.000,00	60 Unit	Rp 507.000.000,00	60 Unit	Rp 659.100.000,00	60 Unit	Rp 856.830.000,00		
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 424.873.628,48	2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung	Rp -	2 Gedung	Rp -	2 Gedung	Rp -	2 Gedung	Rp -		
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		4 Gedung	Rp 721.000.000,00	4 Gedung	110.000.000	4 Gedung	Rp 143.000.000,00	4 Gedung	Rp 185.900.000,00	4 Gedung	Rp 241.670.000,00	4 Gedung	Rp 314.171.000,00		

	Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													00		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Rp 16.778.980.770,00	Rp -	Rp 12.302.291.387,00	Rp -	Rp 6.510.209.000,00	Rp -	Rp 11.264.500.000,00	Rp -	Rp 14.643.850.000,00	Rp -	Rp 19.037.005.000,00	Rp -	Rp 24.748.106.500,00		
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana															
		Persentase Penanganan Pasca Bencana															
		Persentase Penanganan Pra Bencana															
KEGIATAN	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Penduduk Daerah rawan Bencana yang Medapatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	1.849.180.743	-	1.700.000.000	-	1.685.000.000	-	2.190.500.000	-	2.847.650.000	-	3.701.945.000	-	4.812.528.500		
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -		

SUB. KEGIATAN	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Rp 1.849.180.743,0 0	500 Orang	Rp 1.700.000.000 ,00	500 Orang	1.685.000.0 00	500 Orang	Rp 2.190.500.0 00,00	500 Orang	Rp 2.847.650.0 00,00	500 Orang	Rp 3.701.9 45.000, 00	500 Orang	Rp 4.81 2.52 8.50 0,00	Pendi dikan yang berke adilan	Pelestaria n Lingkunga n dan Pengelola an Sampah
KEGIATAN	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulanga n Bencana	10.473.666.150	-	6.878.194.258	-	2.015.209.0 00	-	6.266.000.0 00	-	8.145.800.0 00	-	10.589. 540.000	-	13.7 66.4 02.0 00		
SUB. KEGIATAN	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan				1 Laporan			Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		

		menghadapi bencana															
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																
SUB. KEGIATAN	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Rp 598.031.624,00	2 Laporan	Rp 600.000.000,00	2 Laporan	600.000.000	2 Laporan	Rp 780.000.000,00	2 Laporan	Rp 1.014.000.000,00	2 Laporan	Rp 1.318.200.000,00	2 Laporan	Rp 1.713.660.000,00		
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi						100.000.000										

SUB. KEGIATAN	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas		1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -		
	Pengelolaan Risiko Bencana																
SUB. KEGIATAN	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				1 Kegiatan		1 Kegiatan	Rp -	1 Kegiatan	Rp -	1 Kegiatan	Rp -	1 Kegiatan	Rp -	Pendidikan yang berkeadilan	
SUB. KEGIATAN	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp 3.117.762.500,00	1 paket	Rp 461.260.000,00	1 paket	915.209.000	1 paket	Rp 1.189.771.700,00	1 paket	Rp 1.546.703.210,00	1 paket	Rp 2.010.714.173,00	1 paket	Rp 2.613.928.424,90		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																

SUB. KEGIATAN	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				120 Orang	400.000.000	120 Orang	Rp 520.000.000,00	120 Orang	Rp 676.000.000,00	120 Orang	Rp 878.800.000,00	120 Orang	Rp 1.142.440.000,00		
KEGIATAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	3.900.875.304	-	3.104.097.129	-	2.160.000.000	-	2.743.000.000	-	3.565.900.000	-	4.635.670.000	-	6.026.371.000		
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi																
SUB. KEGIATAN	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan	Rp 16.550.000,00	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	Rp 65.000.000,00	1 Laporan	Rp 84.500.000,00	1 Laporan	Rp 109.850.000,00	1 Laporan	Rp 142.805.000,00		

		Evakuasi Korban Bencana													00		
SUB. KEGIATAN	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			Rp 50.000.000,00	1 Laporan		1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -		
SUB. KEGIATAN	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 2.100.106.969,00	1 Laporan	Rp 1.004.097.129,00	1 Laporan	925.000.000	1 Laporan	Rp 1.202.500.000,00	1 Laporan	Rp 1.563.250.000,00	1 Laporan	Rp 2.032.225.000,00	1 Laporan	Rp 2.641.892.500,00	Revitalisasi Pasar Tradisional	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
SUB. KEGIATAN	Respon Cepat Darurat Bencana Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp 3.893.610.304,00	1 Laporan	Rp 2.000.000.000,00	1 Laporan	1.135.000.000	1 Laporan	Rp 1.475.500.000,00	1 Laporan	Rp 1.918.150.000,00	1 Laporan	Rp 2.493.595.000,00	1 Laporan	Rp 3.241.673.500,00		
SUB. KEGIATAN	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp 7.265.000,00	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	Rp 65.000.000,00	1 Laporan	Rp 84.500.000,00	1 Laporan	Rp 109.850.000,00	1 Laporan	Rp 142.805.000,00		
KEGIATAN	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan masyarakat di wilayah pasca bencana	555.258.573	-	620.000.000	-	650.000.000	-	65.000.000	-	84.500.000	-	109.850.000	-	142.805.000		
SUB. KEGIATAN	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap				1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	Rp 130.000.000,00	1 Laporan	Rp 169.000.000,00	1 Laporan	Rp 219.700.000,00	1 Laporan	Rp 285.610.000,00		

		Bencana Alam													00		
SUB. KEGIATAN	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Rp 199.976.998,00	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	Rp 130.000.000,00	1 Dokumen	Rp 169.000.000,00	1 Dokumen	Rp 219.700.000,00	1 Dokumen	Rp 285.610.000,00		
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota																
SUB. KEGIATAN	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Rp 147.191.282,00	1 Kegiatan	Rp 100.000.000,00	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	Rp 260.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 338.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 439.400.000,00	1 Kegiatan	Rp 571.220.000,00		

	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Rp 147.191.282,00	1 Kegiatan	Rp 100.000.000,00	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	Rp 260.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 338.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 439.400.000,00	1 Kegiatan	Rp 571.220.000,00	Infrast ruktur Tuntas Merat a	Pembang unan 3 Juta Rumah
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana provinsi																
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi																
	Fasilitasi dan Koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)																

SUB. KEGIATAN	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		1 Dokumen	Rp 100.000.000,0 0	1 Dokume n		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokume n	Rp -	1 Dokumen	Rp -		
SUB. KEGIATAN	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokume n			Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
SUB. KEGIATAN	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokume n		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokume n	Rp -	1 Dokumen	Rp -		
SUB. KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Rp 518.000.000,00	50 Orang	Rp 400.000.000,0 0	50 Orang		50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp -		
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Laporan		1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -		

SUB. KEGIATAN	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Rp 37.258.573,00	1 Laporan	Rp 120.000.000,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	Rp 65.000.000,00	1 Laporan	Rp 84.500.000,00	1 Laporan	Rp 109.850.000,00	1 Laporan	Rp 142.805.000,00		
SUB. KEGIATAN	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penagwasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan		1 Laporan	Rp -		Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -		
	Total		34.984.487.197		33.763.118.387		26.258.537.120		36.937.326.556		48.018.524.523		62.424.081.880		81.151.306.444	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	18.205.506.427	100%	21.460.827.000	100%	20.848.328.120	100%	26.222.826.556	100%	34.089.674.523	100%	44.316.576.880	100%	57.611.549.944	
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	193.212.101	-	220.000.000	-	302.000.000	-	392.600.000	-	510.380.000	-	663.494.000	-	862.542.200	
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 79.940.000,00	1 Laporan	Rp 150.000.000,00	1 Laporan	149.000.000	1 Laporan	Rp 193.700.000,00	1 Laporan	Rp 251.810.000,00	1 Laporan	Rp 327.353.000,00	1 Laporan	Rp 425.558.900,00	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 14.803.000,00	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	Rp 19.500.000,00	1 Dokumen	Rp 25.350.000,00	1 Dokumen	Rp 32.955.000,00	1 Dokumen	Rp 42.841.500,00	

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 19.920.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	Rp 19.500.000,00	1 Dokumen	Rp 25.350.000,00	1 Dokumen	Rp 32.955.000,00	1 Dokumen	Rp 42.841.500,00	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	Rp 10.000.000,00	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp -	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 78.549.101,00	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	Rp 110.500.000,00	1 Laporan	Rp 143.650.000,00	1 Laporan	Rp 186.745.000,00	1 Laporan	Rp 242.768.500,00	

Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan		2 Laporan	38.000.000	2 Laporan	Rp 49.400.000,00	2 Laporan	Rp 64.220.000,00	2 Laporan	Rp 83.486.000,00	2 Laporan	Rp 108.531.800,00	
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	13.084.639.575	-	15.938.176.000	-	15.388.798.533	-	20.005.438.093	-	26.007.069.521	-	33.809.190.377	-	43.951.947.490	
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	#####	122 Orang	#####	122 Orang	13.602.933.973	122 Orang	#####	122 Orang	#####	122 Orang	Rp 29.885.645.938,68	122 Orang	#####	
Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	#####	28 Orang	Rp3.701.722.000,00	28 Orang	1.685.864.560	28 Orang	#####	28 Orang	Rp 2.849.111.106,40	28 Orang	Rp 3.703.844.438,32	28 Orang	#####	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 99.893.399,00	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	Rp 130.000.000,00	1 Laporan	Rp 169.000.000,00	1 Laporan	Rp 219.700.000,00	1 Laporan	Rp 285.610.000,00	
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	130.000.000	-	361.651.000	-	150.000.000	-	445.000.000	-	578.500.000	-	752.050.000	-	977.665.000	
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	Rp 150.000.000,00	1 Paket		1 Paket	Rp 250.000.000,00	1 Paket	Rp 325.000.000,00	1 Paket	Rp 422.500.000,00	1 Paket	Rp 549.250.000,00	
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 130.000.000,00	50 Orang	Rp 211.651.000,00	50 Orang	150.000.000	50 Orang	Rp 195.000.000,00	50 Orang	Rp 253.500.000,00	50 Orang	Rp 329.550.000,00	50 Orang	Rp 428.415.000,00	
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	2.033.758.304	-	2.000.000.000	-	1.619.529.587	-	2.105.388.463	-	2.737.005.002	-	3.558.106.503	-	4.625.538.453	
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 149.396.800,00	1 Paket	Rp 100.000.000,00	1 Paket	130.000.000	1 Paket	Rp 169.000.000,00	1 Paket	Rp 219.700.000,00	1 Paket	Rp 285.610.000,00	1 Paket	Rp 371.293.000,00	

Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 642.007.000,00	1 Paket	Rp 400.000.000,00	1 Paket	479.529.587	1 Paket	Rp 623.388.463,10	1 Paket	Rp 810.405.002,03	1 Paket	Rp 1.053.526.502,64	1 Paket	#####	
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 124.998.000,00	1 Paket	Rp 100.000.000,00	1 Paket	100.000.000	1 Paket	Rp 130.000.000,00	1 Paket	Rp 169.000.000,00	1 Paket	Rp 219.700.000,00	1 Paket	Rp 285.610.000,00	
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 249.617.500,00	1 Paket	Rp 200.000.000,00	1 Paket	200.000.000	1 Paket	Rp 260.000.000,00	1 Paket	Rp 338.000.000,00	1 Paket	Rp 439.400.000,00	1 Paket	Rp 571.220.000,00	
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 79.920.000,00	1 Paket	Rp 100.000.000,00	1 Paket	80.000.000	1 Paket	Rp 104.000.000,00	1 Paket	Rp 135.200.000,00	1 Paket	Rp 175.760.000,00	1 Paket	Rp 228.488.000,00	
Sub Kegiatan	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 89.800.000,00	1 Laporan	Rp 200.000.000,00	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	Rp 162.500.000,00	1 Laporan	Rp 211.250.000,00	1 Laporan	Rp 274.625.000,00	1 Laporan	Rp 357.012.500,00	
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 698.019.004,00	1 Laporan	Rp 900.000.000,00	1 Laporan	505.000.000	1 Laporan	Rp 656.500.000,00	1 Laporan	Rp 853.450.000,00	1 Laporan	Rp 1.109.485.000,00	1 Laporan	#####	
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	352.000.000	-	1.610.000.000	-	1.165.000.000	-	384.500.000	-	499.850.000	-	649.805.000	-	844.746.500	
Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan operasional Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp 352.000.000,00	1 Unit	Rp 370.000.000,00	1 Unit	65.000.000	1 Unit	Rp 84.500.000,00	1 Unit	Rp 109.850.000,00	1 Unit	Rp 142.805.000,00	1 Unit	Rp 185.646.500,00	
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Paket	Rp1.240.000.000,00	1 Paket	1.100.000.000	1 Paket	Rp 300.000.000,00	1 Paket	Rp 390.000.000,00	1 Paket	Rp 507.000.000,00	1 Paket	Rp 659.100.000,00	
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	666.868.936	-	1.020.000.000	-	813.000.000	-	1.056.900.000	-	1.373.970.000	-	1.786.161.000	-	2.322.009.300	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 114.996.000,00	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	Rp 130.000.000,00	1 Laporan	Rp 169.000.000,00	1 Laporan	Rp 219.700.000,00	1 Laporan	Rp 285.610.000,00	

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 535.472.936,00	1 Laporan	Rp 900.000.000,00	1 Laporan	693.000.000	1 Laporan	Rp 900.900.000,00	1 Laporan	Rp 1.171.170.000,00	1 Laporan	Rp 1.522.521.000,00	1 Laporan	#####	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 16.400.000,00	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	Rp 26.000.000,00	1 Laporan	Rp 33.800.000,00	1 Laporan	Rp 43.940.000,00	1 Laporan	Rp 57.122.000,00	
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	2.097.027.511	-	1.921.000.000	-	1.410.000.000	-	1.833.000.000	-	2.382.900.000	-	3.097.770.000	-	4.027.101.000	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	#####	45 Unit	Rp1.000.000.000,00	45 Unit	1.000.000.000	45 Unit	#####	45 Unit	Rp 1.690.000.000,00	45 Unit	Rp 2.197.000.000,00	45 Unit	#####	
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 395.306.233,00	60 Unit	Rp 200.000.000,00	60 Unit	300.000.000	60 Unit	Rp 390.000.000,00	60 Unit	Rp 507.000.000,00	60 Unit	Rp 659.100.000,00	60 Unit	Rp 856.830.000,00	
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 424.873.628,48	2 Gedung		2 Gedung	110.000.000	2 Gedung	Rp 143.000.000,00	2 Gedung	Rp 185.900.000,00	2 Gedung	Rp 241.670.000,00	2 Gedung	Rp 314.171.000,00	
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Gedung	Rp 721.000.000,00	4 Gedung		4 Gedung	Rp -	4 Gedung	Rp -	4 Gedung	Rp -	4 Gedung	Rp -	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	#####	Rp -	#####	Rp -	#####	Rp -	#####	Rp -	#####	Rp -	Rp 20.405.905.000,00	Rp -	#####	
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana														
		Persentase Penanganan Pasca Bencana														
		Persentase Penanganan Pra Bencana														

KEGIATAN	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Penduduk Daerah rawan Bencana yang Medapatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	1.849.180.743	-	1.700.000.000	-	1.885.000.000	-	2.450.500.000	-	3.185.650.000	-	4.141.345.000	-	5.383.748.500	
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan		1 Dokumen		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	Rp 260.000.000,00	1 Dokumen	Rp 338.000.000,00	1 Dokumen	Rp 439.400.000,00	1 Dokumen	Rp 571.220.000,00	
SUB. KEGIATAN	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	#####	500 Orang	Rp1.700.000.000,00	500 Orang	1.685.000.000	500 Orang	#####	500 Orang	Rp 2.847.650.000,00	500 Orang	Rp 3.701.945.000,00	500 Orang	#####	
KEGIATAN	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	10.473.666.150	-	6.878.194.258	-	600.000.000	-	6.371.000.000	-	8.282.300.000	-	10.766.990.000	-	13.997.087.000	
SUB. KEGIATAN	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Laporan			Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana															

SUB. KEGIATAN	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Rp 598.031.624,00	2 Laporan	Rp 600.000.000,00	2 Laporan	600.000.000	2 Laporan	Rp 780.000.000,00	2 Laporan	Rp 1.014.000.000,00	2 Laporan	Rp 1.318.200.000,00	2 Laporan	#####	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi						200.000.000									
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas		1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	1 Dokumen	Rp 260.000.000,00	1 Dokumen	Rp 338.000.000,00	1 Dokumen	Rp 439.400.000,00	
	Pengelolaan Risiko Bencana															
SUB. KEGIATAN	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				1 Kegiatan		1 Kegiatan	Rp 150.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 195.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 253.500.000,00	1 Kegiatan	Rp 329.550.000,00	
SUB. KEGIATAN	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	#####	1 paket	Rp 461.260.000,00	1 paket	915.209.000	1 paket	#####	1 paket	Rp 1.546.703.210,00	1 paket	Rp 2.010.714.173,00	1 paket	#####	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															

SUB. KEGIATAN	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				120 Orang	100.000.000	120 Orang	Rp 130.000.000,00	120 Orang	Rp 169.000.000,00	120 Orang	Rp 219.700.000,00	120 Orang	Rp 285.610.000,00	
KEGIATAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	3.900.875.304	-	3.104.097.129	-	2.110.000.000	-	2.793.000.000	-	3.630.900.000	-	4.720.170.000	-	6.136.221.000	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas															
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi															
SUB. KEGIATAN	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 16.550.000,00	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	Rp 65.000.000,00	1 Laporan	Rp 84.500.000,00	1 Laporan	Rp 109.850.000,00	1 Laporan	Rp 142.805.000,00	
SUB. KEGIATAN	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			Rp 50.000.000,00	1 Laporan		1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	Rp 65.000.000,00	1 Laporan	Rp 84.500.000,00	1 Laporan	Rp 109.850.000,00	

SUB. KEGIATAN	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	#####	1 Laporan	Rp1.004.097.129,00	1 Laporan	925.000.000	1 Laporan	#####	1 Laporan	Rp 1.563.250.000,00	1 Laporan	Rp 2.032.225.000,00	1 Laporan	#####	
SUB. KEGIATAN	Respon Cepat Darurat Bencana Provinsi	Jumlah Laporan PelaksanaanRespon Cepat Penanganan DaruratBencana	#####	1 Laporan	Rp2.000.000.000,00	1 Laporan	1.135.000.000	1 Laporan	#####	1 Laporan	Rp 1.918.150.000,00	1 Laporan	Rp 2.493.595.000,00	1 Laporan	#####	
SUB. KEGIATAN	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp 7.265.000,00	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	Rp 65.000.000,00	1 Laporan	Rp 84.500.000,00	1 Laporan	Rp 109.850.000,00	1 Laporan	Rp 142.805.000,00	
KEGIATAN	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan masyarakat di wilayah pasca bencana	555.258.573	-	620.000.000	-	200.000.000	-	460.000.000	-	598.000.000	-	777.400.000	-	1.010.620.000	
SUB. KEGIATAN	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	Rp 130.000.000,00	1 Laporan	Rp 169.000.000,00	1 Laporan	Rp 219.700.000,00	1 Laporan	Rp 285.610.000,00	
SUB. KEGIATAN	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Rp 199.976.998,00	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	Rp 130.000.000,00	1 Dokumen	Rp 169.000.000,00	1 Dokumen	Rp 219.700.000,00	1 Dokumen	Rp 285.610.000,00	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota															

SUB. KEGIATAN	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Rp 147.191.282,00	1 Kegiatan	Rp 100.000.000,00	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	Rp 520.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 676.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 878.800.000,00	1 Kegiatan	#####	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana provinsi															
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi															
	Fasilitasi dan Koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)															
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen	Rp 130.000.000,00	1 Dokumen	Rp 169.000.000,00	1 Dokumen	Rp 219.700.000,00	
SUB. KEGIATAN	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen			Rp 100.000.000,00		Rp 130.000.000,00		Rp 169.000.000,00		Rp 219.700.000,00	

SUB. KEGIATAN	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	
SUB. KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Kadaan Darurat Provinsi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Rp 518.000.000,00	50 Orang	Rp 400.000.000,00	50 Orang		50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp -	
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	Rp 195.000.000,00	1 Laporan	Rp 253.500.000,00	1 Laporan	Rp 329.550.000,00	1 Laporan	Rp 428.415.000,00	
SUB. KEGIATAN	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Rp 37.258.573,00	1 Laporan	Rp 120.000.000,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	Rp 65.000.000,00	1 Laporan	Rp 84.500.000,00	1 Laporan	Rp 109.850.000,00	1 Laporan	Rp 142.805.000,00	
SUB. KEGIATAN	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan		1 Laporan	Rp -		Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	
	Total		#####		#####		#####		#####		#####		#####		#####	-
	BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2025			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2026		2027		2028		2029		2030		

				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	1	2	3	-2	5	-4	7	-6	9	-8	11	-10	13	-12	14	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	- 28.825.891.286	-500%	- 29.804.023.765	-900%	- 39.689.909.081	-1300%	- 55.167.881.804	-1700%	- 71.718.246.345	-2100%	- 93.233.720.248	-2500%	- 121.203.836.323	
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	372.651.908	-	- 199.411.765	-	59.069.231	-	76.790.000	-	99.827.000	-	129.775.100	-	168.707.630	
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 56.586.400,95	2 Laporan	Rp 3.529.411,76	2 Laporan	30.707.692	2 Laporan	Rp 39.920.000,00	2 Laporan	Rp 51.896.000,00	2 Laporan	Rp 67.464.800,00	2 Laporan	Rp 87.704.240,00	

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 58.795.301,14	1 Dokumen	-Rp 11.176.470,59	1 Dokumen	23.284.615	1 Dokumen	Rp 30.270.000,00	1 Dokumen	Rp 39.351.000,00	1 Dokumen	Rp 51.156.300,00	1 Dokumen	Rp 66.503.190,00	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 61.004.201,32	1 Dokumen	-Rp 25.882.352,94	1 Dokumen	15.861.538	1 Dokumen	Rp 20.620.000,00	1 Dokumen	Rp 26.806.000,00	1 Dokumen	Rp 34.847.800,00	1 Dokumen	Rp 45.302.140,00	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 63.213.101,51	1 Dokumen	-Rp 40.588.235,29	1 Dokumen	8.438.462	1 Dokumen	Rp 10.970.000,00	1 Dokumen	Rp 14.261.000,00	1 Dokumen	Rp 18.539.300,00	1 Dokumen	Rp 24.101.090,00	

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 65.422.001,69	2 Dokumen	-Rp 55.294.117,65	2 Dokumen	1.015.385	2 Dokumen	Rp 1.320.000,00	2 Dokumen	Rp 1.716.000,00	2 Dokumen	Rp 2.230.800,00	2 Dokumen	Rp 2.900.040,00	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 67.630.901,88	3 Laporan	-Rp 70.000.000,00	3 Laporan	- 6.407.692	3 Laporan	-Rp 8.330.000,00	3 Laporan	-Rp 10.829.000,00	3 Laporan	-Rp 14.077.700,00	3 Laporan	-Rp 18.301.010,00	
Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		4 Laporan	- 13.830.769	4 Laporan	-Rp 17.980.000,00	4 Laporan	-Rp 23.374.000,00	4 Laporan	-Rp 30.386.200,00	4 Laporan	-Rp 39.502.060,00	

Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	- 30.717.288.422	-	- 38.225.867.000	-	- 45.374.404.346	-	- 58.986.725.649	-	- 76.682.743.344	-	- 99.687.566.347	-	- 129.593.836.251	
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	#####	66 Orang	-Rp6.723.728.666,67	66 Orang	- 8.373.334.462	66 Orang	#####	66 Orang	#####	66 Orang	-Rp 18.396.215.813,01	66 Orang	#####	
Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	#####	160 Orang	#####	160 Orang	- 15.124.801.449	160 Orang	#####	160 Orang	#####	160 Orang	-Rp 33.229.188.782,35	160 Orang	#####	

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	#####	2 Laporan	#####	2 Laporan	- 21.876.268.435	2 Laporan	#####	2 Laporan	#####	2 Laporan	-Rp 48.062.161.751,70	2 Laporan	#####	
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	130.000.001	-	608.255.000	-	150.000.001	-	445.000.002	-	578.500.003	-	752.050.004	-	977.665.005	
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	Rp 273.302.000,00	1 Paket		1 Paket	Rp 250.000.001,00	2 Paket	Rp 325.000.001,30	2 Paket	Rp 422.500.001,69	2 Paket	Rp 549.250.002,20	

Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 130.000.001,00	51 Orang	Rp 334.953.000,00	51 Orang	150.000.001	51 Orang	Rp 195.000.001,30	51 Orang	Rp 253.500.001,69	51 Orang	Rp 329.550.002,20	51 Orang	Rp 428.415.002,86	
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	2.902.413.875	-	5.500.000.000	-	2.312.426.033	-	3.006.153.842	-	3.907.999.995	-	5.080.399.993	-	6.604.519.991	
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 361.447.559,43	1 Paket	Rp 571.428.571,43	1 Paket	287.924.345	1 Paket	Rp 374.301.648,13	1 Paket	Rp 486.592.142,57	1 Paket	Rp 632.569.785,34	1 Paket	Rp 822.340.720,94	
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 379.175.224,14	1 Paket	Rp 642.857.142,86	1 Paket	302.065.089	1 Paket	Rp 392.684.615,05	1 Paket	Rp 510.489.999,57	1 Paket	Rp 663.636.999,43	1 Paket	Rp 862.728.099,26	

Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 396.902.888,86	1 Paket	Rp 714.285.714,29	1 Paket	316.205.832	1 Paket	Rp 411.067.581,97	1 Paket	Rp 534.387.856,56	1 Paket	Rp 694.704.213,53	1 Paket	Rp 903.115.477,59	
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 414.630.553,57	1 Paket	Rp 785.714.285,71	1 Paket	330.346.576	1 Paket	Rp 429.450.548,89	1 Paket	Rp 558.285.713,56	1 Paket	Rp 725.771.427,63	1 Paket	Rp 943.502.855,92	
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 432.358.218,29	1 Paket	Rp 857.142.857,14	1 Paket	344.487.320	1 Paket	Rp 447.833.515,81	1 Paket	Rp 582.183.570,56	1 Paket	Rp 756.838.641,73	1 Paket	Rp 983.890.234,24	
Sub Kegiatan	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 450.085.883,00	1 Laporan	Rp 928.571.428,57	1 Laporan	358.628.064	1 Laporan	Rp 466.216.482,74	1 Laporan	Rp 606.081.427,56	1 Laporan	Rp 787.905.855,82	1 Laporan	#####	

Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 467.813.547,71	1 Laporan	Rp1.000.000.000,00	1 Laporan	372.768.807	1 Laporan	Rp 484.599.449,66	1 Laporan	Rp 629.979.284,55	1 Laporan	Rp 818.973.069,92	1 Laporan	#####	
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	352.000.001	-	5.090.000.000	-	5.305.000.000	-	3.075.500.001	-	3.998.150.001	-	5.197.595.002	-	6.756.873.502	
Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan operasional Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp 352.000.001,00	2 Unit	Rp2.110.000.000,00	2 Unit	2.135.000.000	2 Unit	#####	2 Unit	Rp 3.608.150.000,00	2 Unit	Rp 4.690.595.000,00	2 Unit	#####	
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Paket	Rp2.980.000.000,00	2 Paket	3.170.000.000	2 Paket	Rp 300.000.001,00	2 Paket	Rp 390.000.001,30	2 Paket	Rp 507.000.001,69	2 Paket	Rp 659.100.002,20	

Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	223.186.936	-	660.000.000	-	453.000.000	-	588.900.000	-	765.570.000	-	995.241.000	-	1.293.813.300	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 123.693.645,33	1 Laporan	Rp 260.000.000,00	1 Laporan	191.000.000	1 Laporan	Rp 248.300.000,00	1 Laporan	Rp 322.790.000,00	1 Laporan	Rp 419.627.000,00	1 Laporan	Rp 545.515.100,00	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 74.395.645,33	1 Laporan	Rp 220.000.000,00	1 Laporan	151.000.000	1 Laporan	Rp 196.300.000,00	1 Laporan	Rp 255.190.000,00	1 Laporan	Rp 331.747.000,00	1 Laporan	Rp 431.271.100,00	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 25.097.645,33	1 Laporan	Rp 180.000.000,00	1 Laporan	111.000.000	1 Laporan	Rp 144.300.000,00	1 Laporan	Rp 187.590.000,00	1 Laporan	Rp 243.867.000,00	1 Laporan	Rp 317.027.100,00	
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	- 1.736.855.585	-	1.853.000.000	-	- 2.595.000.000	-	- 3.373.500.000	-	- 4.385.550.000	-	- 5.701.215.000	-	- 7.411.579.500	

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-Rp 152.964.851,03	75 Unit	Rp 527.000.000,00	75 Unit	-	420.000.000	75 Unit	-Rp 546.000.000,00	75 Unit	-Rp 709.800.000,00	75 Unit	-Rp 922.740.000,00	75 Unit	#####	
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-Rp 578.951.861,79	90 Unit	Rp 484.500.000,00	90 Unit	-	865.000.000	90 Unit	#####	90 Unit	-Rp1.461.850.000,00	90 Unit	-Rp 1.900.405.000,00	90 Unit	#####	
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	#####	6 Gedung	Rp 442.000.000,00	6 Gedung	-	1.310.000.000	6 Gedung	#####	6 Gedung	-Rp2.213.900.000,00	6 Gedung	-Rp 2.878.070.000,00	6 Gedung	#####	

Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Gedung	Rp 399.500.000,00	8 Gedung		8 Gedung	Rp -	8 Gedung	Rp -	8 Gedung	Rp -	8 Gedung	Rp -	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	#####	Rp -	#####	Rp -	#####	Rp -	#####	Rp -	#####	Rp -	Rp 23.142.018.278,63	Rp -	#####		
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana															
	Persentase Penanganan Pasca Bencana															
	Persentase Penanganan Pra Bencana															

KEGIATAN	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Penduduk Daerah rawan Bencana yang Medapatkan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	1.849.180.744	-	1.700.000.001	-	602.363.801	-	783.072.941	-	1.017.994.824	-	1.323.393.271	-	1.720.411.252	
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan		1 Dokumen		1 Dokumen	319.916.394	2 Dokumen	Rp 415.891.311,67	2 Dokumen	Rp 540.658.705,17	2 Dokumen	Rp 702.856.316,72	2 Dokumen	Rp 913.713.211,74	

SUB. KEGIATAN	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	#####	501 Orang	Rp1.700.000.001,00	501 Orang	282.447.407	501 Orang	Rp 367.181.629,52	501 Orang	Rp 477.336.118,38	501 Orang	Rp 620.536.953,89	501 Orang	Rp 806.698.040,05	
KEGIATAN	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	22.132.193.970	-	17.009.980.466	-	244.978.421	-	8.758.460.886	-	11.385.999.152	-	14.801.798.898	-	19.242.338.567	

SUB. KEGIATAN	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Laporan	207.509.435		Rp 269.762.265,22		Rp 350.690.944,78		Rp 455.898.228,22		Rp 592.667.696,68	
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						170.040.449									

SUB. KEGIATAN	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	#####	3 Laporan	Rp 328.234.736,84	4 Laporan	132.571.462	3 Laporan	Rp 172.342.900,92	3 Laporan	Rp 224.045.771,19	3 Laporan	Rp 291.259.502,55	3 Laporan	Rp 378.637.353,31	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi				Rp 312.184.210,53		95.102.476									

SUB. KEGIATAN	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas		2 Dokumen	Rp 296.133.684,21	1 Dokumen	57.633.490	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	2 Dokumen	Rp 130.000.000,00	2 Dokumen	Rp 169.000.000,00	2 Dokumen	Rp 219.700.000,00	
	Pengelolaan Risiko Bencana				Rp 280.083.157,89		20.164.503									
SUB. KEGIATAN	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi	Jumlah personel TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana			Rp 264.032.631,58	1 Kegiatan	- 17.304.483	1 Kegiatan	Rp 50.000.000,00	2 Kegiatan	Rp 65.000.000,00	2 Kegiatan	Rp 84.500.000,00	2 Kegiatan	Rp 109.850.000,00	

SUB. KEGIATAN	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	#####	2 paket	Rp 247.982.105,26	2 paket	- 54.773.469	2 paket	-Rp 71.205.509,84	2 paket	-Rp 92.567.162,79	2 paket	-Rp 120.337.311,63	2 paket	-Rp 156.438.505,12	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						- 92.242.455									

SUB. KEGIATAN	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				121 Orang	-	129.711.442	121 Orang	-Rp 168.624.874,14	121 Orang	-Rp 219.212.336,38	121 Orang	-Rp 284.976.037,30	121 Orang	-Rp 370.468.848,49	
KEGIATAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	6.395.419.330	-	6.813.277.703	-	3.588.000.000	-	3.680.900.001	-	4.785.170.001	-	6.220.721.002	-	8.086.937.302		
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi																

SUB. KEGIATAN	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	#####	1 Laporan	Rp1.215.819.425,80	1 Laporan	727.000.000	1 Laporan	Rp 945.100.000,00	1 Laporan	Rp 1.228.630.000,00	1 Laporan	Rp 1.597.219.000,00	1 Laporan	#####	
SUB. KEGIATAN	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	2.520.379.026		Rp1.410.819.425,80	1 Laporan	795.000.000	1 Laporan	Rp 50.000.001,00	1 Laporan	Rp 65.000.001,30	1 Laporan	Rp 84.500.001,69	1 Laporan	Rp 109.850.002,20	
SUB. KEGIATAN	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	#####	1 Laporan	Rp1.605.819.425,80	1 Laporan	863.000.000	1 Laporan	#####	1 Laporan	Rp 1.458.470.000,00	1 Laporan	Rp 1.896.011.000,00	1 Laporan	#####	

SUB. KEGIATAN	Respon Cepat Darurat Bencana Provinsi	Jumlah Laporan PelaksanaanRespon Cepat Penanganan DaruratBencana	#####	1 Laporan	Rp1.800.819.425,80	1 Laporan	931.000.000	1 Laporan	#####	1 Laporan	Rp 1.573.390.000,00	1 Laporan	Rp 2.045.407.000,00	1 Laporan	#####	
SUB. KEGIATAN	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	#####	1 Laporan	Rp1.995.819.425,80	1 Laporan	999.000.000	1 Laporan	#####	1 Laporan	Rp 1.688.310.000,00	1 Laporan	Rp 2.194.803.000,00	1 Laporan	#####	
KEGIATAN	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan masyarakat di wilayah pasca bencana	1.780.218.230	-	2.167.605.634	-	348.529.412	-	471.068.111	-	612.388.545	-	796.105.108	-	1.034.936.641	
SUB. KEGIATAN	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				2 Laporan	114.705.882	2 Laporan	Rp 149.117.647,06	2 Laporan	Rp 193.852.941,18	2 Laporan	Rp 252.008.823,53	2 Laporan	Rp 327.611.470,59	

SUB. KEGIATAN	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Rp 256.415.120,79	2 Dokumen	Rp 248.732.394,37	2 Dokumen	108.746.130	2 Dokumen	Rp 141.369.969,04	2 Dokumen	Rp 183.780.959,75	2 Dokumen	Rp 238.915.247,68	2 Dokumen	Rp 310.589.821,98	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota		Rp 261.154.875,79		Rp 261.971.830,99		102.786.378									

SUB. KEGIATAN	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Rp 265.894.630,80	2 Kegiatan	Rp 275.211.267,61	2 Kegiatan	96.826.625	2 Kegiatan	Rp 125.874.613,00	2 Kegiatan	Rp 163.636.996,90	2 Kegiatan	Rp 212.728.095,98	2 Kegiatan	Rp 276.546.524,77	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana provinsi		Rp 270.634.385,81		Rp 288.450.704,23		90.866.873									
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi		Rp 275.374.140,81		Rp 301.690.140,85		84.907.121									
	Fasilitasi dan Koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)		Rp 280.113.895,82		Rp 314.929.577,46		78.947.368									

SUB. KEGIATAN	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Rp 284.853.650,82	2 Dokumen	Rp 328.169.014,08	1 Dokumen	72.987.616	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen	Rp 130.000.000,00	1 Dokumen	Rp 169.000.000,00	1 Dokumen	Rp 219.700.000,00	
SUB. KEGIATAN	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Rp 289.593.405,83		Rp 341.408.450,70	1 Dokumen	67.027.864		Rp 100.000.000,00		Rp 130.000.000,00		Rp 169.000.000,00		Rp 219.700.000,00	
SUB. KEGIATAN	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Rp 294.333.160,84		Rp 354.647.887,32	1 Dokumen	61.068.111	1 Dokumen	Rp 79.388.544,89	1 Dokumen	Rp 103.205.108,36	1 Dokumen	Rp 134.166.640,87	1 Dokumen	Rp 174.416.633,13	

SUB. KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Rp 299.072.915,84	51 Orang	Rp 367.887.323,94	50 Orang	55.108.359	50 Orang	Rp 71.640.866,87	51 Orang	Rp 93.133.126,93	51 Orang	Rp 121.073.065,02	51 Orang	Rp 157.394.984,52	
SUB. KEGIATAN	Penyusunan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Rp 303.812.670,85		Rp 381.126.760,56	1 Laporan	49.148.607	1 Laporan	Rp 63.893.188,85	1 Laporan	Rp 83.061.145,51	1 Laporan	Rp 107.979.489,16	1 Laporan	Rp 140.373.335,91	

SUB. KEGIATAN	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Rp 308.552.425,85	2 Laporan	Rp 394.366.197,18	1 Laporan	43.188.854	1 Laporan	Rp 56.145.510,84	1 Laporan	Rp 72.989.164,09	1 Laporan	Rp 94.885.913,31	1 Laporan	Rp 123.351.687,31	
SUB. KEGIATAN	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan		1 Laporan	Rp -		Rp -	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	
	Total		#####		#####		#####		#####		#####		#####		#####	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		18.205.506.427	-	19.458.403.000	-	27.499.268.520	-	35.749.049.076	-	46.473.763.799	-	60.415.892.938	-	78.540.660.820	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		193.212.101	-	220.000.000	-	550.000.000	-	715.000.000	-	929.500.000	-	1.208.350.000	-	1.570.855.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 79.940.000,00	1 Laporan	Rp 150.000.000,00	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	Rp 390.000.000,00	1 Laporan	Rp 507.000.000,00	1 Laporan	Rp 659.100.000,00	1 Laporan	Rp 856.830.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 14.803.000,00	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	Rp 39.000.000,00	1 Dokumen	Rp 50.700.000,00	1 Dokumen	Rp 65.910.000,00	1 Dokumen	Rp 85.683.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	Rp 39.000.000,00	1 Dokumen	Rp 50.700.000,00	1 Dokumen	Rp 65.910.000,00	1 Dokumen	Rp 85.683.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Rp 19.920.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	Rp 39.000.000,00	1 Dokumen	Rp 50.700.000,00	1 Dokumen	Rp 65.910.000,00	1 Dokumen	Rp 85.683.000,00	

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	Rp 10.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	Rp 39.000.000,00	2 Dokumen	Rp 50.700.000,00	2 Dokumen	Rp 65.910.000,00	2 Dokumen	Rp 85.683.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 78.549.101,00	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	Rp 39.000.000,00	1 Laporan	Rp 50.700.000,00	1 Laporan	Rp 65.910.000,00	1 Laporan	Rp 85.683.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan		2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	Rp 130.000.000,00	2 Laporan	Rp 169.000.000,00	2 Laporan	Rp 219.700.000,00	2 Laporan	Rp 285.610.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.084.639.575	-	13.935.752.000	-	16.603.670.616	-	21.584.771.801	-	28.060.203.341	-	36.478.264.343	-	47.421.743.646	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.833.655.176,00	122 Orang	Rp 10.134.030.000,00	122 Orang	13.027.110.616	122 Orang	Rp 16.935.243.800,80	122 Orang	Rp 22.015.816.941,04	122 Orang	Rp 28.620.562.023,35	122 Orang	Rp 37.206.730.630,36	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 3.151.091.000,00	28 Orang	Rp 3.701.722.000,00	28 Orang	3.376.560.000	28 Orang	Rp 4.389.528.000,00	28 Orang	Rp 5.706.386.400,00	28 Orang	Rp 7.418.302.320,00	28 Orang	Rp 9.643.793.016,00	
Koordinasi dan Pemyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 99.893.399,00	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	Rp 260.000.000,00	1 Laporan	Rp 338.000.000,00	1 Laporan	Rp 439.400.000,00	1 Laporan	Rp 571.220.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		130.000.000	-	361.651.000	-	500.000.000	-	650.000.000	-	845.000.000	-	1.098.500.000	-	1.428.050.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	Rp 150.000.000,00	1 Paket	250.000.000	1 Paket	Rp 325.000.000,00	1 Paket	Rp 422.500.000,00	1 Paket	Rp 549.250.000,00	1 Paket	Rp 714.025.000,00	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 130.000.000,00	50 Orang	Rp 211.651.000,00	50 Orang	250.000.000	50 Orang	Rp 325.000.000,00	50 Orang	Rp 422.500.000,00	50 Orang	Rp 549.250.000,00	50 Orang	Rp 714.025.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.033.758.304	-	2.000.000.000	-	2.775.597.904	-	3.608.277.275	-	4.690.760.458	-	6.097.988.595	-	7.927.385.174	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 149.396.800,00	1 Paket	Rp 100.000.000,00	1 Paket	130.000.000	1 Paket	Rp 169.000.000,00	1 Paket	Rp 219.700.000,00	1 Paket	Rp 285.610.000,00	1 Paket	Rp 371.293.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 642.007.000,00	1 Paket	Rp 400.000.000,00	1 Paket	925.597.904	1 Paket	Rp 1.203.277.275,20	1 Paket	Rp 1.564.260.457,76	1 Paket	Rp 2.033.538.595,09	1 Paket	Rp 2.643.600.173,61	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 124.998.000,00	1 Paket	Rp 100.000.000,00	1 Paket	200.000.000	1 Paket	Rp 260.000.000,00	1 Paket	Rp 338.000.000,00	1 Paket	Rp 439.400.000,00	1 Paket	Rp 571.220.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 249.617.500,00	1 Paket	Rp 200.000.000,00	1 Paket	250.000.000	1 Paket	Rp 325.000.000,00	1 Paket	Rp 422.500.000,00	1 Paket	Rp 549.250.000,00	1 Paket	Rp 714.025.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 79.920.000,00	1 Paket	Rp 100.000.000,00	1 Paket	120.000.000	1 Paket	Rp 156.000.000,00	1 Paket	Rp 202.800.000,00	1 Paket	Rp 263.640.000,00	1 Paket	Rp 342.732.000,00	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 89.800.000,00	1 Laporan	Rp 200.000.000,00	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	Rp 325.000.000,00	1 Laporan	Rp 422.500.000,00	1 Laporan	Rp 549.250.000,00	1 Laporan	Rp 714.025.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 698.019.004,00	1 Laporan	Rp 900.000.000,00	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	Rp 1.170.000.000,00	1 Laporan	Rp 1.521.000.000,00	1 Laporan	Rp 1.977.300.000,00	1 Laporan	Rp 2.570.490.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		352.000.000	-	1.610.000.000	-	3.400.000.000	-	4.420.000.000	-	5.746.000.000	-	7.469.800.000	-	9.710.740.000	
Pengadaan Kendaraan operasional Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp 352.000.000,00	1 Unit	Rp 370.000.000,00	1 Unit	1.300.000.000	1 Unit	Rp 1.690.000.000,00	1 Unit	Rp 2.197.000.000,00	1 Unit	Rp 2.856.100.000,00	1 Unit	Rp 3.712.930.000,00	

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Paket	Rp 1.240.000.000,00	1 Paket	2.100.000.000	1 Paket	Rp 2.730.000.000,00	1 Paket	Rp 3.549.000.000,00	1 Paket	Rp 4.613.700.000,00	1 Paket	Rp 5.997.810.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		666.868.936	-	1.020.000.000	-	1.040.000.000	-	1.352.000.000	-	1.757.600.000	-	2.284.880.000	-	2.970.344.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 114.996.000,00	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	Rp 156.000.000,00	1 Laporan	Rp 202.800.000,00	1 Laporan	Rp 263.640.000,00	1 Laporan	Rp 342.732.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 535.472.936,00	1 Laporan	Rp 900.000.000,00	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	Rp 1.170.000.000,00	1 Laporan	Rp 1.521.000.000,00	1 Laporan	Rp 1.977.300.000,00	1 Laporan	Rp 2.570.490.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 16.400.000,00	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	Rp 26.000.000,00	1 Laporan	Rp 33.800.000,00	1 Laporan	Rp 43.940.000,00	1 Laporan	Rp 57.122.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.097.027.511	-	1.921.000.000	-	2.630.000.000	-	3.419.000.000	-	4.444.700.000	-	5.778.110.000	-	7.511.543.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 1.276.847.650,00	45 Unit	Rp 1.000.000.000,00	45 Unit	1.000.000.000	45 Unit	Rp 1.300.000.000,00	45 Unit	Rp 1.690.000.000,00	45 Unit	Rp 2.197.000.000,00	45 Unit	Rp 2.856.100.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 395.306.233,00	60 Unit	Rp 200.000.000,00	60 Unit	350.000.000	60 Unit	Rp 455.000.000,00	60 Unit	Rp 591.500.000,00	60 Unit	Rp 768.950.000,00	60 Unit	Rp 999.635.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 424.873.628,48	2 Gedung		2 Gedung	180.000.000	2 Gedung	Rp 234.000.000,00	2 Gedung	Rp 304.200.000,00	2 Gedung	Rp 395.460.000,00	2 Gedung	Rp 514.098.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Gedung	Rp 721.000.000,00	4 Gedung	1.100.000.000	4 Gedung	Rp 1.430.000.000,00	4 Gedung	Rp 1.859.000.000,00	4 Gedung	Rp 2.416.700.000,00	4 Gedung	Rp 3.141.710.000,00	

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Rp 12.759.107.934,00	Rp -	Rp 6.925.357.129,00	Rp -	Rp 12.919.534.096,00	Rp -	Rp 16.795.394.324,80	Rp -	Rp 21.834.012.622,24	Rp -	Rp 28.384.216.408,91	Rp -	Rp 36.899.481.331,59	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		1.849.180.743	-	1.700.000.000	-	2.350.000.000	-	3.055.000.000	-	3.971.500.000	-	5.162.950.000	-	6.711.835.000	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan		1 Dokumen		1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	Rp 325.000.000,00	1 Dokumen	Rp 422.500.000,00	1 Dokumen	Rp 549.250.000,00	1 Dokumen	Rp 714.025.000,00	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Rp 1.849.180.743,00	500 Orang	Rp 1.700.000.000,00	500 Orang	2.100.000.000	500 Orang	Rp 2.730.000.000,00	500 Orang	Rp 3.549.000.000,00	500 Orang	Rp 4.613.700.000,00	500 Orang	Rp 5.997.810.000,00	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		3.715.794.124	-	1.161.260.000	-	3.450.000.000	-	4.485.000.000	-	5.830.500.000	-	7.579.650.000	-	9.853.545.000	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				120 Orang	300.000.000	120 Orang	Rp 390.000.000,00	120 Orang	Rp 507.000.000,00	120 Orang	Rp 659.100.000,00	120 Orang	Rp 856.830.000,00	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp 3.117.762.500,00	1 paket	Rp 461.260.000,00	1 paket	1.500.000.000	1 paket	Rp 1.950.000.000,00	1 paket	Rp 2.535.000.000,00	1 paket	Rp 3.295.500.000,00	1 paket	Rp 4.284.150.000,00	

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Laporan	200.000.000		Rp 260.000.000,00		Rp 338.000.000,00		Rp 439.400.000,00		Rp 571.220.000,00	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	Rp 195.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 253.500.000,00	1 Kegiatan	Rp 329.550.000,00	1 Kegiatan	Rp 428.415.000,00	
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas		1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	Rp 390.000.000,00	1 Dokumen	Rp 507.000.000,00	1 Dokumen	Rp 659.100.000,00	1 Dokumen	Rp 856.830.000,00	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Rp 598.031.624,00	2 Laporan	Rp 600.000.000,00	2 Laporan	800.000.000	2 Laporan	Rp 1.040.000.000,00	2 Laporan	Rp 1.352.000.000,00	2 Laporan	Rp 1.757.600.000,00	2 Laporan	Rp 2.284.880.000,00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	Rp 260.000.000,00	1 Laporan	Rp 338.000.000,00	1 Laporan	Rp 439.400.000,00	1 Laporan	Rp 571.220.000,00	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		6.017.532.273	-	3.104.097.129	-	4.136.392.000	-	5.377.309.600	-	6.990.502.480	-	9.087.653.224	-	11.813.949.191	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp 3.893.610.304,00	1 Laporan	Rp 2.000.000.000,00	1 Laporan	1.611.392.000	1 Laporan	Rp 2.094.809.600,00	1 Laporan	Rp 2.723.252.480,00	1 Laporan	Rp 3.540.228.224,00	1 Laporan	Rp 4.602.296.691,20	

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 16.550.000,00	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	Rp 97.500.000,00	1 Laporan	Rp 126.750.000,00	1 Laporan	Rp 164.775.000,00	1 Laporan	Rp 214.207.500,00	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 2.100.106.969,00	1 Laporan	Rp 1.004.097.129,00	1 Laporan	2.400.000.000	1 Laporan	Rp 3.120.000.000,00	1 Laporan	Rp 4.056.000.000,00	1 Laporan	Rp 5.272.800.000,00	1 Laporan	Rp 6.854.640.000,00	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp 7.265.000,00	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	Rp 65.000.000,00	1 Laporan	Rp 84.500.000,00	1 Laporan	Rp 109.850.000,00	1 Laporan	Rp 142.805.000,00	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1.176.600.794	-	960.000.000	-	2.983.142.096	-	3.878.084.725	-	5.041.510.142	-	6.553.963.185	-	8.520.152.140	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	Rp 130.000.000,00	1 Dokumen	Rp 169.000.000,00	1 Dokumen	Rp 219.700.000,00	1 Dokumen	Rp 285.610.000,00	
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dilegalikan				1 Dokumen	100.000.000		Rp 130.000.000,00		Rp 169.000.000,00		Rp 219.700.000,00		Rp 285.610.000,00	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	Rp 130.000.000,00	1 Dokumen	Rp 169.000.000,00	1 Dokumen	Rp 219.700.000,00	1 Dokumen	Rp 285.610.000,00	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Laporan	283.142.096	1 Laporan	Rp 368.084.724,80	1 Laporan	Rp 478.510.142,24	1 Laporan	Rp 622.063.184,91	1 Laporan	Rp 808.682.140,39	

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	375.000.000	1 Laporan	Rp 487.500.000,00		Rp 633.750.000,00	1 Laporan	Rp 823.875.000,00	1 Laporan	Rp 1.071.037.500,00	
Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Rp 147.191.282,00	1 Kegiatan	Rp 100.000.000,00	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	Rp 520.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 676.000.000,00	1 Kegiatan	Rp 878.800.000,00	1 Kegiatan	Rp 1.142.440.000,00	
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Rp 199.976.998,00	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	1 Dokumen	375.000.000	1 Dokumen	Rp 487.500.000,00	1 Dokumen	Rp 633.750.000,00	1 Dokumen	Rp 823.875.000,00	1 Dokumen	Rp 1.071.037.500,00	
Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Rp 274.173.941,00	1 Laporan	Rp 140.000.000,00	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	Rp 520.000.000,00	1 Laporan	Rp 676.000.000,00	1 Laporan	Rp 878.800.000,00	1 Laporan	Rp 1.142.440.000,00	
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Rp 518.000.000,00	50 Orang	Rp 400.000.000,00	50 Orang	350.000.000	50 Orang	Rp 455.000.000,00	50 Orang	Rp 591.500.000,00	50 Orang	Rp 768.950.000,00	50 Orang	Rp 999.635.000,00	

Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Rp 37.258.573,00	1 Laporan	Rp 120.000.000,00	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	Rp 650.000.000,00	1 Laporan	Rp 845.000.000,00	1 Laporan	Rp 1.098.500.000,00	1 Laporan	Rp 1.428.050.000,00	
Total		30.964.614.361	-	26.383.760.129	-	40.418.802.616	-	52.544.443.401	-	68.307.776.421	-	88.800.109.347	-	115.440.142.152	-

Tabel 4.
Komponen Belanja Tahun 2025-2030

No	Nomor Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	Pagu Anggaran				
			2026	2027	2.028	2029	2030
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 26.261.537.120	52.968.692.251	56.859.299.926	59.517.089.904	66.372.216.876
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 26.261.537.120	52.968.692.251	56.859.299.926	59.517.089.904	66.372.216.876
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 19.454.936.120	34.930.392.251	39.429.669.926	39.539.496.904	46.134.364.576
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 214.000.000	704.000.000	714.000.000	724.000.000	734.000.000
1	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 99.000.000	319.000.000	319.000.000	319.000.000	319.000.000

	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp 10.000.000	Rp 80.000.000	80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 15.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000	20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 10.000.000	Rp 30.000.000	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
3	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000	20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 10.000.000	Rp 30.000.000	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
4	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 15.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000	20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 10.000.000	Rp 30.000.000	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
5	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000	20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 10.000.000	Rp 30.000.000	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
6	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 85.000.000	105.000.000	115.000.000	125.000.000	135.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000

	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 50.000.000	Rp 70.000.000	80.000.000	Rp 90.000.000	Rp 100.000.000
7	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp -	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Rp 15.000.000	15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 15.453.406.533	Rp 22.972.792.251	28.757.759.109	Rp 29.866.992.904	Rp 34.986.359.776
8	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 13.602.933.973	Rp 20.897.272.435	26.479.687.312	Rp 27.367.113.927	Rp 32.243.492.901
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 3.695.606.000	6.656.463.560	7.487.756.272	7.505.307.526	9.046.369.032
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp 323.193.000	407.223.180	488.667.816	586.401.379	703.681.655
	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp 210.515.000	265.248.900	318.298.680	381.958.416	458.350.099
	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 214.963.000	270.853.380	325.024.056	390.028.867	468.034.641

	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 63.930.000	80.551.800	96.662.160	115.994.592	139.193.510
	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 179.787.000	226.531.620	271.837.944	326.205.533	391.446.639
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp 19.640.000	24.746.400	29.695.680	35.634.816	42.761.779
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 50.000	63.000	75.600	90.720	108.864
	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 352.529.000	444.186.540	533.023.848	639.628.618	767.554.341
	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp 8.870.000	11.176.200	13.411.440	16.093.728	19.312.474
	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp 26.609.000	33.527.340	40.232.808	48.279.370	57.935.244
	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp 4.715.941.200	6.820.085.912	8.742.554.239	8.742.554.239	10.145.924.456
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp 310.000.000	390.600.000	468.720.000	562.464.000	674.956.800
	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 2.499.587.755	4.029.056.200	6.179.376.686	6.235.252.023	7.190.399.247
	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp 303.995.652	383.034.522	459.641.426	551.569.711	661.883.653
	5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	Rp 45.946.634	57.892.759	69.471.311	83.365.573	100.038.687
	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 21.238.000	26.759.880	32.111.856	38.534.227	46.241.073
	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp 140.701.750	177.284.205	212.741.046	255.289.255	306.347.106

	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 253.571.388	319.499.949	383.399.939	460.079.926	552.095.912
	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		-	-	-	-
	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 48.144	60.661	72.794	87.352	104.823
	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp 175.070.000	220.588.200	264.705.840	317.647.008	381.176.410
	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp 10.504.200	13.235.292	15.882.350	19.058.820	22.870.585
	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp 30.637.250	38.602.935	46.323.522	55.588.226	66.705.872
	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		-	-	-	-
	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		-	-	-	-
9	5.1.01.02.05.0001	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.750.472.560	Rp 1.925.519.816	2.118.071.797	Rp 2.329.878.977	Rp 2.562.866.875
	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	-	-	-	-
	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000	17.952.000	19.747.200	21.721.920	23.894.112
	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 1.078.612.560	Rp 1.186.473.816	1.305.121.197	1.435.633.317	1.579.196.649

	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 216.000.000	Rp 237.600.000	261.360.000	287.496.000	316.245.600
	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 100.800.000	Rp 110.880.000	121.968.000	134.164.800	147.581.280
	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 338.740.000	Rp 372.614.000	409.875.400	450.862.940	495.949.234
		Belanja Jasa Keamanan	Rp -	Rp -	-	-	-
10	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 100.000.000	150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 200.000.000	490.000.000	520.000.000	570.000.000	600.000.000
11	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 50.000.000	Rp 300.000.000	300.000.000	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Kedaerahan Adat	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000

		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Lapangan		250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
12	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 150.000.000	190.000.000	220.000.000	270.000.000	300.000.000
	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp 80.000.000	Rp 120.000.000	150.000.000	Rp 200.000.000	Rp 230.000.000
	5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.564.529.587	2.437.000.000	2.494.000.000	2.551.000.000	2.647.000.000
13	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 130.000.000	235.000.000	240.000.000	245.000.000	250.000.000
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000	200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
	5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Rp 30.000.000	Rp 35.000.000	40.000.000	Rp 45.000.000	Rp 50.000.000
14	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 479.529.587	880.000.000	880.000.000	880.000.000	880.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000	200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp 149.529.587	Rp 400.000.000	400.000.000	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000

	5.2.02.05.003.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp 50.000.000	Rp 100.000.000	100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
15	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000	200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 250.000.000
16	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 200.000.000	220.000.000	240.000.000	260.000.000	280.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 200.000.000	Rp 220.000.000	240.000.000	Rp 260.000.000	Rp 280.000.000
17	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 50.000.000	Rp 60.000.000	70.000.000	Rp 80.000.000	Rp 90.000.000
18	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 125.000.000	135.000.000	155.000.000	175.000.000	185.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 40.000.000	Rp 50.000.000	70.000.000	Rp 90.000.000	Rp 100.000.000
	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000

	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
19	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 480.000.000	707.000.000	709.000.000	711.000.000	712.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.000.000	Rp 7.000.000	9.000.000	Rp 11.000.000	Rp 12.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 475.000.000	Rp 700.000.000	700.000.000	Rp 700.000.000	Rp 700.000.000
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp -	4.240.000.000	2.610.990.817	2.040.000.000	3.040.000.000
20	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp -	2.210.000.000	2.580.990.817	2.010.000.000	2.010.000.000
		Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2.200.000.000	2.570.990.817	2.000.000.000	2.000.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

21	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -	2.030.000.000	30.000.000	30.000.000	1.030.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor		2.000.000.000			1.000.000.000
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 813.000.000	976.600.000	1.162.920.000	1.387.504.000	1.647.004.800
22	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 100.000.000	120.000.000	140.000.000	160.000.000	180.000.000
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 100.000.000	Rp 120.000.000	140.000.000	Rp 160.000.000	Rp 180.000.000
23	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 693.000.000	831.600.000	997.920.000	1.197.504.000	1.437.004.800
	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp 3.000.000	Rp 3.600.000	4.320.000	Rp 5.184.000	Rp 6.220.800
	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	145.000.000	174.000.000	208.800.000	250.560.000	300.672.000

	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	370.000.000	444.000.000	532.800.000	639.360.000	767.232.000
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	175.000.000	210.000.000	252.000.000	302.400.000	362.880.000
24	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 20.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000
	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 20.000.000	Rp 25.000.000	25.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.210.000.000	3.110.000.000	3.170.000.000	2.400.000.000	2.480.000.000
25	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 850.000.000	1.600.000.000	1.660.000.000	1.390.000.000	1.470.000.000
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	340.000.000	Rp 340.000.000	Rp 370.000.000
	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp 120.000.000	Rp 300.000.000	320.000.000	Rp 350.000.000	Rp 400.000.000
	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 120.000.000	Rp 200.000.000	200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
	5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Rp 310.000.000	Rp 800.000.000	800.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
26	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 250.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000

	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp 250.000.000	Rp 500.000.000	500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
27	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 110.000.000	1.010.000.000	1.010.000.000	510.000.000	510.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp 100.000.000	Rp 1.000.000.000	1.000.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 6.806.601.000	18.038.300.000	17.429.630.000	19.977.593.000	20.237.852.300
	1.05.03.1.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PROVINSI	Rp 1.660.000.000	1.635.000.000	2.035.000.000	2.685.000.000	2.235.000.000
28	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Rp 175.000.000	-	-	Rp 650.000.000	-
	1.05.03.1.01.0004	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Rp 175.000.000			Rp 500.000.000	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp 150.000.000	
29	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Rp 1.485.000.000	1.635.000.000	2.035.000.000	2.035.000.000	2.235.000.000

	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 350.000.000	Rp 400.000.000	500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp 900.000.000	Rp 1.000.000.000	1.300.000.000	Rp 1.300.000.000	Rp 1.500.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	1.05.03.1.02	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Rp 1.990.601.000	Rp 6.060.000.000	6.426.000.000	Rp 6.428.963.000	Rp 6.278.460.000
30	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 600.000.000	660.000.000	726.000.000	798.600.000	878.460.000
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 30.000.000	Rp 33.000.000	36.300.000	Rp 39.930.000	Rp 43.923.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 4.000.000	Rp 4.400.000	4.840.000	Rp 5.324.000	Rp 5.856.400
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 14.000.000	Rp 15.400.000	16.940.000	Rp 18.634.000	Rp 20.497.400

	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp 40.000.000	Rp 44.000.000	48.400.000	Rp 53.240.000	Rp 58.564.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 12.200.000	Rp 13.420.000	14.762.000	Rp 16.238.200	Rp 17.862.020
	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 195.200.000	Rp 214.720.000	236.192.000	Rp 259.811.200	Rp 285.792.320
	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp 70.000.000	Rp 77.000.000	84.700.000	Rp 93.170.000	Rp 102.487.000
	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp 174.000.000	Rp 191.400.000	210.540.000	Rp 231.594.000	Rp 254.753.400
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 60.600.000	Rp 66.660.000	73.326.000	Rp 80.658.600	Rp 88.724.460
31	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Rp 175.000.000	-	-	330.000.000	-
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Rp 175.000.000			300.000.000	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				30.000.000	
32	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi		250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
33	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi		250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		Rp 250.000.000	250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000

34	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp 1.115.601.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.400.363.000	4.500.000.000
	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 300.000.000	Rp 1.000.000.000	500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
	5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	Rp 300.000.000	Rp 2.000.000.000	2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000
	5.2.02.02.04.0014	Belanja Modal Alat angkutan apung tak bermotor lainnya	Rp 515.601.000	Rp 1.500.000.000	2.000.000.000	Rp 1.900.363.000	Rp 2.000.000.000
35	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Rp 100.000.000	400.000.000	700.000.000	400.000.000	400.000.000
	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp 100.000.000	Rp 400.000.000	700.000.000	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
	1.05.03.1.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Rp 2.486.000.000	Rp 6.336.300.000	6.496.630.000	Rp 6.506.630.000	Rp 6.917.392.300
36	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Rp 71.000.000	Rp 78.100.000	85.910.000	Rp 85.910.000	Rp 103.951.100
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.630.000	4.392.300
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.630.000	Rp 4.392.300
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 20.000.000	22.000.000	24.200.000	24.200.000	Rp 29.282.000

	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 15.000.000	16.500.000	18.150.000	18.150.000	Rp 21.961.500
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 30.000.000	33.000.000	36.300.000	36.300.000	Rp 43.923.000
37	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 45.000.000	Rp 50.000.000	60.000.000	Rp 70.000.000	Rp 80.000.000
38	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 1.248.000.000	2.785.000.000	2.835.000.000	2.835.000.000	2.935.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 1.193.000.000	Rp 2.500.000.000	2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000
	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp 30.000.000	Rp 50.000.000	50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000

39	1.05.03.1.03.0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi		Rp 200.000.000	250.000.000	250.000.000	Rp 350.000.000
40	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp 300.000.000	360.000.000	410.000.000	410.000.000	610.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 300.000.000	Rp 350.000.000	400.000.000	400.000.000	Rp 600.000.000
41	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 835.000.000	2.855.000.000	2.855.000.000	2.855.000.000	2.855.000.000
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 150.000.000	Rp 200.000.000	200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp 80.000.000	Rp 150.000.000	150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Rp 600.000.000	Rp 2.500.000.000	2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000

42	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp 50.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 21.000.000	Rp 25.000.000	25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 12.000.000	Rp 20.000.000	20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp 12.000.000	Rp 20.000.000	20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	1.05.03.1.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 670.000.000	Rp 2.372.000.000	Rp 2.472.000.000	Rp 2.322.000.000	Rp 2.572.000.000
43	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
44	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp 70.000.000	315.000.000	315.000.000	315.000.000	315.000.000

	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 4.300.000	Rp 10.000.000	10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 2.100.000	Rp 70.000.000	70.000.000	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		Rp 50.000.000	50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 29.000.000	Rp 100.000.000	100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 14.350.000	Rp 30.000.000	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 20.250.000	Rp 50.000.000	50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
45	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Rp 100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 10.700.000	Rp 10.700.000	10.700.000	Rp 10.700.000	Rp 10.700.000
	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp 6.250.000	Rp 6.250.000	6.250.000	Rp 6.250.000	Rp 6.250.000

	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 78.050.000	Rp 78.050.000	78.050.000	Rp 78.050.000	Rp 78.050.000
46	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Rp 150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	45.000.000	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000
47	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Rp 150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000

	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000
48	1.05.03.1.04.0011	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi		Rp 200.000.000	250.000.000	Rp 300.000.000	Rp 350.000.000
49	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp 150.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Rp 200.000.000
	5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rp 150.000.000	Rp 200.000.000	200.000.000		Rp 200.000.000
50	1.05.03.1.04.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi		480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp 10.000.000	10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Rp 5.000.000	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000

	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		Rp 100.000.000	100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Rp 50.000.000	50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		Rp 15.000.000	15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
51	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	375.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	7.000.000	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		Rp 15.000.000	15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp 10.000.000	10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000

	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		300.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
52	1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor		202.000.000	202.000.000	202.000.000	202.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 80.000.000	80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Rp 7.000.000	7.000.000	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		Rp 15.000.000	15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
		TOTAL EFISIENSI	Rp 26.261.537.120	52.968.692.251	56.859.299.926	59.517.089.904	66.372.216.876
				52.968.692.251	56.859.299.926	59.517.089.904	66.372.216.876

4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Berikut adalah uraian dari Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah :

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Pendidikan yang berkeadilan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

		Jumlah aparatur dan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (perjenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
		Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi	
2	Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Provinsi	

3	Infrastruktur Tuntas Merata	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
---	-----------------------------	---	---	--

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
	PENANGGULANGAN BENCANA			
A			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
1		Meningkatkan Kapasitas Warga negara dan aparatur didaerah rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Subkegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur tentang risiko bencana melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan demikian, diharapkan kapasitas mereka dalam menghadapi bencana dapat meningkat
2		Integrasi perencanaan pembangunan dengan penanggulangan bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Subkegiatan ini melibatkan analisis risiko bencana untuk mengintegrasikan hasilnya ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui integrasi perencanaan pembangunan dengan penanggulangan bencana
B			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

1		Meningkatkan Kapasitas Warga negara dan aparatur didaerah rawan bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Subkegiatan ini memberikan pelatihan kepada masyarakat dan aparatur tentang langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bencana.
2		meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan Warga negara dan aparatur didaerah rawan bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Subkegiatan ini menyediakan peralatan yang diperlukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesiapsiagaan
3		Integrasi perencanaan pembangunan dengan penanggulangan bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi	Subkegiatan ini bertujuan menyusun rencana darurat untuk menghadapi bencana secara terstruktur melalui integrasi perencanaan pembangunan dengan penanggulangan bencana
4		meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan Warga negara dan aparatur didaerah rawan bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Subkegiatan ini melibatkan simulasi kesiapsiagaan untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam menghadapi bencana.
C			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
1		Meminimalisir kerusakan, kerugian, beban penderitaan dan korban akibat bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Subkegiatan ini memastikan adanya tindakan cepat dan terkoordinasi saat terjadi bencana yang dapat meminimalkan kerusakan, kerugian, dan korban akibat bencana.
2		Meminimalisir kerusakan, kerugian, beban penderitaan dan korban akibat bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Subkegiatan ini fokus pada upaya penyelamatan korban bencana secara efektif untuk meminimalkan kerusakan, kerugian, dan korban akibat bencana.
3		Meminimalisir kerusakan, kerugian, beban penderitaan dan korban akibat bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Subkegiatan ini menyediakan logistik yang diperlukan untuk operasi pemberian bantuan terhadap korban bencana

4		meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan Warga negara dan aparatur didaerah rawan bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Subkegiatan ini mengaktifkan sistem komando untuk memastikan penanganan bencana yang terkoordinasi
D			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
1		Meminimalisir kerusakan, kerugian, beban penderitaan dan korban akibat bencana	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Subkegiatan ini memastikan koordinasi yang efektif dalam fase pemulihan pascabencana.
2		meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan Warga negara dan aparatur didaerah rawan bencana	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Subkegiatan ini meningkatkan kemampuan aparatur dalam menangani keadaan darurat.

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun								Kondisi Akhir	Ket.
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
1.	Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel	INDEKS	131,24	131,05	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,24	127,24	BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN

6. Target Kinerja Peneyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat vital dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. IKK berfungsi sebagai **metrik terukur** yang memberikan gambaran jelas tentang sejauh mana suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuannya. Dengan menetapkan IKK yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART), organisasi dapat **memantau progres secara objektif**, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan membuat keputusan berbasis data untuk optimalisasi kinerja. IKK bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah digariskan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)									
BPBD Provinsi Sumatera Selatan									
No.	Indikator	%	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
4	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
5	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
6	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN

7	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
8	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang menjadi Pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan oleh seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun BPBD Provinsi telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh karyawan / karyawan BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dapat dinikmati secara lebih adil dan merata untuk masyarakat kita yang belum terkena bencana dengan masyarakat yang terkena bencana.

Berdasarkan latar belakang, tugas dan fungsi BPBD Provinsi serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan diharapkan agar :

1. Semua Aparatur BPBD Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban melaksanakan Rencana Strategis ini secara konsisten dan bertanggungjawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah semua potensi yang dimiliki, berdaya guna dan berhasilguna serta berkelanjutan.
2. Dalam perumusan Visi BPBD Provinsi adalah untuk dapat mendukung Gubernur Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pembangunan dalam penanggulangan bencana.

3. Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahun selama lima tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, serta menjadi dasar penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Agar visi dan misi yang disepakati dapat terwujud, maka BPBD Provinsi harus lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat baik yang tidak terkena bencana (rawan bencana) maupun masyarakat yang terkena bencana, sinergi antar pelaku pembangunan, lintas kabupaten / kota, antar wilayah dan kawasan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak, guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Renstra BPBD ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama, sesuai dengan fungsinya yaitu: Koordinasi, Komando dan Pelaksana.

Palembang, Mei 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

M. IQBAL ALISYAHBANA., S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001